



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR**

LAPORAN KINERJA (LKJ)

WEBSITE : kab-karanganyar.kpu.go.id
EMAIL : kab_karanganyar@kpu.go.id

**KPU KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2022**



SUARA RAKYAT, SUARA PEMILU



Kata Pengantar

Segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya KPU Kabupaten Karanganyar mampu menyusun LAPORAN KINERJA (LKj) Tahun 2022. Penyusunan Laporan Kinerja merupakan wujud pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan wujud pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

KPU Kabupaten Karanganyar sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang berkewajiban melaksanakan Pemilihan Umum yang berintegritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan visi KPU Kabupaten Karanganyar.

Laporan Kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban dan salah satu tolok ukur yang digunakan oleh KPU Kabupaten Karanganyar sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kepada *stakeholder* serta dalam rangka mendukung penerapan manajemen berbasis *kinerja*.

Laporan Kinerja ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

KPU Kabupaten Karanganyar memiliki komitmen dan terus berupaya agar pelaksanaan kinerja berorientasi pada hasil, baik *output* maupun *outcome*. Hasil capaian kinerja KPU Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2022 atas sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana kinerja yang telah ditetapkan. Selanjutnya melalui analisis capaian kinerja dalam LKj KPU Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi maupun perbaikan kinerja dan akuntabilitas KPU Kabupaten Karanganyar di Tahun mendatang serta mampu mewujudkan visi KPU Kabupaten Karanganyar yakni menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilakukan guna mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Hasil kinerja KPU yang berorientasi pada *output* maupun *outcome* diharapkan dapat menjadi pendorong untuk meningkatkan peran kelembagaan dan peningkatan efektivitas, efisiensi dan produktivitas kinerja seluruh jajaran

pejabat dan pelaksana di lingkungan KPU Kabupaten Karanganyar pada tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja KPU secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Kami menyadari bahwa apa yang telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Karanganyar masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu kritik dan saran dari berbagai pihak sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar. Semoga upaya yang telah dan akan terus dilakukan mendapat rahmat dan hidayah Allah SWT.

Karanganyar, Februari 2023


KETUA
KABUPATEN
KARANGANYAR
TRIASTUTI SURYANDARI

Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja (LKj) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karanganyar atas kegiatan dan program dalam mencapai Visi dan Misi serta sasaran dan strategisnya kepada stakeholder.

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Karanganyar tahun 2022 tidak hanya berisi keberhasilan dan kegagalan capaian strategis KPU Kabupaten Karanganyar pada Tahun Anggaran 2022 melainkan juga rekomendasi kedepan untuk menuju Pemilu yang lebih berkualitas.

KPU Kabupaten Karanganyar menetapkan sasaran strategis dicapai pada tahun 2022, sasaran strategis dicapai dengan menentukan 20 (dua puluh) indikator kinerja yang terukur dan target yang ditetapkan. Capaian kinerja diukur dengan menghitung jumlah realisasi kinerja dan keuangan dari 20 (dua puluh) indikator kinerja yang telah ditetapkan.

KPU Kabupaten Karanganyar mampu melaksanakan hampir seluruh kegiatan yang telah direncanakan di awal tahun, tanpa mengalami hambatan dan kendala yang berarti. KPU Kabupaten Karanganyar mampu melaksanakan kegiatan sebesar 100%. Konsultasi dan koordinasi dengan berbagai instansi terkait masih tetap diperlukan untuk mewujudkan kinerja yang lebih baik di tahun mendatang, hal itu merupakan sebuah keberhasilan yang dicapai oleh KPU Kabupaten Karanganyar.

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran strategis yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pencapaian target indikator kinerja KPU Kabupaten Karanganyar tidak hanya didasarkan pada komitmen namun juga atas keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dan *civil society*. Secara umum, beberapa capaian utama kinerja tahun 2022 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target
1.	Terwujudnya Sistem Informasi Mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas di KPU Kabupaten Karanganyar	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada Publik	100 %
2.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kabupaten Karanganyar yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi	B
3.	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian	100%

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target
	Sumber Daya Manusia	secara tepat waktu dan akurat	
4.	Pembentukan dan Evaluasi Badan Penyelenggara Adhoc	Persentase Badan Adhoc yang dibentuk dan dievaluasi	100%
5.	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih tepat waktu	100%
6.	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan E-government di KPU Kabupaten Karanganyar	Persentase sarana dan prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%
7.	Terwujudnya dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran Tugas KPU Kabupaten Karanganyar	Persentase sarana transportasi, gedung dan gudang KPU Kabupaten Karanganyar yang berfungsi dengan baik	100%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja Satker KPU Kabupaten Karanganyar yang berfungsi dengan baik	100 %
8.	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Karanganyar yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	4 kali
9.	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100 %
		Persentase target kinerja KPU Kabupaten Karanganyar yang tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja	100 %
10.	Meningkatnya penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	Persentase penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan oleh KPU Kabupaten Karanganyar	100 %
11.	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu oleh KPU Kabupaten Karanganyar	1 Laporan
12.	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	1 Laporan

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target
13.	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya Sesuai dengan Data SAK	1 Laporan
14.	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase arsip yang dikelola sesuai jadwal retensi arsip oleh KPU Kabupaten Karanganyar	100%
15.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Karanganyar	Persentase ketaatan KPU Kabupaten/Kota dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu	100%
16.	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola, didokumentasikan dan disajikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%
17.	Terlaksananya pendaftaran dan verifikasi Partai Politik Pemilu Tahun 2024	Persentase terlaksananya pendaftaran dan verifikasi Partai Politik Pemilu Tahun 2024 sesuai ketentuan yang berlaku	100%
18.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu Sesuai Tahapan dan Jadwal	Persentase pemutakhiran data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100%
19.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di laman atau media sosial KPU Kabupaten Karanganyar	100%
20.	Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum	Persentase terlaksananya kegiatan Pendidikan Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi untuk masyarakat umum	100%

KPU Kabupaten Karanganyar melaksanakan kegiatan selama Tahun 2022 dengan pembiayaan dari APBN dengan DIPA Nomor DIPA-076.01.2.657520/2022 Sebesar Rp.4.912.996.000. Dari anggaran tersebut terealisasi sebesar 96,54% atau sebesar Rp 4.742.806.526. Sedangkan persentase capaian kinerja KPU Kabupaten Karanganyar mencapai 100% pada tahun 2022 ini.

KPU kabupaten Karanganyar berhasil melaksanakan target indikator kinerja pada tahun 2022 dengan dukungan SDM KPU Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2022 sebanyak 30 personel yang terdiri dari 5 (lima) orang Komisioner KPU, 1 (satu) orang Sekretaris, 4 (empat) orang Kasubag, 12 (dua belas) orang Staf Sekretariat, 8 (delapan) orang PPNPN.

Dengan hasil Laporan Kinerja ini diharapkan terjalin koordinasi dan komunikasi yang lebih kuat dalam penetapan kinerja serta kepatuhan dalam melaksanakan penetapan kinerja yang telah ditetapkan di awal tahun, agar pencapaian target kinerja dan perencanaan dapat berjalan lebih selaras dan tidak terjadi perubahan yang terlalu signifikan di dalam perencanaan kinerja maupun anggaran.

Daftar Isi

	Halaman
Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	iii
Daftar Isi	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi	2
1. Kedudukan	2
2. Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Kabupaten Karanganyar	3
a. Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Kabupaten Karanganyar dalam Penyelenggaraan Pemilu	3
b. Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Kabupaten Karanganyar dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	5
c. Tugas Ketua KPU Kabupaten Karanganyar	8
C. Struktur Organisasi	11
D. Permasalahan	16
E. Sistematika	18
BAB II PERENCANAAN KINERJA	20
A. Sasaran RPJMN 2020 - 2024	20
B. Rencana Strategis KPU Kabupaten Karanganyar 2020 - 2024	23
1. Pernyataan Visi dan Misi	23
2. Tujuan dan Sasaran Strategis	24
C. Rencana Kinerja Tahunan	25
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	32
A. Pengukuran Capaian Kinerja KPU Kabupaten Karanganyar	32
1. Indikator Kinerja	33
2. Skala Penilaian Capaian	34
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	37



C. Akuntabilitas Keuangan	93
---------------------------	----

BAB IV	PENUTUP	97
---------------	----------------	-----------

Lampiran

1. DIPA KPU Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2022
2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022
3. Rencana Aksi Kinerja Tahun 2022
4. Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Karanganyar Tahun 2022
5. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022
6. Realisasi Anggaran Tahun 2022
7. Laporan Hasil Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tahun Berjalan Tahun 2022 (Laporan Capaian Kinerja E-Monnev Bappenas)



LAPORAN KINERJA **KOMISI PEMILIHAN UMUM** **KABUPATEN KARANGANYAR** **TAHUN 2022**



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Komisi Pemilihan Umum merupakan salah satu lembaga konstitusional yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum baik secara Nasional maupun lokal. Pemilihan Umum merupakan instrumen terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasi suatu negara. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 9 ayat (1) disebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bersifat hierarkis. Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar yang berada di bawah Komisi Pemilihan Umum bertugas melaksanakan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di wilayah Kabupaten Karanganyar.

Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota, serta kelembagaan Komisi Pemilihan Umum (KPU), perlu disusun dokumen perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang memuat program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh KPU. Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Kabupaten Karanganyar telah menetapkan Rencana Strategis (Renstra) KPU Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024 dengan mengacu pada Renstra KPU RI yang tertuang dalam Keputusan KPU Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/IV/2020 tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024. KPU Kabupaten Karanganyar sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari organisasi KPU berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan agar target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis maupun Rencana Kinerja Tahunan dapat tercapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta sasaran strategis KPU.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap entitas akuntabilitas kinerja wajib menyusun laporan akuntabilitas kinerja. Laporan akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dalam rangka mencapai sasaran strategis yang telah dilaksanakan baik dalam RPJMN maupun Rencana Strategis

(Renstra). KPU Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu entitas akuntabilitas kinerja yang mewujudkan pertanggungjawaban kinerja yang dicapai atas penggunaan anggaran dengan melakukan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja tahun 2022. Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

KPU Kabupaten Karanganyar sebagai lembaga yang menggunakan anggaran Negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan maka berkewajiban membuat Laporan Kinerja (LKj). LKj KPU Kabupaten Karanganyar juga sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Kabupaten Karanganyar atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Pembuatan laporan tersebut didasarkan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kabupaten Karanganyar selama Tahun Anggaran 2022. Setiap capaian kinerja (*performance result*) Tahun 2022 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*Performance Agreement*) Tahun 2022 sebagai tolok ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU Kabupaten Karanganyar selama 1 (satu) Tahun. Analisa atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai *check point* yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai perwujudan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

B. KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

1. Kedudukan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022, KPU Kabupaten Karanganyar berkedudukan di Ibukota Kabupaten.

2. Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Kabupaten Karanganyar

KPU Kabupaten Karanganyar memiliki tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020.

a. Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Kabupaten Karanganyar dalam Penyelenggaraan Pemilu

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tugas KPU Kabupaten Karanganyar meliputi :

- 1) menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- 2) melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- 4) menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;
- 5) memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
- 6) melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- 7) membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- 8) mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat beritanya;
- 9) menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;

- 10) menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- 11) melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- 12) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan wewenang KPU Kabupaten Karanganyar dalam menyelenggarakan Pemilu sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, adalah sebagai berikut :

- 1) menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- 2) membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- 3) menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- 4) menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- 5) menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 6) melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yakni menyelenggarakan Pemilu di wilayah Kabupaten Karanganyar, KPU Kabupaten Karanganyar berkewajiban:

- 1) melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- 2) memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- 3) menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- 4) melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 5) menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- 6) mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- 7) mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 8) menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- 9) membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- 10) melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/ Kota;
- 11) menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
- 12) melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 13) melaksanakan putusan DKPP; dan
- 14) melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

b. Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Kabupaten Karanganyar dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, KPU Kabupaten Karanganyar bertugas dan berwenang:

- a. merencanakan program dan anggaran;
- b. merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- c. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan

Wakil Wali Kota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;

- d. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam wilayah kerjanya;
- f. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- g. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- h. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
 1. Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD;
 2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan
 3. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- i. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- j. menetapkan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang telah memenuhi persyaratan;
- k. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
- l. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;

- m. menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan mengumumkannya;
- n. mengumumkan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- o. melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- p. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
- q. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- s. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- t. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- u. menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD Kabupaten/Kota; dan
- v. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan kewajiban KPU Kabupaten Karanganyar berdasarkan ketentuan Pasal 32 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, KPU Kabupaten Karanganyar wajib:

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara adil dan setara;

- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;
- i. membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
- k. melaksanakan Keputusan DKPP; dan
- l. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Tugas Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar

Dalam pasal 29 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020, Ketua KPU Kabupaten Karanganyar mempunyai tugas :

- 1) Memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan KPU Kabupaten Karanganyar;
- 2) Bertindak untuk dan atas nama KPU Kabupaten Karanganyar ke luar dan ke dalam;
- 3) Memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU Kabupaten Karanganyar;
- 4) Mengoordinasikan hubungan kerja antar Divisi;
- 5) Mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas Divisi dan Korwil; dan

6) Menandatangani seluruh keputusan KPU Kabupaten Karanganyar.

Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KPU Kabupaten Karanganyar bertanggungjawab kepada rapat pleno KPU Kabupaten Karanganyar. Guna memperlancar pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Kabupaten Karanganyar dilakukan pembagian tugas diantara para anggota dalam bentuk divisi, yang ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten Karanganyar. Setiap anggota KPU Kabupaten Karanganyar dapat menjadi ketua untuk 1 (satu) Divisi dan setiap anggota KPU dapat menjadi wakil ketua untuk 1 (satu) divisi.

Berdasarkan Surat KPU RI Nomor 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 Perihal Penamaan dan Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten Kota serta Berita Acara (BA) Rapat Pleno KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 727/PK.01-BA/3313/KPU-Kab/XII/2018 tentang Pembagian Divisi KPU Kabupaten Karanganyar, pembagian divisi dan koordinator wilayah Komisioner KPU Kabupaten Karanganyar Masa Bakti 2018 – 2023 sebagai berikut :

NO	NAMA	DIVISI		WILAYAH	TUGAS DIVISI TERKAIT KEBIJAKAN
		KETUA	WAKIL		
1	TRIASTUTI SURYANDARI, SE	Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga	Hukum dan Pengawasan	Colomadu, Gondangrejo	1. Administrasi Perkantoran, kerumahtanggaan dan kearsipan; 2. Protokol dan Persidangan; 3. Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara; 4. Pelaksanaan, Pertanggungjawab an dan Pelaporan Keuangan; 5. Peresmian Keanggotaan dan Pelaksanaan Sumpah janji; 6. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik pemilu;
2	DEVID WAHYUNINGTYAS, SP.	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Perencanaan, Data dan informasi	Karanganyar, Matesih, Mojogedang	1. Sosialisasi Kepemiluan; 2. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih; 3. Publikasi dan Kehumasan; 4. Kampanye Pemilu dan Pemilihan; 5. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi; 6. Kerja sama antar lembaga; 7. PAW Anggota KPU

NO	NAMA	DIVISI		WILAYAH	TUGAS DIVISI
					Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP kabupaten/Kota; 8. Rekrutmen Badan Adhoc; 9. Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM; 10. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi; 11. Diklat dan pengembangan SDM; 12. Penelitian dan Pengembangan Kepemiluan; 13. Pengelolaan dan pembinaan SDM.
3	MUHAMMAD MAKSUM, S.Sos., MM.	Teknis Penyelenggaraan	Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga	Tawangmangu, Ngargoyoso, Karangpandan, Kerjo, Jenawi.	1. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi; 2. Verifikasi partai politik dan DPD; 3. Pencalonan Peserta Pemilu; 4. Pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara 5. Penetapan hasil dan Pendokumentasian hasil – hasil Pemilu dan Pemilihan; 6. Pelaporan Dana Kampanye 7. Penggantian antar waktu Anggota DPRD.
4	SUHARJANTO, S.Sos.	Hukum dan Pengawasan	Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi masyarakat dan SDM	Jumapolo; Jumanono; Jatipuro; Jatiyoso	1. Pembuatan Rancangan Keputusan; 2. Telaah dan advokasi Hukum; 3. Dokumentasi dan Publikasi Hukum; 4. Pengawasan dan Pengendalian internal; 5. Penyelesaian sengketa proses dan hasil pemilu; 6. Penyelesaian Pelanggaran Administrasi dan Etik
5	KUSTIYONO, A.Md.	Perencanaan Data dan Informasi	Teknis Penyelenggaraan	Tasikmadu, Jaten, Kebakkramat	1. Penyusunan Program dan Anggaran; 2. Evaluasi Penelitian dan Pengkajian Kepemiluan;

NO	NAMA	DIVISI	WILAYAH	TUGAS DIVISI
				3. Monitoring Evaluasi, Pengendalian Program dan Anggaran; 4. Pemutakhiran dan Pemeliharaan data pemilih; 5. Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilu; 6. Pengelolaan aplikasi dan jaringan IT; 7. Pengelolaan Informasi; 8. Pengelolaan dan Penyajian Data hasil pemilu nasional; 9. Pengelolaan dan Penyediaan informasi publik (PPID)

C. STRUKTUR ORGANISASI

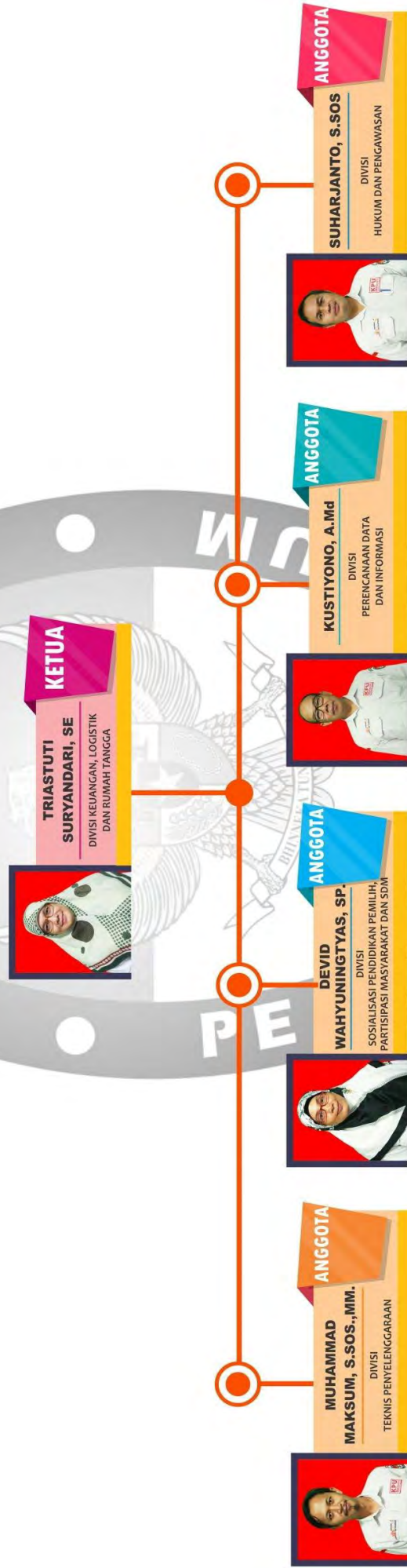
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar memiliki Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan yang harus dicapai. Guna mencapai hal tersebut diperlukan struktur organisasi dan kelembagaan yang kuat, Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal serta proses tata laksana yang akuntabel dan transparan dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berkualitas. Suatu organisasi yang telah memiliki struktur organisasi dan SDM yang baik, namun dikelola dengan sistem manajemen yang tidak tepat, maka organisasi dan SDM tersebut tidak akan menghasilkan kinerja yang unggul.

KPU Kabupaten Karanganyar merupakan organisasi yang telah terstruktur dengan baik sehingga mampu bersinergi satu sama lain dalam pelaksanaan seluruh kegiatan dalam rangka pencapaian visi, misi serta ketepatan kinerja yang telah direncanakan pada awal tahun anggaran 2022. Keanggotaan KPU Kabupaten Karanganyar terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota yang membidangi divisinya masing-masing namun dengan satu tujuan yakni menjadikan KPU Kabupaten Karanganyar sebagai organisasi yang mampu menjadi penyelenggara Pemilu yang selalu mengalami peningkatan kualitas dari waktu ke waktu. Keberhasilan pencapaian tujuan tersebut dapat terlaksana dengan penggabungan kekuatan maupun kelemahan yang dimiliki oleh seluruh entitas di dalam lingkungan KPU Kabupaten Karanganyar.

Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar dibentuk berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai berikut :



STRUKTUR ORGANISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR



Kpu Karanganyar



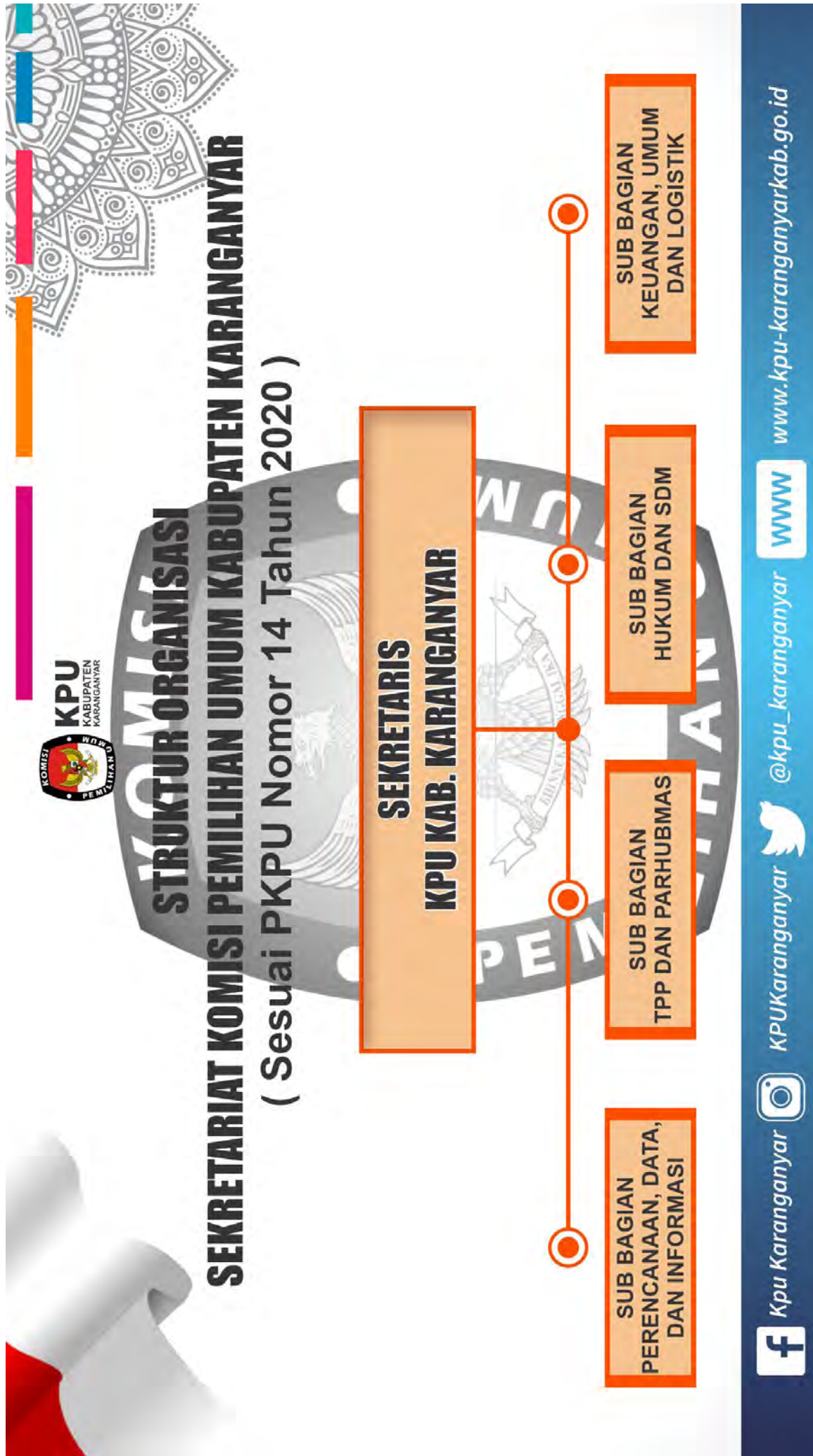
KPUKaranganyar



@kpu_karanganyar

WWW

kab-karanganyar.kpu.go.id



KPU Kabupaten Karanganyar telah menetapkan Kinerja yang tertuang dalam DIPA KPU Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

Tabel 1.4

KETETAPAN KINERJA TAHUN 2022

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ RINCIAN OUTPUT	VOLUME/SATUAN
076.01.CQ	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	
6709	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	
6709.QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	8 lembaga
6709.QGE.001	Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	1 lembaga
6709.QGE.002	Pembentukan/Seleksi Badan Penyelenggara Adhok Pemilu	1 lembaga
6709.QGE.003	Fasilitasi Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	1 lembaga
6709.QGE.004	Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	1 lembaga
6709.QGE.005	Pemutakhiran Data Pemilih	1 lembaga
6709.QGE.006	Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	1 lembaga
6709.QGE.007	Penyusunan Peraturan Pemilu	1 lembaga
6709.QGE.008	Logistik Pemilu	1 lembaga
6709.RAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1 unit
6709.RAN.001	Sarana IT Pemilu	1 unit
6710	Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Peserta Pemilu	
6710.QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	2 lembaga
6710.QGE.001	Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	1 lembaga
6710.QGE.002	Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu	1 lembaga
6887	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	
6887.QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	3 lembaga
6887.QGE.001	Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih	1 lembaga
6887.QGE.002	Pemutakhiran Data Pemilih	1 lembaga
6887.QGE.003	Penetapan Data Pemilih	1 lembaga

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ RINCIAN OUTPUT	VOLUME/SATUAN
6889	Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	
6889.QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	3 lembaga
6889.QGE.001	Fasilitasi Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	1 lembaga
6889.QGE.002	Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	1 lembaga
6889.QGE.003	Evaluasi Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	1 lembaga
6890	Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	
6890.QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	3 lembaga
6890.QGE.001	Fasilitasi Kesiapan Kegiatan Pencalonan	1 lembaga
6890.QGE.002	Pelaksanaan Proses Pencalonan	1 lembaga
6890.QGE.003	Evaluasi Pencalonan	1 lembaga
076.01.WA	Program Dukungan Manajemen	
3355	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	
3355.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1 lembaga
3355.EBA.994	Layanan Perkantoran	1 lembaga
3360	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	
3360.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1 lembaga
3360.EBA.962	Dukungan Fasilitasi Kegiatan KPU	1 lembaga
3360.EBA.994	Layanan Perkantoran	1 lembaga
6634	Data dan Informasi	
6634.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1 lembaga
6634.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	1 lembaga

D. PERMASALAHAN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi menyelenggarakan pemilu di wilayah Kabupaten Karanganyar, KPU Kabupaten Karanganyar juga menghadapi permasalahan, baik yang datang dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi. Dimensi permasalahannya pun beragam, adapun permasalahan KPU Kabupaten Karanganyar berdasarkan dimensi prosesnya dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Kelembagaan

- a. Kebijakan dalam bentuk peraturan seringkali mengalami perubahan dalam waktu yang berdekatan.
 - b. Pola pikir (*mind-set*) dan budaya kerja (*culture-set*) pada kebiasaan yang sudah dilakukan yang terkadang sudah tidak relevan.
2. Sumber Daya Manusia
 - a. Perbandingan antara jumlah pegawai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya belum proporsional.
 - b. Sistem *reward* terhadap pegawai belum memadai sehingga secara tidak langsung mempengaruhi kinerja pegawai.
 - c. Kebutuhan pegawai belum sesuai dengan Peta Jabatan dan Analisis Beban Kerja (ABK) sebagaimana Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 1153/SDM.01/01/2021 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.
 - d. Belum memiliki kelompok Jabatan Fungsional yang sesuai dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Sekretariat di tingkat Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
3. Kepemimpinan

Proses pengambilan keputusan terkadang mengalami kendala dan membutuhkan waktu karena adanya proses birokrasi berjenjang.
4. Perencanaan dan Anggaran
 - a. Kebijakan terkait perencanaan dan anggaran sangat dinamis;
 - b. Petunjuk teknis tentang pelaksanaan program dan anggaran belum diterbitkan di awal tahun sehingga terkendala dalam menyusun program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun;
 - c. Implementasi dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja belum terintegrasi dalam suatu sistem manajemen kinerja organisasi.
5. *Business Process* dan Kebijakan
 - a. Prosedur Standar Operasional (SOP) yang telah disusun belum mengakomodir seluruh tugas pokok dan fungsi di masing-masing divisi;
 - b. Belum efektifnya penerapan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang ada di KPU Kabupaten Karanganyar.
6. Dukungan Infrastruktur dan IT

- a. Sarana dan prasarana kerja yang tersedia belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
 - b. Status kepemilikan bangunan gedung dan gudang KPU Kabupaten Karanganyar masih pinjam pakai dari Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar. Hal ini belum mendukung sifat kelembagaan KPU yang tetap.
 - c. Kurangnya SDM yang memiliki keahlian SDM di bidang teknologi informasi/IT;
 - d. Dukungan Sarana IT di masing-masing sub bagian belum maksimal (Spesifikasi PC/Laptop tidak update, peralatan multimedia terbatas).
7. Hubungan dengan *Stakeholders*
- a. *Stakeholders* belum sepenuhnya memahami mekanisme kerja yang dibangun oleh KPU Kabupaten Karanganyar, karena *brand image* yang dibangun belum begitu kuat.
 - b. Konsolidasi diantara lembaga penyelenggara pemilu dan *stakeholders* belum dilaksanakan dengan efektif.

E. SISTEMATIKA

Sistematika penulisan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

1. KATA PENGANTAR

Memuat gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan laporan kinerja

2. RINGKASAN EKSEKUTIF

Memuat ringkasan berupa pokok – pokok isi dari seluruh laporan kinerja

3. DAFTAR ISI

4. BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

5. BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan ringkasan atau ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

6. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

7. BAB IV PENUTUP

BAB ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja serta langkah yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

LAMPIRAN

- a. Perjanjian Kinerja
- b. Rencana Kinerja Tahunan
- c. Realisasi Anggaran
- d. Lain-lain yang dianggap perlu



LAPORAN KINERJA **KOMISI PEMILIHAN UMUM** **KABUPATEN KARANGANYAR** **TAHUN 2022**



BAB II

PERENCANAAN **KINERJA**

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. SASARAN RPJMN 2020 - 2024

KPU Kabupaten Karanganyar memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum dan mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif dan efisien. Hal tersebut seiring dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020-2024, yakni “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”. RPJMN tahun 2020 -2024 tersebut menjadi pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam menyusun Rencana Strategis dan menjadi bahan pertimbangan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Keberhasilan program Prioritas Nasional Konsolidasi Demokrasi diukur dengan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), IDI meliputi 3 (tiga) indikator yakni, Kebebasan Sipil, Hak-Hak Politik dan Lembaga-Lembaga Demokrasi. Adapun kontribusi KPU dalam merealisasikan target nasional adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub-indikator IDI antara lain :

1. Hak memilih dan dipilih:
 - a. Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
 - b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
 - c. Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT);
 - d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu; dan
 - e. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi.
2. Pemilihan Umum yang bebas dan adil:
 - a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPU dalam penyelenggaraan Pemilu;
 - b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

Pemilu sebagai salah satu proses politik sudah pasti di dalamnya terdapat beragam bentuk partisipasi politik Warga Negara, seperti mencalonkan diri, memberikan suara, dan mengikuti kampanye politik. Sementara salah satu dampak negatif dari kebebasan penggunaan hak-hak politik warga Negara adalah munculnya sejumlah isu dan masalah. Isu strategis dalam mewujudkan Konsolidasi Demokrasi menurut rencana pembangunan nasional periode 2020-2024 adalah :

1. Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
2. Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi; akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan; kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika; peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal; rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Terdapat 2 (dua) kegiatan prioritas dalam RPJMN 2020-2024 terkait dengan KPU, yaitu “Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi” dan “Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan”. Adapun proyek prioritas RPJMN 2020-2024 yang termasuk dalam kegiatan prioritas Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi yang terkait dengan KPU, yaitu Badan Penyelenggara *Adhoc* Pemilu; Ketersediaan Logistik Pemilu; Pengelolaan Calon Peserta Pemilu; dan Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu. Sementara proyek prioritas yang termasuk dalam kegiatan prioritas Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan yang terkait dengan KPU, yakni Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu; Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum; Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas; Pendidikan Pemilih kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi dan Daerah Rawan Konflik/Bencana; Sosialisasi Kebijakan KPU kepada *Stakeholders*; dan Peningkatan Kompetensi SDM KPU.

Arah kebijakan dan strategi KPU yang mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024 ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis KPU. Adapun arah kebijakan KPU dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program yakni :

1. Program Dukungan Manajemen (076.WA)
Program ini merupakan program generik KPU dengan sasaran Program (*outcome*) yang hendak dicapai yaitu :
 - a. terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalnya;
 - b. meningkatnya kapasitas sumber daya manusia yang berkompeten;
 - c. terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU;

- d. meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU; dan
- e. terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan.

Sedangkan *Output* Program yang diharapkan dapat dicapai oleh KPU berupa terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepiluan dan operasionalisasinya, terwujudnya data pemilih yang terkini, meningkatnya kapasitas sumber daya manusia yang berkompeten, dan meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU. Program ini juga mencakup kegiatan- kegiatan yang sifatnya mendukung manajemen kegiatan KPU, baik dari aspek SDM, keuangan, sarana dan prasarana layanan perkantoran, dan proses pengawasan internal melalui APIP.

2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.CQ)

Program ini merupakan program dukungan kegiatan teknis KPU yang sebagian besar diatur melalui Tahapan Pemilu/Pemilihan, dengan sasaran Program (outcome) yang hendak dicapai adalah :

- a. terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya;
- b. terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan; dan
- c. terwujudnya tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal.

Sedangkan *Output* Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi adalah tersusunnya rancangan Peraturan dan Keputusan KPU serta pendokumentasian informasi hukum sesuai peraturan perundang-undangan, terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan, dan terwujudnya tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal. Keluaran inilah yang menjadi salah satu kunci keberhasilan KPU dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Pemilu/Pemilihan.

KPU Kabupaten Karanganyar dalam pelaksanaan Pemilu maupun Pemilihan Serentak ditahun-tahun mendatang akan menghadapi tantangan besar yakni, menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif serta mewujudkan Pemilu/Pemilihan Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil. Tantangan lain yang akan dihadapi adalah perlunya perumusan strategis yang tepat untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih melalui pendidikan pemilih karena peningkatan partisipasi politik masyarakat sangatlah penting sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemilu.

B. RENCANA STRATEGIS KPU KABUPATEN KARANGANYAR 2020 - 2024

Rencana Strategis KPU Kabupaten Karanganyar 2020-2024 telah ditetapkan melalui Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 20/HK.03.1/3313/2021 tentang Penetapan Rencana Strategis KPU Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024. Penyusunan Rencana Strategis tersebut berpedoman Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024 yang tertuang dalam Keputusan KPU Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 yang disusun berpedoman pada RPJMN 2020-2024.

Rencana Strategis merupakan proses awal dari rangkaian proses dalam usaha untuk mencapai tujuan selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan Lingkungan Internal (Kekuatan dan Kelemahan), Lingkungan Eksternal (Peluang dan Tantangan) suatu organisasi. KPU Kabupaten Karanganyar memiliki rencana strategis tahun 2020-2024 yang merupakan bagian integral dari KPU.

Rencana Strategis KPU Kabupaten Karanganyar diwujudkan dengan penetapan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

1. Pernyataan Visi dan Misi

Pada prinsipnya Rencana Strategis KPU Kabupaten Karanganyar disusun untuk memberi arah gerak langkah setiap kegiatan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

a. Visi

Visi merupakan pandangan jauh kedepan atau suatu hal yang akan diraih oleh suatu lembaga. Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020-2024, yakni “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan pemilihan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien

Visi Komisi Pemilihan Umum menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar merujuk pada Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yakni :

***“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri,
Profesional dan Berintegritas”***

b. Misi

Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 8, “Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya”.

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut di atas serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum, maka misi KPU Kabupaten Karanganyar sejalan dengan misi KPU mengalami perubahan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu;
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak;
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak;
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

- a. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
- b. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar, maka tujuan yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar bercermin pada Tujuan Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas;
- b. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
- c. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Untuk merealisasikan target nasional dan mendukung keberhasilan program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” serta mencapai tujuan di atas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar yang akan dicapai pada periode 2020-2024 seiring dengan sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai berikut :

- a. Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu:
 - 1) Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
 - 2) Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
 - 3) Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.
- b. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:
 - 1) Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
 - 2) Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
- c. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”

C. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Perencanaan program dan rencana kerja yang tercantum dalam Rencana Strategis KPU Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024 dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kinerja Tahunan KPU Kabupaten Karanganyar. Adapun Rencana Kinerja Tahunan KPU Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 2.1

Rencana Kinerja Tahunan KPU Kabupaten Karanganyar Tahun 2021

No	KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Sistem Informasi Mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas di KPU Kabupaten Karanganyar	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada Publik	100 %
2.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kabupaten Karanganyar yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi	B
3.	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan Sumber Daya Manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	100%
4.	Pembentukan dan Evaluasi Badan Penyelenggara Adhoc	Persentase Badan Adhoc yang dibentuk dan dievaluasi	100%
5.	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih tepat waktu	100%
6.	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan E-government di KPU Kabupaten Karanganyar	Persentase sarana dan prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%
7.	Terwujudnya dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran Tugas KPU Kabupaten Karanganyar	Persentase sarana transportasi, gedung dan gudang KPU Kabupaten Karanganyar yang berfungsi dengan baik	100%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja Satker KPU Kabupaten Karanganyar yang berfungsi dengan baik	100 %
8.	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Karanganyar yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	4 kali
9.	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100 %

No	KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	yang tertib, efektif dan efisien	Persentase target kinerja KPU Kabupaten Karanganyar yang tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja	100 %
10.	Meningkatnya penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	Persentase penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan oleh KPU Kabupaten Karanganyar	100 %
11.	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu oleh KPU Kabupaten Karanganyar	1 Laporan
12.	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	1 Laporan
13.	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya Sesuai dengan Data SAK	1 Laporan
14.	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase arsip yang dikelola sesuai jadwal retensi arsip oleh KPU Kabupaten Karanganyar	100%
15.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Karanganyar	Persentase ketaatan KPU Kabupaten/Kota dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu	100%
16.	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola, didokumentasikan dan disajikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%
17.	Terlaksananya pendaftaran dan verifikasi Partai Politik Pemilu Tahun 2024	Persentase terlaksananya pendaftaran dan verifikasi Partai Politik Pemilu Tahun 2024 sesuai ketentuan yang berlaku	100%
18.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu Sesuai Tahapan dan Jadwal	Persentase pemutakhiran data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100%
19.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%

No	KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Persentase informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di laman atau media sosial KPU Kabupaten Karanganyar	100%
20.	Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum	Persentase terlaksananya kegiatan Pendidikan Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi untuk masyarakat umum	100%

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka melaksanakan rencana strategis KPU Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan, KPU Kabupaten Karanganyar telah menetapkan Perjanjian Kinerja sebagai pernyataan tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2022. Pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Karanganyar yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 merupakan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah

Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 2.2

Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Karanganyar Tahun 2022

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target
1.	Terwujudnya Sistem Informasi Mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas di KPU Kabupaten Karanganyar	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada Publik	100 %
2.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kabupaten Karanganyar yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi	B
3.	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian	100%

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target
	Sumber Daya Manusia	secara tepat waktu dan akurat	
4.	Pembentukan dan Evaluasi Badan Penyelenggara Adhoc	Persentase Badan Adhoc yang dibentuk dan dievaluasi	100%
5.	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih tepat waktu	100%
6.	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan E-government di KPU Kabupaten Karanganyar	Persentase sarana dan prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%
7.	Terwujudnya dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran Tugas KPU Kabupaten Karanganyar	Persentase sarana transportasi, gedung dan gudang KPU Kabupaten Karanganyar yang berfungsi dengan baik	100%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja Satker KPU Kabupaten Karanganyar yang berfungsi dengan baik	100 %
8.	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Karanganyar yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	4 kali
9.	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100 %
		Persentase target kinerja KPU Kabupaten Karanganyar yang tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja	100 %
10.	Meningkatnya penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	Persentase penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan oleh KPU Kabupaten Karanganyar	100 %
11.	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu oleh KPU Kabupaten Karanganyar	1 Laporan
12.	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	1 Laporan

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target
13.	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya Sesuai dengan Data SAK	1 Laporan
14.	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase arsip yang dikelola sesuai jadwal retensi arsip oleh KPU Kabupaten Karanganyar	100%
15.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Karanganyar	Persentase ketaatan KPU Kabupaten/Kota dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu	100%
16.	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola, didokumentasikan dan disajikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%
17.	Terlaksananya pendaftaran dan verifikasi Partai Politik Pemilu Tahun 2024	Persentase terlaksananya pendaftaran dan verifikasi Partai Politik Pemilu Tahun 2024 sesuai ketentuan yang berlaku	100%
18.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu Sesuai Tahapan dan Jadwal	Persentase pemutakhiran data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100%
19.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di laman atau media sosial KPU Kabupaten Karanganyar	100%
20.	Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum	Persentase terlaksananya kegiatan Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk masyarakat umum yang	100%

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2022 Revisi ke 14 Nomor SP DIPA-076.01.2.657520/2022 tanggal 20 Desember 2022, KPU Kabupaten Karanganyar menerima alokasi anggaran sebesar Rp 4.912.996.000 (Empat milyar sembilan ratus dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah). KPU Kabupaten Karanganyar selama Tahun 2022

melaksanakan 2 (dua) program, 8 (delapan) kegiatan dan 24 (dua puluh empat) rincian *Output*, dengan persentase alokasi anggaran masing-masing program dan kegiatan disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.3
Alokasi Anggaran KPU Kabupaten Karanganyar Masing-Masing Program dan Kegiatan TA 2022

No	Kode	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	%
1.	076.01.CQ	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	1.726.742.000	35,15%
a.	6709	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	837.883.000	17,05%
b.	6710	Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Peserta Pemilu	564.373.000	11,49%
c.	6887	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	57.808.000	1,18%
d.	6889	Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	202.380.000	4,12%
e.	6890	Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	64.298.000	1,31%
2.	076.01.WA	Program Dukungan Manajemen	3.186.254.000	64,85%
a.	3355	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	2.717.538.000	55,31%
b.	3360	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	461.496.000	9,39%
c.	6634	Data dan Informasi	7.220.000	0,15%
TOTAL PAGU			4.912.996.000	100%



LAPORAN KINERJA **KOMISI PEMILIHAN UMUM** **KABUPATEN KARANGANYAR** **TAHUN 2022**



BAB III **AKUNTABILITAS** **KINERJA**

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA KPU KABUPATEN KARANGANYAR

Salah satu karakteristik Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) adalah adanya sistem akuntabilitas publik yang memadai. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap Instansi Pemerintah diwajibkan menyusun dan menyampaikan Laporan AKIP setiap tahunnya kepada Presiden. Sistem akuntabilitas publik yang baik, selain akan meningkatkan kepercayaan masyarakat, juga akan mendorong suatu lembaga/instansi untuk tetap beroperasi secara efisien dan efektif serta adanya proses perbaikan kinerja melalui evaluasi dari pencapaian indikator kinerja.



KPU Kabupaten Karanganyar berusaha menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Kabupaten Karanganyar atas pelaksanaan tugas dan fungsinya serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan serta evaluasi kinerja dalam satu tahun terakhir guna meningkatkan kinerja tahun berikutnya. Indikator kinerja adalah merupakan gambaran sejauh mana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Proses pengukuran kinerja didahului dengan penetapan atau penentuan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran.

Penentuan indikator kinerja yang tepat akan menjadi alat ukur yang baik dalam mengukur sejauh mana keberhasilan suatu kegiatan. KPU Kabupaten Karanganyar melalui Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022 menentukan indikator-indikator kinerja sebagaimana terangkum di bawah ini dan hasil pencapaian kinerja dapat dilihat dalam lampiran.

1. Indikator Kinerja

Indikator kinerja yang digunakan dalam Pengukuran Kinerja meliputi :

a. Indikator *Input*

Indikator *Input* menunjukkan sumber daya dan dana yang digunakan dalam melakukan kegiatan, seperti dana, sumber daya manusia, jenis, peserta, sarana, materi, pembicara dan lain-lain.

b. Indikator *Output*

Indikator *Output* menunjukkan keluaran yang langsung dihasilkan dari kegiatan seperti : peserta, terselenggaranya kegiatan, jumlah kegiatan, frekuensi kegiatan, dan lain-lain.

c. Indikator *Outcome*

Indikator *Outcome* menunjukkan hasil yang diperoleh dari berfungsinya keluaran / *Output*. Indikator *Outcome* mencerminkan sasaran atau tujuan yang dikehendaki dari setiap kegiatan yang dilakukan.

d. Indikator *Benefit*

Indikator benefit adalah kegunaan atau manfaat suatu keluaran/*output* yang dirasakan langsung oleh masyarakat, misal berupa fasilitas yang langsung mampu diakses publik.

Indikator Kinerja Utama (IKU) dari seluruh kebijakan/program/kegiatan yang menjadi indikasi ukuran keberhasilan atau kegagalan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2022 dapat diidentifikasi sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi;

- 1) Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu
 - a) Perencanaan dan Penganggaran Pemilu
 - b) Pembentukan/Seleksi Badan Penyelenggara Adhoc Pemilu
 - c) Fasilitasi Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
 - d) Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan
 - e) Pemutakhiran Data Pemilih
 - f) Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan
 - g) Penyusunan Peraturan Pemilu
 - h) Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu
- 2) Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

- 3) Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024
 - a) Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Pelaksanaan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu
 - b) Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu
 - 4) Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih
 - a) Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih
 - b) Pemutakhiran Data Pemilih
 - c) Penetapan Data Pemilih
 - 5) Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan
 - a) Fasilitasi Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan
 - b) Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan
 - c) Evaluasi Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan
 - 6) Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
 - a) Fasilitasi Kesiapan Kegiatan Pencalonan
 - b) Pelaksanaan Proses Pencalonan
 - c) Pelaksanaan Evaluasi Pencalonan
- b. Progam Dukungan Manajemen
- 1) Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara
 - a) Layanan perkantoran berupa pembayaran gaji dan tunjangan pegawai;
 - b) Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA);
 - c) Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan tingkat UAKPA;
 - d) Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN);
 - 2) Penyelenggaraan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana
 - a) Layanan operasional dan pemeliharaan kantor;
 - b) Pemenuhan sarana dan prasarana internal.
 - 3) Layanan Data dan Informasi

2. Skala Penilaian Capaian

Dalam menilai atau mengukur capaian kinerja setiap indikator sasaran, KPU Kabupaten Karanganyar menetapkan skala penilaian capaian sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Penilaian Capaian Kinerja

No.	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1.	Kurang dari 55 %	Gagal
2.	55 % sampai 75 %	Cukup Baik

3.	76 % sampai 100 %	Baik
4.	Lebih dari 100 %	Sangat Baik

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, digunakan rumus :

$$\% \text{ Pencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Tabel 3.2

Capaian Kinerja KPU Kabupaten Karanganyar Tahun 2021

KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Kinerja		
		Target	Realiasi	%Capaian
Terwujudnya Sistem Informasi Mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas di KPU Kabupaten Karanganyar	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada Publik	100 %	100%	100%
Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kabupaten Karanganyar yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi	B	B	100%
Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan Sumber Daya Manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	100%	100%	100%
Pembentukan dan Evaluasi Badan Penyelenggara Adhoc	Persentase Badan Adhoc yang dibentuk dan dievaluasi	100%	100%	100%
Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih tepat waktu	100%	100%	100%
Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan E-government di KPU Kabupaten Karanganyar	Persentase sarana dan prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%
Terwujudnya dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran Tugas KPU Kabupaten Karanganyar	Persentase sarana transportasi, gedung dan gudang KPU Kabupaten Karanganyar yang berfungsi dengan baik	100 %	100%	100%
	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja Satker KPU	100 %	100 %	100%

KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Kinerja		
		Target	Realiasi	%Capaian
	Kabupaten Karanganyar yang berfungsi dengan baik			
Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Karanganyar yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	4 kali	4 kali	100%
Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100 %	4 kali	100%
	Persentase target kinerja KPU Kabupaten Karanganyar yang tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja	100 %	100 %	100%
Meningkatnya penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	Persentase penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan oleh KPU Kabupaten Karanganyar	100 %	100 %	100%
Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu oleh KPU Kabupaten Karanganyar	1 Laporan	1 Laporan	100%
Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	1 Laporan	1 Laporan	100%
Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya Sesuai dengan Data SAK	1 Laporan	1 Laporan	100%
Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase arsip yang dikelola sesuai jadwal retensi arsip oleh KPU Kabupaten Karanganyar	100%	100%	100%
Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Karanganyar	Persentase ketaatan KPU Kabupaten/Kota dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola, didokumentasikan dan disajikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%
Terlaksananya pendaftaran dan verifikasi Partai Politik Pemilu Tahun 2024	Persentase terlaksananya pendaftaran dan verifikasi Partai Politik Pemilu Tahun 2024 sesuai ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%

KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Kinerja		
		Target	Realiasi	%Capaian
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu Sesuai Tahapan dan Jadwal	Persentase pemutakhiran data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100%	100%	100%
Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%
	Persentase informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di laman atau media sosial KPU Kabupaten Karanganyar	100%	100%	100%
Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum	Persentase terlaksananya kegiatan Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk masyarakat umum yang	100%	100%	100%

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Tingkat capaian kinerja atas kegiatan dan sasaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar dapat dikategorikan BAIK. Dalam Tahun 2022, sesuai dengan Rencana Strategis KPU Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024 ditetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang merupakan sasaran utama kegiatan dari KPU Kabupaten Karanganyar.

Capaian kinerja kegiatan dan sasaran Tahun 2022 sebagaimana disebutkan di atas didasarkan pada perencanaan awal tahun sebagai pedoman dalam mencapai Rencana Kegiatan Tahunan. Demi mewujudkan KPU yang mandiri, professional dan berintegritas, KPU Kabupaten Karanganyar telah menetapkan sasaran kegiatan dan indikator kinerja. Adapun capaian kinerja KPU Kabupaten Karanganyar selama tahun 2022 diukur melalui capaian indikator kinerja yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada Publik

Sasaran kegiatan dari indikator kinerja tersebut adalah Terwujudnya Sistem Informasi Mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas di KPU Kabupaten Karanganyar. Pada Tahun 2022, KPU Kabupaten Karanganyar melaksanakan tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024. Guna memfasilitasi pelaksanaan tahapan tersebut serta pengelolaan data dan dokumen partai politik, KPU RI mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) yang ditetapkan melalui Keputusan KPU Nomor 195 Tahun 2022 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik sebagai Aplikasi Khusus Komisi

Pemilihan Umum. KPU Kabupaten Karanganyar menunjuk admin dan operator untuk melaksanakan pengelolaan data kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024.

Dalam rangka penggunaan aplikasi SIPOL tersebut, KPU Kabupaten Karanganyar mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Peraturan KPU tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu serta Pengenalan Fungsi SIPOL KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota yang diselenggarakan di Jakarta tanggal 23 – 25 Juli 2022 dengan peserta Anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Anggota KPU Divisi Rendatin, Kasubbag TPPP dan Hubmas serta operator SIPOL.



Aplikasi SIPOL tersebut digunakan untuk melakukan pendaftaran Partai Politik dan penyampaian dokumen pendaftaran oleh Partai Politik, melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan Partai Politik, melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik, Penentuan sampel anggota Partai Politik dalam verifikasi faktual keanggotaan, input hasil verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik serta rekapitulasi dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024.



- 39

Tabel 3.3
Persentase Informasi mengenai Partai Politik yang Mutakhir dan Dipublikasikan pada Publik

No	Indikator kinerja	2022		Capaian realisasi
		Target	Realisasi	
1	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada Publik	100 %	100 %	100 %

2. Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi

Capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Karanganyar pada tahun 2022 merupakan penguatan dari pelaksanaan reformasi birokrasi sebelumnya. Pelaksanaan program reformasi birokrasi pada tahun 2022 telah mengalami peningkatan perubahan kearah yang lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya, mencakup 8 (delapan) area perubahan, yakni manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan/deregulasi kebijakan, penataan dan penguatan organisasi/kelembagaan, penataan ketatalaksanaan, penataan sistem manajemen SDM aparatur, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal tersebut terlihat dari adanya peningkatan nilai Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Reformasi Birokrasi tahun 2022 dibandingkan nilai LKE tahun 2021 serta peningkatan kualitas pelayanan publik khususnya pelayanan publik di bidang kepemiluan.

Nilai LKE Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 sebesar 95,56, meningkat cukup signifikan jika dibanding nilai LKE Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 yaitu 85,28. Proses Reformasi Birokrasi tahun 2022 yang telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Karanganyar, antara lain:

- Melaksanakan Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Karanganyar sesuai dengan mekanisme penunjukan Tim Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten/Kota melalui penetapan Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 29 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 11/ORT.07/3313/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Tahun 2022.

- b. Pembangunan komitmen bersama seluruh jajaran pegawai dan pejabat di lingkungan KPU Kabupaten Karanganyar untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi secara konsisten dan melakukan perubahan mental melalui penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2022.



- c. Sosialisasi dan internalisasi Reformasi Birokrasi secara terus menerus melalui koordinasi internal secara intensif dalam pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi maupun melalui berbagai media kepada pihak eksternal;



- d. Menerapkan *tagline* pelayanan yaitu KPU Karanganyar “BERES”. BERES merupakan penggabungan akronim dari dua kata yaitu BECIK dan RESIK. Becik dalam pelayanan dan Resik dalam budaya kerja. BECIK mengandung filosofi komitmen pelayanan KPU Karanganyar yang Bersih, Cepat, dan Terbaik. Sedangkan RESIK mengandung filosofi budaya kerja KPU Karanganyar yang Ramah, Efisien dan Efektif, Semangat, Inovatif, dan Kredibel.



- e. Pimpinan terlibat secara aktif dan memiliki komitmen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan adanya target capaian reformasi yang jelas di dokumen perencanaan serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Karanganyar. Sebagai bentuk evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Karanganyar Tahun 2022, dilaksanakan rapat koordinasi Evaluasi Rencana Aksi dan Pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Reformasi Birokrasi yang merupakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)



- f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap rencana kerja masing-masing area perubahan serta melakukan koordinasi penyusunan Lembar Kerja Evaluasi Reformasi Birokrasi setiap Semester.
- g. Agen perubahan KPU Kabupaten Karanganyar telah membuat perubahan yang konkret melalui pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Karanganyar Tahun 2022. Adapun jumlah perubahan yang telah diintegrasikan dalam sistem manajemen sebanyak 5 (lima) perubahan sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan dan penyimpanan arsip sesuai tata kelola kearsipan;

- 2) Pembentukan Bakohumas;
- 3) Pengelolaan JDIH Website dan Medsos JDIH;
- 4) Penyelenggaraan MILKOI (Milihan Ketua OSIS) SMA/SMK/MA Serentak sebagai miniatur Pemilu.

Tabel 3.4

Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi

No	Indikator kinerja	2022		Capaian realisasi
		Target	Realisasi	
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi	B	B	100 %

3. Persentase Pegawai yang mendapatkan Layanan Kepegawaian secara Tepat Waktu dan Akurat



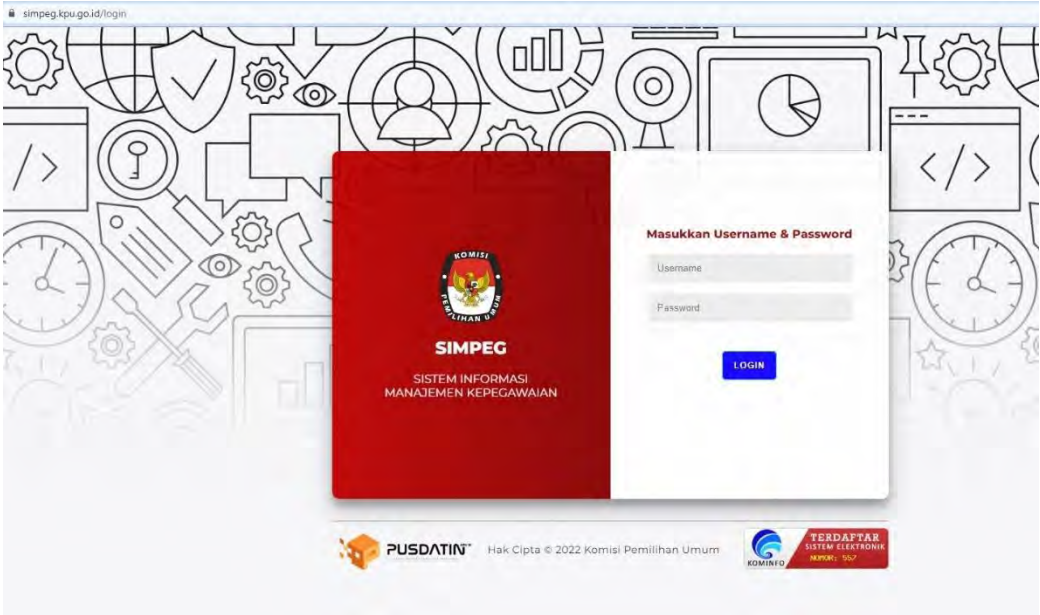
Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu aset penting bagi kemajuan dan perkembangan organisasi. Untuk mendukung tercapainya salah satu sasaran strategis KPU Kabupaten Karanganyar yakni Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang Berkualitas, diperlukan pembinaan SDM, penataan organisasi dan pengelolaan administrasi kepegawaian. SDM yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Karanganyar menjadi faktor utama dalam meningkatkan kompetensi pegawai. Guna mendukung terlaksananya layanan kepegawaian, KPU Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2022 telah melaksanakan kegiatan antara lain :

- a. Rutin melaksanakan Apel pagi setiap hari Senin di halaman kantor KPU Kabupaten Karanganyar;

- b. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian secara tertib melalui penyampaian laporan Sistem Informasi Administrasi Kepegawaian (SIADKA) setiap bulan ke KPU Provinsi Jawa Tengah;
- c. Berpartisipasi aktif dalam pendataan ASN melalui aplikasi “MySAPK” (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian) Badan Kepegawaian Negara;
- d. Mengusulkan berkas kenaikan pangkat dan penyesuaian ijazah ASN dan melaksanakan pendataan dan pengumpulan berkas PPNP ke KPU Provinsi Jawa Tengah;
- e. Melaksanakan Pembinaan ASN secara berkala;
- f. Melakukan identifikasi pengembangan kompetensi/kebutuhan kompetensi seluruh pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Karanganyar melalui usulan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) pegawai sesuai dengan kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai, diklat yang diikuti oleh pegawai KPU Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2022 yaitu :
 - 1) Pelatihan dasar tata kelola Pemilu yang diikuti oleh seluruh ASN KPU Kabupaten Karanganyar;
 - 2) Diklat bendahara melalui program e-learning terpadu bagi calon bendahara pengeluaran KPU Kabupaten Karanganyar;
 - 3) Mengusulkan pegawai untuk mengikuti program pelatihan Pusbindiklatren Bappenas Tahun 2022, namun hingga saat ini masih menunggu pemanggilan peserta diklat oleh Bappenas;
 - 4) Mengikuti diklat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan SPM (PPSPM), dan pengelolaan keuangan;
 - 5) Mengikuti e-learning Manajemen Keuangan Negara melalui website Kemenkeu Learning Center (KLC);
 - 6) Mengirimkan 2 (dua) orang PPNP Pengamanan untuk mengikuti Diklat Pengamanan Dalam bagi Jagat Saksana di Lido, Bogor tanggal 26 November s.d 6 November 2022.



- g. Menerapkan Penetapan/Pengukuran Kinerja Individu melalui pengisian Laporan Kinerja Harian dan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) secara berjenjang untuk mendukung sasaran strategis dan pencapaian kinerja organisasi melalui aplikasi E-Kinerja Badan Kepegawaian Negara;
- h. Pemutakhiran Data Kepegawaian di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar dikelola dalam Sistem Informasi Kepegawain (SIMPEG) KPU serta menyampaikan Daftar Nominatif Pegawai setiap bulan melalui KPU Provinsi Jawa Tengah.



Atas tertibnya pengelolaan layanan kepegawaian dan pelaporan kepegawaian yang tepat waktu dan akurat, pada tahun 2022 KPU Kabupaten Karanganyar menerima penghargaan Karya Adinata yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah sebagai Satuan Kerja terbaik pertama kategori kepatuhan pelaporan kepegawaian KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah.

TABEL 3.5

Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian secara Tepat Waktu dan Akurat

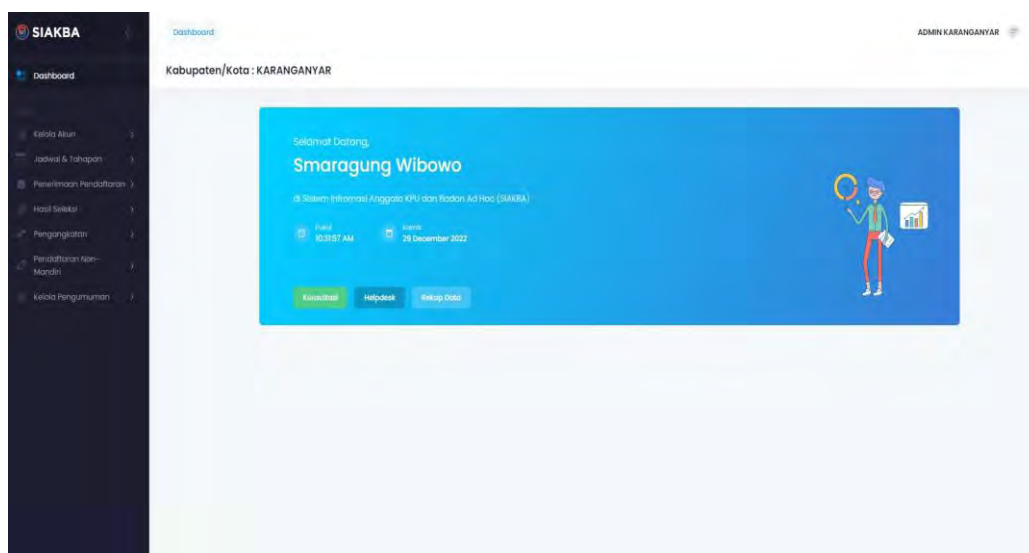
No	Indikator kinerja	2022		Capaian realisasi
		Target	Realisasi	
1	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	100 %	100 %	100 %

4. Persentase Badan Adhoc yang Dibentuk dan Dievaluasi

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2022, Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu meliputi anggota dan sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan, anggota dan sekretariat Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Luar Negeri, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri, Panitia Pemutakhiran Data Pemilih/Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Panitia Pemutakhiran Data Pemilih Luar Negeri dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), merupakan penyelenggara pemilu yang memegang peranan penting dalam menyukseskan Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berkualitas. Untuk mewujudkan penyelenggara Pemilihan Umum yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas tersebut, maka perlu dilaksanakan pembentukan Badan *Adhoc* secara transparan, obyektif dan akuntabel.

KPU selaku penyelenggara Pemilu berupaya untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu dari waktu ke waktu, salah satunya dengan pemanfaatan sarana Teknologi Informasi. Berbeda dengan Penyelenggaraan Pemilu-Pemilu sebelumnya, dimana pendaftaran Badan *Adhoc* dilakukan secara manual dan tatap muka. Kali ini pendaftaran Badan *Adhoc* di jajaran KPU pada Pemilu 2024 akan dilakukan secara *online*. Dalam rangka mendukung kelancaran rekrutmen dan seleksi Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu Tahun 2024, KPU RI telah merilis Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan *Adhoc* (SIKABA) yakni sebuah aplikasi berbasis website yang membantu proses dalam administrasi dan sebagai alat dukung dalam proses pembentukan Anggota KPU dan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu.



a. Sosialisasi pembentukan Badan Adhoc

Kegiatan Sosialisasi Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu 2024 Kabupaten Karanganyar dilaksanakan pada hari Senin, 21 November 2022 di Hall Hotel Taman Sari Karanganyar Jalan Raya Solo – Tawangmangu No. 98 Cangakan Barat, Karanganyar di mulai jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, dengan Narasumber utama Bupati Karanganyar. Peserta Kegiatan Sosialisasi Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu 2024 Kabupaten Karanganyar berjumlah 250 (Dua ratus lima puluh) orang terdiri dari Jajaran Forkompimda, Dinas/Instansi terkait, Camat dan Kepala Desa/Lurah se Kabupaten Karanganyar, Wartawan Desk Kabupaten Karanganyar, Pengurus PGRI Kabupaten Karanganyar dan SMA/SMK Kabupaten Karanganyar.



b. Pendaftaran PPK

Pada tahap pendaftaran PPK, KPU Karanganyar menerbitkan pengumuman Nomor : 1280/PP.04.1-Pu/3313/2022 tanggal 20 November 2022 tentang Seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Pengumuman Nomor 1835/PP.04.1-Pu/3313/2022 tanggal 21 November 2022 tentang Ralat Pengumuman Seleksi Calon Anggota Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024. Pada tahap pendaftaran ini KPU Karanganyar menerima pendaftaran dan meneliti berkas melalui aplikasi Siakba dan menerima berkas fisik. Pada tahap ini akun yang terdaftar di aplikasi Siakba sebanyak 1.548 akun, namun yang dinyatakan berkas lengkap sebanyak 863 akun.

c. Penelitian Administrasi

Tahap selanjutnya setelah penerimaan dan pengecekan berkas, KPU Karanganyar melakukan penelitian administrasi terhadap 863 berkas yang dinyatakan lengkap. Berdasarkan hasil penelitian administrasi sebanyak 752 berkas dinyatakan lolos seleksi administrasi dan sebanyak 111 dinyatakan tidak memenuhi syarat.

d. Seleksi Tertulis

Berdasarkan ketentuan Pasal 37 huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022, Dalam memilih calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), KPU Kabupaten/Kota melakukan tahapan kegiatan seleksi tertulis. Seleksi tertulis PPK dilakukan melalui seleksi tertulis metode *Computer Assisted Test* (CAT). Kegiatan seleksi tertulis ini dilaksanakan melalui kerjasama dengan sekolah di Kabupaten Karanganyar yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar dengan SMK Negeri 1 Karanganyar Nomor 2001/PR.07-PKS/3313/2022 dan Nomor 421.4/1013.04 tanggal 5 Desember 2022. Seleksi tertulis dengan metode CAT ini dilaksanakan selama 2 (dua) hari berturut-turut yang dihadiri oleh peserta calon Panitia Pemilihan Kecamatan yang telah dinyatakan lolos tahap seleksi administrasi pada tanggal 6 s.d. 7 Desember 2022 di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Karanganyar. Dari 752 orang peserta yang dinyatakan lolos seleksi administrasi, peserta yang hadir pada saat seleksi tertulis sebanyak 659 orang sementara peserta yang tidak hadir sebanyak 93 (Sembilan puluh tiga) orang. Calon Anggota PPK yang dinyatakan memenuhi syarat/lulus seleksi tertulis berhak mengikuti seleksi wawancara.



e. Seleksi Wawancara

Berdasarkan ketentuan Pasal 37 huruf h Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022, dalam memilih calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) KPU Kabupaten/Kota melakukan tahapan kegiatan seleksi wawancara.

Pada tahapan wawancara calon anggota PPK, KPU Kabupaten/Kota melaksanakan :

- 1) menyiapkan materi seleksi wawancara yang mencakup :
- 2) melakukan wawancara calon anggota PPK paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tahapan pengumuman hasil seleksi tertulis berakhir;
- 3) melakukan penilaian dengan mengisi formulir penilaian wawancara; dan

- 4) menetapkan peringkat calon anggota PPK berdasarkan hasil wawancara paling lambat 1 (satu) hari setelah pelaksanaan wawancara.

Seleksi wawancara dilaksanakan selama 3 (tiga) hari berturut-turut yang dihadiri oleh peserta calon Panitia Pemilihan Kecamatan yang telah dinyatakan lolos tahap seleksi tertulis, peringkat 15 (lima belas) besar berdasarkan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 2030/PP.04.1-Pu/3313/2022 tanggal 8 Desember 2022 Perihal Penetapan Hasil Penelitian Tertulis Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan peserta sebanyak 261 (dua ratus enam puluh satu) orang.



Seleksi wawancara bagi Calon Anggota PPK Pemilu 2024 di Kabupaten Karanganyar dilaksanakan pada tanggal 11 s.d. 13 Desember 2022 di tiga lokasi yaitu Ruang OR Gedung DPRD Karanganyar, Hotel Nava Tawangmangu dan Disarpus Karanganyar. Wawancara dilakukan oleh Komisioner KPU Karanganyar dengan 2 (dua) panel. Dari 261 orang peserta yang dinyatakan lolos seleksi tertulis, peserta yang hadir pada saat seleksi wawancara sebanyak 257 orang, sementara peserta yang tidak hadir sebanyak 4 (empat) orang.

f. Penetapan Hasil Seleksi

Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 180/PP.04.1-BA/3313/2022 tanggal 13 Desember 2022 tentang Rapat Pleno Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 KPU Karanganyar mengumumkan hasil seleksi calon Anggota PPK, dengan ketentuan :

- 1) KPU Kabupaten Karanganyar menetapkan calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan peringkat 1-5 ditetapkan sebagai calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan yang terpilih dan calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan peringkat 6-10 sebagai calon Pengganti Antar Waktu anggota Panitia Pemilihan Kecamatan;

- 2) KPU Kabupaten Karanganyar mengundang calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan terpilih untuk hadir dalam pelantikan, pengambilan sumpah/janji, dan penandatanganan pakta integritas anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 4 Januari 2023 di Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Karanganyar.

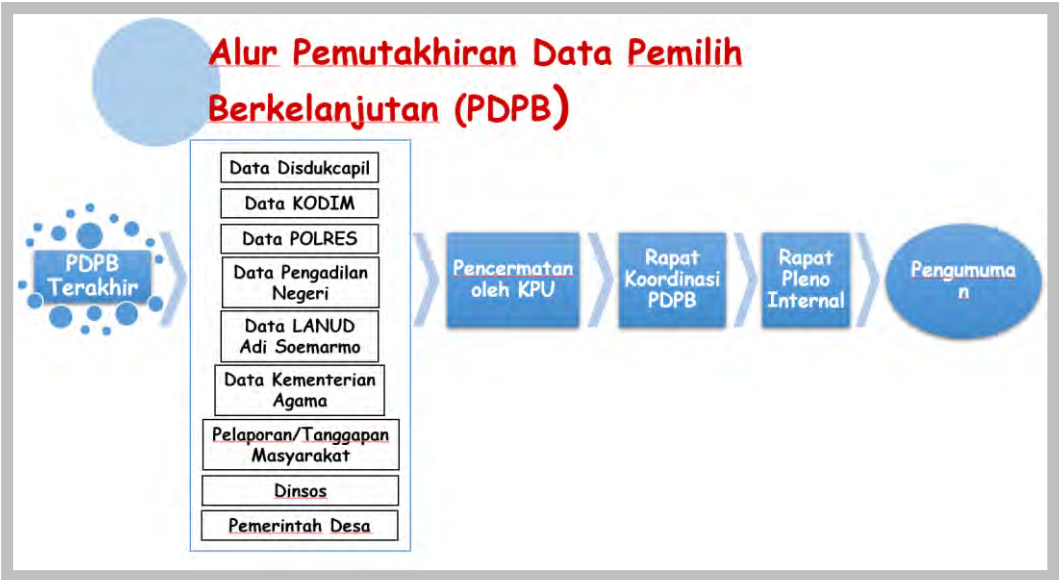
Tabel 3.6

Persentase Badan Adhoc yang Dibentuk dan Dievaluasi

No	Indikator kinerja	2022		Capaian realisasi
		Target	Realisasi	
1	Persentase Badan Adhoc yang dibentuk dan dievaluasi	100 %	100 %	100 %

5. Persentase Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu

Sesuai dengan pasal 20 huruf (l) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan Pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. KPU Kabupaten Karanganyar telah melaksanakan kegiatan PDPB sejak bulan April tahun 2020 dan pada pelaksanaan PDPB Tahun 2022 ini KPU Kabupaten Karanganyar menggunakan Hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Bulan Desember Tahun 2021.



Adapun proses pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2022 di KPU Kabupaten Karanganyar sebagai berikut :

- a. Berkoordinasi dengan Dinas/Instansi terkait

Dalam hal berkoordinasi terkait PDPB, KPU Kabupaten Karanganyar melakukan koordinasi dengan Stakeholder dan Dinas/Instansi terkait yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), TNI, Polri, Bawaslu Kabupaten/Kota, Perwakilan

Partai Politik dan Pengadilan Setingkat melalui Rapat Koordinasi setiap 3 (tiga) bulan/triwulan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rapat Koordinasi.

KPU Kabupaten Karanganyar melakukan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait untuk memperoleh dukungan data Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana diatur dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, antara lain berkoordinasi dengan :

- 1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, untuk mendapatkan data hasil pelayanan administrasi kependudukan;
- 2) TNI melalui Kodim 0727 Karanganyar dan Pangkalan TNI AU Adi Soemarmo, untuk mendapatkan data anggota yang telah purna maupun perubahan status menjadi TNI;
- 3) Polri melalui Polres Karanganyar, untuk mendapatkan data anggota yang telah purna maupun perubahan status menjadi POLRI;
- 4) Pengadilan Negeri Karanganyar, untuk mendapatkan data warga Kabupaten Karanganyar yang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maupun data warga Kabupaten Karanganyar yang memperoleh kembali hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 5) Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar, untuk mendapatkan data penduduk Kabupaten Karanganyar yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun namun sudah menikah;
- 6) Pemerintah Desa sebagai tindaklanjut dari kegiatan Peningkatan Indeks Demokrasi Masyarakat yang diadakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Karanganyar bersama dengan KPU Karanganyar pada November 2021 untuk mendapatkan data pemilih pemula dan pemilih pindah masuk;



7) Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar, untuk mendapatkan data penduduk Kabupaten Karanganyar penyandang disabilitas yang berusia mulai dari 17 tahun.

b. Menerima Laporan dan Tanggapan Masyarakat

Selain data yang berasal dari hasil koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait, KPU Kabupaten Karanganyar juga membuka layanan pelaporan dan tanggapan masyarakat baik secara *offline* dengan mengisi formulir masukan dan tanggapan masyarakat maupun secara *online* melalui Aplikasi Mobile LindungiHakmu yang dikembangkan oleh KPU Republik Indonesia.

c. Tindak Lanjut Hasil Pemadanan DPB Semester II Tahun 2021 dengan Data Kependudukan Kemendagri

Pada PDPB Triwulan III Tahun 2022, selain memperoleh data dari Dinas/Instansi terkait, KPU Kabupaten Karanganyar juga menerima hasil pemadanan DPB Semester II Tahun 2021 dengan Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri sebagaimana Surat Edaran Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tindak Lanjut Hasil Pemadanan Data Pemilih Berkelanjutan Semester II Tahun 2021 Komisi Pemilihan Umum dengan Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Data Hasil Pemadanan Data Pemilih Berkelanjutan Semester II Tahun 2021 Komisi Pemilihan Umum dengan Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri yang diterima oleh KPU Kabupaten Karanganyar sebagai berikut :

Tabel 3.6

Data Hasil Pemadanan DPB Semester II Tahun 2021 dengan Data Kemendagri

No	Kategori	Jumlah
1	Data Meninggal	12.229
2	Data Ganda	24.974
	a. Rank 1 di Kab. Karanganyar	8.520
	b. Rank 2 s.d 7 di Kab. Karanganyar	16.454
3	Data Tidak Padan	11.505
4	Data Padan	
	a. Data Padan Sama Wilayah, terbagi menjadi dua :	
	- Data PDPB dan SIAK di Kab. Karanganyar	628.748
	- Data PDPB di Kab. Karanganyar, SIAK di Kab/Kota lain	8.565
	b. Data Padan Beda Wilayah (Data PDPB di Kab/Kota lain, SIAK di Kab. Karanganyar)	11.220
5	Data Anggota KK padan yang tidak ada dalam DPT	86.136

Tindak lanjut data tersebut dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan sejak bulan Juli s.d September 2022 (Triwulan III Tahun 2022) melalui koordinasi dengan Pemerintah Desa untuk melakukan konfirmasi penyandingan data penduduk Meninggal, Ganda dan Tidak Padan dengan data penduduk di wilayah Desa setempat. Sedangkan untuk data padan dilakukan melalui web portal Cek Data Kependudukan.



Pengolahan data hasil pemadanan dengan data kependudukan Kemendagri tersebut dengan mengacu pada Surat Edaran Nomor 17 Tahun 2022 dan Surat Ketua KPU RI Nomor 2331/PL.01-SD/14/2022 tanggal 20 September 2022 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemadanan dan Persiapan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu 2024 dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Melakukan penyaringan atau mencoret data pemilih berkelanjutan dengan kategori:
 - a) Data Ganda yang beralamat berbeda dengan alamat pada dokumen kependudukan (KTP-EI)
 - b) Data tidak padan yang tidak ditemukan data pemilihnya;
 - c) Data meninggal yang sudah keluar akta kematian oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - d) Data meninggal yang bukan dari data padan, berdasarkan surat keterangan dari lurah/kepala desa/RW/RT.
- 2) Mencatat sebagai pemilih baru berkelanjutan dengan kategori :
 - a) Data padan beda wilayah adalah pemilih pindah masuk yang sebelumnya terdaftar di Kabupaten/Kota lain untuk dicatat sebagai pemilih baru;
 - b) Data anggota Kartu Keluarga (KK) padan yang tidak ada dalam DPT ialah data yang memiliki NKK yang sama, tetapi salah satu anggota pada NKK tersebut tidak terdapat dalam Daftar Pemilih.

Progres Tindak Lanjut Hasil Pemadanan DPB Semester II Tahun 2021 dengan Data Kependudukan sampai dengan bulan September 2022 sesuai dengan Format Lampiran Surat Ketua KPU RI Nomor 613/PL.01-SD/14/2022 tanggal 5 Agustus 2022 perihal DPB September 2022 untuk Sinkronisasi Data sebagai berikut :

Tabel 3.7

Progres Data Tidak Padan Hasil Pemadanan DPB Semester II Tahun 2021 dengan
Data Kependudukan Kemendagri

DATA GANDA			DATA MENINGGAL			DATA TIDAK PADAN			JUMLAH			
Data Masuk	Selesai Dikerja kan	Progres (%)	Data Masuk	Selesai Dikerja kan	Progres (%)	Data Masuk	Selesai Dikerja kan	Progres (%)	Data Masuk	Selesai Ditindak lanjuti	Belum Selesai	Progres (%)
24.974	24.974	100%	12.229	12.229	100%	11.505	11.505	100%	48.708	48.708	0	100%

Sedangkan progres data Padan dan Data Anggota KK Padan sampai dengan bulan September 2022 sebagai berikut :

Tabel 3.8

Progres Data Padan Hasil Pemadanan DPB Semester II Tahun 2021 dengan Data
Kependudukan Kemendagri

DATA PADAN SAMA WILAYAH			DATA PADAN BEDA WILAYAH			DATA ANGGOTA KK PADAN YANG TIDAK ADA DI DPT		
Data Masuk	Selesai Dikerjakan	Progres (%)	Data Masuk	Selesai Dikerjakan	Progres (%)	Data Masuk	Selesai Dikerjakan	Progres (%)
8.565	8.565	100%	11.220	11.220	100%	86.136	44.416	51,56%

Data Anggota KK padan yang tidak ada dalam DPT belum dapat terunggah seluruhnya karena terdapat pemilih yang belum berusia 17 tahun dan belum rekam KTP Elektronik.

d. Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)

Sesuai ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, KPU Kabupaten Karanganyar melaksanakan Rapat Koordinasi PDPB setiap 3 (tiga) bulan sekali, sehingga pelaksanaan Rapat Koordinasi PDPB di bulan Maret 2022 dilaksanakan secara luring dengan mengundang Stakeholder/Dinas/Instansi terkait antara lain Disdukcapil Kabupaten Karanganyar, Polres Karanganyar, Kodim 0727 Karanganyar, Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar, Pangkalan Udara (Lanud) Adi Soemarmo, Pengadilan Negeri Karanganyar, Partai Politik Peserta Pemilu 2019 Tingkat Kabupaten Karanganyar, Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar, dan Bawaslu Kabupaten Karanganyar.



e. Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan

Dalam Rapat Koordinasi PDPB bulan September 2022 tersebut, KPU Kabupaten Karanganyar menyepakati hasil olah data Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan bulan September Tahun 2022 untuk selanjutnya ditetapkan dalam Rapat Pleno Internal KPU Kabupaten Karanganyar sejumlah 689.512 pemilih dengan rincian laki-laki sebanyak 339.792 pemilih dan perempuan sebanyak 349.720 pemilih sebagaimana dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 3.9
Rekapitulasi DPB Bulan September Tahun 2022

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Daftar Pemilih Berkelanjutan		
			L	P	L+P
1	JATIPURO	10	13.722	13.824	27.546
2	JATIYOSO	9	16.643	16.813	33.456
3	JUMAPOLO	12	17.469	17.409	34.878
4	JUMANTONO	11	19.109	19.265	38.374
5	MATESIH	9	16.945	17.262	34.207
6	TAWANGMANGU	10	17.946	18.063	36.009
7	NGARGOYOSO	9	13.819	14.063	27.882
8	KARANGPANDAN	11	16.004	16.847	32.851
9	KARANGANYAR	12	30.350	31.573	61.923
10	TASIKMADU	10	22.602	23.512	46.114
11	JATEN	8	28.511	29.848	58.359
12	COLOMADU	11	23.231	25.260	48.491
13	GONDANGREJO	13	29.370	29.116	58.486
14	KEBAKKRAMAT	10	23.768	25.024	48.792
15	MOJOGEDANG	13	25.744	26.366	52.110
16	KERJO	10	14.067	14.682	28.749
17	JENAWI	9	10.492	10.793	21.285
TOTAL		177	339.792	349.720	689.512

Hasil rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) bulan September Tahun 2022 tersebut akan digunakan sebagai bahan sinkronisasi dengan data kependudukan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 202 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 2017 bahwa KPU Kabupaten/Kota menggunakan data penduduk potensial pemilih Pemilu untuk disandingkan dengan Daftar Pemilih Tetap Pemilu terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan sebagai bahan penyusunan daftar Pemilih.

Tabel 3.10

Persentase Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu

No	Indikator kinerja	2022		Capaian
		Target	Realisasi	Realisasi
1	Persentase pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih tepat waktu	100%	100%	100%

6. Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang Aman, Handal dan Lancar

Dalam mendukung terlaksananya Tahapan Pemilu 2024 di Tahun 2022, KPU Karanganyar menetapkan sasaran strategis Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan E-government di KPU Kabupaten Karanganyar dengan indikator kinerja persentase sarana dan prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar. Dukungan Tekonologi Informasi menjadi bagian penting yang harus dikelola, terlebih di setiap Tahapan Pemilu. Pemanfaatan IT dalam mendukung pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 melalui penggunaan aplikasi khusus Pemilu yang dikembangkan oleh KPU RI menjadi modal utama dukungan kesuksesan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di bidang IT dalam mendukung Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 pada Tahun 2022 antara lain :

- 1) Melaksanakan belanja modal peralatan mesin
Belanja modal peralatan dan mesin tersebut untuk mendukung pengolahan data pemilih dan pengoperasian aplikasi Sidalih Pemilu berupa 4 (empat unit) Laptop, 1 (satu) unit PC All In One dan 2 (dua) unit Printer sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota untuk Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Tahun Anggaran 2022.
- 2) Melakukan seting ulang jaringan internet guna mendukung kelancaran pelaksanaan Verifikasi Administrasi Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik melalui aplikasi

- SIPOL dan Pendaftaran Badan Adhoc penyelenggara Pemilu melalui website SIAKBA.
- 3) Melakukan penambahan *bandwith* internet kantor KPU Kabupaten Karanganyar
- Sehubungan dengan penggunaan sistem informasi pada setiap Tahapan Pemilu Tahun 2024, dukungan terhadap layanan internet kantor KPU Kabupaten Karanganyar menjadi hal yang wajib dijamin ketersediaannya. Atas pertimbangan tersebut, dilakukan penambahan *bandwith* internet dari 20 Mbps menjadi 100 Mbps.
- 4) Menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Informasi dengan mengacu pada Surat Edaran KPU Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penerapan Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi dengan melaksanakan kebersihan siber secara berkala dalam mengelola akun, data, informasi maupun perangkat yang digunakan.

Tabel 3.11

Persentase sarana dan prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang Aman, Handal dan Lancar

No	Indikator kinerja	2022		Capaian
		Target	Realisasi	Realisasi
1	Persentase sarana dan prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%

7. Persentase sarana transportasi, gedung dan gudang dan fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja KPU Kabupaten Karanganyar yang berfungsi dengan baik

Terpenuhinya kebutuhan operasional, pemeliharaan perkantoran serta dukungan sarana prasarana internal menjadi faktor pendukung dalam memperlancar kinerja personil maupun seluruh kegiatan yang telah direncanakan dan dirancang sedemikian rupa, KPU Kabupaten Karanganyar membutuhkan daya dukung berupa sarana prasarana yang maksimal. Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran juga sangat penting diperhatikan karena dengan sarana dan prasarana perkantoran yang prima dan berfungsi dengan baik, seluruh kegiatan yang telah direncanakan dapat dijalankan dengan maksimal tanpa ada kendala yang berarti. Kegiatan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran dilaksanakan dengan penjabaran dalam bentuk *output* yang telah direalisasikan oleh KPU Kabupaten Karanganyar, antara lain :

a. Melaksanakan penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) yang tertib dan berkesinambungan mulai dari kegiatan penyusunan perencanaan/rencana kebutuhan BMN, Penatausahaan BMN dengan melakukan pencatatan ke dalam Aplikasi Persediaan dan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi BMN (SIMAK-BMN) hingga

tercapainya *output* hasil pelaksanaan kegiatan yakni tersusunnya dokumen laporan BMN yang handal dan akuntabel;

- b. Melakukan pembayaran untuk keperluan perkantoran sehari-hari yaitu belanja keperluan operasional perkantoran seperti ATK, belanja barang rumah tangga, barang cetakan, langganan koran, air minum pegawai, langganan daya dan jasa serta pakaian dinas pegawai;
- c. Memenuhi kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor berupa pemeliharaan gedung dan bangunan kantor KPU Kabupaten Karanganyar, pada Tahun Anggaran 2022 KPU Kabupaten Karanganyar melaksanakan pemeliharaan gedung dan bangunan berupa :
 - 1) Renovasi perwajahan bagian depan atau fasad Aula Kantor KPU Kabupaten Karanganyar menggunakan pagu anggaran pemeliharaan gedung dan bangunan kegiatan 3360.EBA.994;



- 2) KPU Kabupaten Karanganyar menerima pagu anggaran Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp 200.000.000 melalui revisi Anggaran Biaya Tambahan SABA-BUN oleh KPU Republik Indonesia. Anggaran tersebut direalisasikan untuk merenovasi gedung kantor KPU Kabupaten Karanganyar guna mendukung kelancaran pelaksanaan Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. Renovasi yang dilakukan antara lain merenovasi halaman dan teras bagian depan kantor, renovasi dapur dan teras belakang, renovasi parkir kendaraan pegawai dan perbaikan mushola kantor.



- 3) Selain itu, KPU Kabupaten Karanganyar juga merealisasikan pemeliharaan peralatan dan mesin maupun pemeliharaan kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4, melaksanakan pembayaran honorarium pengelola keuangan maupun pejabat pengadaan barang dan jasa, serta untuk pembiayaan perjalanan dinas koordinasi pengelolaan BMN dan rekonsiliasi data laporan keuangan dengan KPKNL dan KPPN.

TABEL 3.12

Persentase Pengukuran Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan
Perkantoran

No	Indikator kinerja	2022		Capaian realisasi
		Target	Realisasi	
1	Persentase sarana transportasi, gedung dan gudang KPU Kabupaten Karanganyar yang berfungsi dengan baik	100 %	100 %	100 %
2	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja Satker KPU Kabupaten Karanganyar yang berfungsi dengan baik	100 %	100 %	100 %

8. Jumlah Revisi yang Dilakukan Terhadap Rencana Kerja yang Telah Ditetapkan

Pelaksanaan kegiatan Perencanaan dan Penganggaran Pemilu di KPU Kabupaten Karanganyar mengacu pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 60 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022 dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal

Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota untuk Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Tahun Anggaran 2022.

Pelaksanaan kegiatan Perencanaan dan Penganggaran Pemilu Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Karanganyar selama Tahun 2022 untuk mendukung capaian target kegiatan yang telah ditetapkan antara lain :

1) Menyusun dokumen perencanaan anggaran Tahun 2022

Penyusunan dokumen perencanaan KPU Kabupaten Karanganyar diantaranya menyusun dokumen SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) maupun dokumen perencanaan anggaran berupa Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Selama Tahun 2022, KPU Kabupaten Karanganyar telah melakukan Revisi DIPA sebanyak 14 (empat belas) kali, baik Revisi DJA, Revisi Kanwil DJPB maupun Revisi Pemutakhiran KPA.

Pengajuan Revisi DIPA KPU Kabupaten Karanganyar dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Revisi Anggaran dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-1/PB/2022 Tentang Petunjuk Teknis Revisi Anggaran yang menjadi Kewenangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Sebelum mengajukan usulan revisi anggaran, KPU Kabupaten Karanganyar melakukan koordinasi internal guna membahas kebutuhan anggaran di masing-masing Sub Bagian agar dapat memenuhi kebutuhan belanja dalam rangka mempercepat pencapaian kinerja dan optimalisasi belanja khususnya pada kegiatan Prioritas Nasional.



Daftar Revisi DIPA Tahun Anggaran 2022 pada Satuan Kerja KPU Kabupaten Karanganyar sebagai berikut :

Tabel 3.13

Daftar Revisi DIPA Tahun Anggaran 2022

No	Tanggal Revisi	Revisi Ke-	Jenis Revisi	Pagu
1.	17 November 2021	Dipa Awal	-	3.243.580.000
2.	31 Januari 2022	Revisi ke-1	Revisi DJA	3.637.271.000
3.	18 Maret 2022	Revisi ke-2	Revisi Kanwil	3.637.271.000
4.	12 Mei 2022	Revisi ke-3	Revisi Kanwil	3.637.271.000
5.	13 Juni 2022	Revisi ke-4	Revisi DJA	3.637.271.000
6.	6 Juli 2022	Revisi ke-5	Revisi Kanwil (Hal3)	3.637.271.000
7.	18 Agustus 2022	Revisi ke-6	Revisi DJA	3.637.271.000
8.	5 September 2022	Revisi ke-7	Revisi DJA	4.912.414.000
9.	7 September 2022	Revisi ke-8	Pemutakhiran KPA	4.912.414.000
10.	27 September 2022	Revisi ke-9	Revisi DJA	4.904.838.000
11.	12 Oktober 2022	Revisi ke-10	Revisi Kanwil (Hal3)	4.904.838.000
12.	8 November 2022	Revisi ke-11	Revisi DJA	4.906.811.000
13.	28 November 2022	Revisi ke-12	Revisi Kanwil	4.906.811.000
14.	7 Desember 2022	Revisi ke-13	Revisi PA	4.912.996.000
15.	20 Desember 2022	Revisi ke-14	Revisi Kanwil	4.912.996.000

2) Melaksanakan koordinasi pengelolaan program dan anggaran Tahun 2022

KPU Kabupaten Karanganyar perlu melaksanakan pengelolaan dan pendayagunaan anggaran untuk memaksimalkan pencapaian kinerja dari masing-masing output/keluaran dan mendukung tujuan Pemerintah dalam menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja. Pada bulan September Tahun 2022, KPU Kabupaten Karanganyar menerima tambahan anggaran yang bersumber dari SABA-BUN (Satuan Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara) melalui pengesahan Revisi Anggaran ke-6 DIPA KPU RI atau Revisi DIPA ke-7 Satker KPU Kabupaten Karanganyar tanggal 5 September 2022. Anggaran Belanja Tambahan Tahun Anggaran 2022 tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 yang merupakan Prioritas Nasional.

Anggaran tambahan yang diterima tersebut belum sepenuhnya mengakomodir dinamika kebutuhan pelaksanaan Tahapan Pemilu 2024 di KPU Kabupaten Karanganyar sehingga perlu dilakukan pergeseran dan perubahan alokasi pagu belanja sesuai dengan kebutuhan KPU Kabupaten Karanganyar melalui mekanisme Revisi DIPA dengan memedomani Surat Sekretaris Jenderal

KPU RI Nomor 2292/KU.03-SD/01/2022 tanggal 12 September 2021 perihal Penyesuaian Pagu Anggaran Tahapan dan Dukungan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2022.



TABEL 3.14

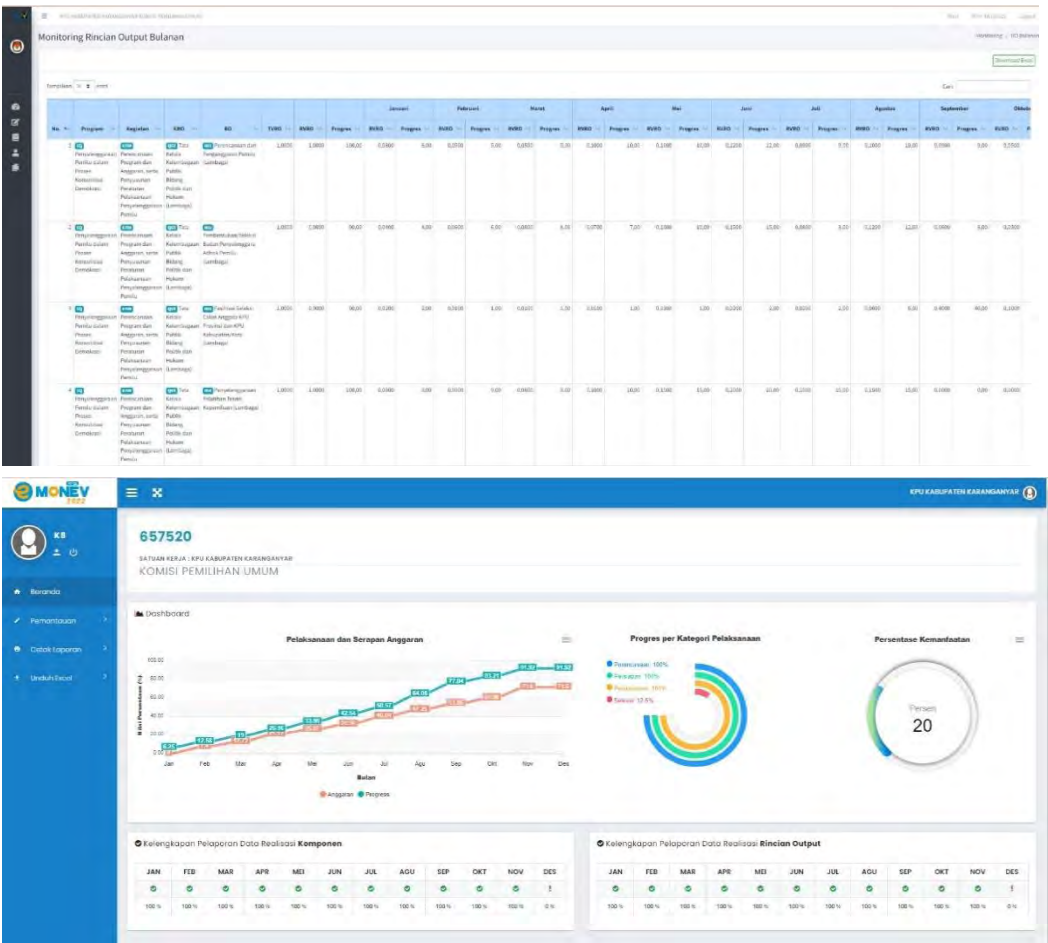
Jumlah Revisi yang Dilakukan Terhadap Rencana Kerja yang Telah Ditetapkan

No	Indikator kinerja	2022		Capaian realisasi
		Target	Realisasi	
1	Jumlah Revisi yang Dilakukan Terhadap Rencana Kerja yang Telah Ditetapkan Karanganyar yang berfungsi dengan baik (Revisi ke Kanwil DJPB)	4 kali	6 kali	150 %

9. Persentase Laporan Monitoring dan Evaluasi yang Akuntabel dan Tepat Waktu dan Persentase Target Kinerja KPU Kabupaten Karanganyar yang Tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja

Dalam rangka pencapaian target kinerja sebagaimana yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Karanganyar Tahun 2022, KPU Kabupaten Karanganyar melakukan :

- 1) Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja. Atas pelaksanaan kegiatan tersebut, KPU Kabupaten Karanganyar selanjutnya menyusun laporan monitoring dan evaluasi kinerja setiap bulan serta melakukan pemutakhiran/update/input data capaian kinerja Satker melalui aplikasi SMART DJA Kementerian Keuangan dan website E-Monev Bappenas.



2) Melaksanakan Rapat Evaluasi Pelaksanaan kegiatan dan Tahapan Pemilu 2024 di Tahun Anggaran 2022 di Aula Kantor KPU Kabupaten Karanganyar pada tanggal 24 Desember 2022. Dalam kegiatan tersebut, disampaikan realisasi anggaran dan capaian kinerja serta daftar inventarisasi masalah pelaksanaan kegiatan dan tahapan di Tahun 2022 sebagai bahan untuk merumuskan rekomendasi perbaikan dalam melaksanakan kegiatan yang akan datang. Peserta kegiatan adalah Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Fungsional Umum dan PPNPN KPU Kabupaten Karanganyar.



TABEL 3.15

**Persentase Laporan Monitoring dan Evaluasi yang Akuntabel dan Tepat Waktu
dan Persentase Target Kinerja KPU Kabupaten Karanganyar yang Tercapai
sesuai dengan Perjanjian Kinerja**

No	Indikator kinerja	2022		Capaian realisasi
		Target	Realisasi	
1	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100 %	100 %	100 %
2	Persentase target kinerja KPU Kabupaten Karanganyar yang tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja	100 %	100 %	100 %

10. Persentase Penyelesaian Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Sesuai Ketentuan dan Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid

Dalam melaksanakan pertanggungjawaban penggunaan anggaran selama tahun anggaran 2022, KPU Kabupaten Karanganyar juga telah menyusun Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran baik dalam bentuk dokumen laporan manual maupun melalui Website Sistem Informasi Monitoring Keuangan (SIMONIKA) KPU dengan tingkat keterserapan anggaran yang optimal yakni sebesar Rp 4.742.806.526 atau sebesar 96,54% dari total pagu anggaran sebesar Rp 4.912.996.000. Berdasarkan capaian realisasi anggaran KPU Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2020 tersebut, capaian kinerja pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan keuangan dapat terlaksana secara optimal.

Hasil penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) tersebut secara rutin dilakukan koordinasi melalui Rapat Koordinasi LPPA setiap bulan guna melakukan pencermatan terhadap sisa anggaran yang belum terserap sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan



TABEL 3.16

Persentase Penyelesaian Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Sesuai Ketentuan dan Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid

No	Indikator kinerja	2022		Capaian realisasi
		Target	Realisasi	
1	Persentase penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan oleh KPU Kabupaten Karanganyar	100 %	100 %	100 %
2	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	1 laporan	1 laporan	100 %

11. Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dan Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya Sesuai dengan Data SAK

KPU Kabupaten Karanganyar melaksanakan pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan tingkat UAKPA sesuai Standar Akuntansi Pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas anggaran yang dikelola selama tahun anggaran 2022 secara tertib, akurat dan akuntabel. KPU Kabupaten Karanganyar menetapkan 1 (satu) Laporan Keuangan dan 1 (satu) laporan BMN sebagai target kinerja yang harus diraih pada tahun 2022. Kedua laporan tersebut merupakan wujud pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi tingkat UAKPA yang terdiri atas Akuntansi Keuangan dan Akuntansi Barang.

Dalam rangka mencapai target kinerja tersebut, KPU Kabupaten Karanganyar aktif melakukan pengelolaan keuangan dan pengelolaan BMN secara tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. KPU Kabupaten Karanganyar juga berupaya meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM di bidang pengelola keuangan dan BMN dengan mengikutsertakan personil dalam Pelatihan Pengelolaan Keuangan bagi ASN KPU Tahun 2022 yang diadakan oleh Pusat Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Sekretariat Jenderal KPU Republik Indonesia maupun pelatihan *online/ e-learning* melalui Kemenkeu Learning Center. Pada Tahun 2022 KPU Kabupaten Karanganyar telah melaksanakan pengelolaan BMN antara lain :

- a. Penetapan Status Penggunaan BMN selain tanah dan/atau bangunan yang dituangkan dalam SK Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 1692 Tahun 2022 tanggal 2 Desember 2022;
- b. Melakukan pemeriksaan fisik/ stock opname Persediaan dan Aset BMN yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan fisik per tanggal 31 Desember 2022;
- c. Penghapusan BMN berupa baliho Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 dan penghapusan Bilik Suara Berbahan Alumunium pada KPU Kabupaten Karanganyar.

Atas tertibnya pengelolaan keuangan pada Tahun Anggaran 2022, KPU Kabupaten Karanganyar menerima penghargaan Karya Adinata yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah sebagai Satuan Kerja terbaik kedua kategori Pengelolaan Keuangan dan terbaik kedua kategori Pengelolaan SIRUP KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah.



Tabel 3.17

Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang Diselesaikan Tepat Waktu dan Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya Sesuai dengan Data SAK

No	Indikator kinerja	2022		Capaian realisasi
		Target	Realisasi	
1	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu oleh KPU Kabupaten Karanganyar	1 laporan	1 laporan	100 %
2	Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya Sesuai dengan Data SAK	1 laporan	1 laporan	100 %

12. Persentase arsip yang dikelola sesuai jadwal retensi arsip oleh KPU Kabupaten Karanganyar

Sesuai pasal 33 UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara dinyatakan sebagai arsip milik negara. Pada tahun 2021 KPU RI telah melaunching Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) dan menghimbau agar KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti dan mengimplementasikan GNSTA dengan melaksanakan kegiatan penataan tertib kearsipan meliputi tertib dalam penciptaan arsip, tertib dalam pemeliharaan arsip, tertib dalam penyusutan, tertib dalam pelaporan dan pembinaan kearsipan. Dalam aksi penataan arsip dan pembinaan kearsipan agar mengedukasi *tagline* CINTA (Cepat Inovatif efisien Tertib Akurat Administrasi dan Arsip).

Atas dasar tersebut KPU Kabupaten Karanganyar berperan aktif dalam penyelamatan arsip Pemilu dengan membentuk Tim Pengelolaan Arsip pada tahun 2021 melalui penetapan Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 14/HK.03.1-Kpt/3313/KPU-Kab/VI/2021 tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Arsip Dinamis di Lingkungan KPU Kabupaten Karanganyar. Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam pengelolaan arsip oleh KPU Kabupaten Karanganyar selama tahun 2022 guna mencapai target indikator kinerja tahun 2021 antara lain sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan rapat koordinasi internal tim pengelolaan arsip dalam rangka penyesuaian Prosedur Operasional Standar pengelolaan arsip dan membahas penataan arsip inaktif KPU Kabupaten Karanganyar. Output dari koordinasi internal tim pengelolaan arsip adalah tersusunnya Prosedur Operasional Standar yang ditetapkan melalui Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 25 Tahun 2022

tentang Penetapan Prosedur Standar Operasional Pengelolaan Arsip di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar.



- 2) Melaksanakan pengelolaan Arsip Inaktif KPU Kabupaten Karanganyar bertempat di Gudang Arsip KPU Kabupaten Karanganyar dengan pendampingan dari Dinas Arsip dan Perpustakaan (Disarpus) Kabupaten Karanganyar terkait dengan tata cara pengelolaan arsip lembaga agar sesuai dengan ketentuan kearsipan, mengingat di KPU Kabupaten Karanganyar belum memiliki SDM dengan jabatan fungsional Arsiparis;



- 3) Melakukan penataan arsip di masing-masing sub bagian dengan mengelompokkan ke dalam arsip dinamis aktif, dinamis inaktif dan statis sesuai dengan Jadwal Retensi Arsip (JRA) yang tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2019 tentang Jadwal Arsip Kepegawaian dan Keuangan KPU, KPU Provinsi dan KPU

Kabupaten/Kota serta Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Kepegawaian dan Non Keuangan KPU.



TABEL 3.18
Persentase arsip yang dikelola sesuai jadwal retensi arsip oleh KPU
Kabupaten Karanganyar

No	Indikator kinerja	2022		Capaian realisasi
		Target	Realisasi	
1	Persentase arsip yang dikelola sesuai jadwal retensi arsip oleh KPU Kabupaten Karanganyar	100 %	100 %	100 %

13.Persentase Ketaatan KPU Kabupaten/Kota dalam Pengisian dan Penyampaian Kartu Kendali SPIP Secara Lengkap dan Tepat Waktu

SPIP dilaksanakan guna mengetahui proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan penerapan SPIP yang baik diharapkan dapat mencegah terjadinya penyimpangan dan kesalahan dalam laporan keuangan yang akan mempengaruhi pencapaian opini terhadap Laporan Keuangan dalam pemeriksaan/audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kegiatan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan menyelenggarakan kegiatan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar meliputi :

- a. Menetapkan/mengidentifikasi lingkungan pengendalian;
- b. melakukan penilaian resiko;

- c. melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi;
- d. menginformasikan dan mengkomunikasikan melalui koordinasi dengan Satgas SPIP setiap bulan dan sosialisasi SPIP di media sosial;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi/pemantauan atas penerapan Sistem Pengendalian Intern melalui penyesuaian laporan SPIP dan evaluasi kartu kendali SPIP secara berkala.

Pelaksanaan kegiatan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Karanganyar dilakukan secara rutin setiap bulan melalui pengisian dan penyampaian Kartu Kendali SPIP ke KPU Provinsi Jawa Tengah. Kartu kendali merupakan media pertanggungjawaban kegiatan dari Sekretariat kepada Komisioner dan media monitoring pengawasan dan pembinaan dari Komisioner dan Sekretariat. Sebelum Kartu Kendali SPIP beserta dokumen pendukungnya disampaikan ke KPU Provinsi Jawa Tengah, dilakukan koordinasi dengan seluruh anggota Satgas SPIP. Rapat koordinasi Satgas SPIP ini rutin dilaksanakan setiap bulan, yang dilaksanakan paling lambat tanggal 6 bulan berikutnya.



Output yang dihasilkan dalam pelaksanaan SPIP Tahun 2022 berupa Laporan SPIP Tahun 2022. Laporan tahunan SPIP berbentuk surat, berisi uraian kemajuan pelaksanaan dan infrastruktur SPIP yang telah dibangun, serta efektivitas penyelenggaraan SPIP pada tahun bersangkutan. Berdasarkan Penyelenggaraan SPIP pada Tahun 2022, KPU Kabupaten Karanganyar dapat memenuhi seluruh target capaian kinerja sehingga persentase capaian target kinerja sebesar 100% seperti pada tabel berikut :

TABEL 3.19

Persentase ketaatan KPU Kabupaten/Kota dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu

No	Indikator kinerja	2022		Capaian realisasi
		Target	Realisasi	
1	Persentase ketaatan KPU Kabupaten/Kota dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu	100 %	100 %	100 %

14.Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar yang disusun tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi

Rancangan keputusan KPU sangatlah dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi. Sebagai penyelenggara Pemilu/Pemilihan Serentak, KPU Kabupaten Karanganyar mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang merupakan peraturan pelaksanaan dari regulasi yang berada di tingkat atasnya untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Serentak. Kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar.

Keputusan yang diperlukan KPU Kabupaten Karanganyar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu keputusan yang mengatur terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Serentak dan keputusan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Serentak (*non* tahapan Pemilu/Pemilihan Serentak). Dalam dokumen Rencana Strategis 2020-2024, KPU Kabupaten Karanganyar telah menuangkan kerangka regulasi yang diperlukan selama kurun waktu 2020-2024. Sepanjang tahun 2021, KPU Kabupaten Karanganyar telah menerbitkan produk hukum sebanyak 29 (dua puluh sembilan) Keputusan.

TABEL 3.20

Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar yang disusun tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi

No	Indikator kinerja	2022		Capaian realisasi
		Target	Realisasi	
1	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar yang disusun tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi	100 %	100 %	100 %

15. Persentase Produk Hukum yang Dikelola, Didokumentasikan dan Disajikan sesuai Peraturan Perundang-Undangan

Penyajian informasi produk hukum di KPU Kabupaten Karanganyar dilaksanakan melalui pelaksanaan kegiatan Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum. KPU Kabupaten Karanganyar sebagai bagian dari KPU RI wajib melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional bahwa Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disingkat JDIHN adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.

Agar dapat menyajikan Informasi Produk Hukum secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, KPU RI telah memfasilitasi melalui laman JDIH KPU Kabupaten Karanganyar yang dapat diakses secara online melalui alamat <http://jdi.h.kpu.go.id/jateng/karanganyar>. Terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2020, KPU RI me-launching laman JDIH bagi KPU Kabupaten/Kota di Provisnsi Jawa Tengah, termasuk Karanganyar. Laman JDIH KPU Karanganyar menyajikan berbagai informasi produk hukum kepemiluan meliputi informasi produk hukum KPU RI, KPU Provinsi Jawa Tengah dan informasi produk hukum KPU Karanganyar. Dalam rangka menyediakan informasi produk hukum kepemiluan khususnya terkait penyelenggaraan Pemilu 2024 kepada para stake holder dan masyarakat di Kabupaten Karanganyar, Kami berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan peran JDIH KPU Karanganyar sebagai media penyuluhan regulasi Tahapan Pemilu Tahun 2024 dengan memedomani Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum.



Sehubungan dengan hal tersebut, pada tahun 2022 KPU Karanganyar melaksanakan Kegiatan Peningkatan Peran JDIH KPU dalam Rangka Penyuluhan

Regulasi Tahapan Pemilu Tahun 2024 yang dilaksanakan pada hari Senin, 28 November 2022 di Convention Hall Jawa Dwipa Jl. Raya Solo – Tawangmangu KM. 34 Karangpandan dengan menghadirkan narasumber Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah Divisi Hukum dan Pengawasan dan peserta antara lain, Jajaran Forkompimda Kabupaten Karanganyar; Dinas/Instansi terkait Kabupaten Karanganyar, Ketua Partai Politik Tingkat Kabupaten Karanganyar, Radio H dan Radio Swiba Karanganyar serta Media/Desk Wartawan Kabupaten Karanganyar.



TABEL 3.21

Persentase Produk Hukum yang Dikelola, Didokumentasikan dan Disajikan
sesuai Peraturan Perundang-Undangan

No	Indikator kinerja	2022		Capaian realisasi
		Target	Realisasi	
1	Persentase Produk Hukum yang Dikelola, Didokumentasikan dan Disajikan sesuai Peraturan Perundang-Undangan	100 %	100 %	100 %

16.Persentase Terlaksananya Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Pemilu Tahun 2024 Sesuai Ketentuan yang Berlaku

Untuk dapat menjadi Peserta Pemilu Tahun 2024, Partai Politik harus memenuhi syarat memiliki kepengurusan di 75 % (Tujuh puluh lima persen) jumlah Kabupaten/ Kota. Sementara dalam hal Keanggotaan Partai Politik, untuk dapat menjadi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, Partai Politik harus memiliki anggota sejumlah 1/1000 atau 1000 dari jumlah penduduk di Kab/Kota tersebut.

Dalam menentukan jumlah anggota minimal KPU Kabupaten Karanganyar berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 274 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta Jumlah Penduduk

Kabupaten/Kota di setiap Provinsi sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik maka jumlah minimal anggota Partai Politik di Kabupaten Karanganyar Minimal 936.

Maksud dan tujuan kegiatan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu di Kabupaten Karanganyar adalah untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, selain itu rangkaian pendaftaran dan verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu dimaksudkan dapat menciptakan suasana politik dan demokrasi yang baik di Indonesia sehingga kedepannya kualitas hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 juga lebih baik. Proses Kegiatan Tahapan Pendaftaran dan verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu Tahun 2024 di KPU Kabupaten Karanganyar sebagai berikut :

- a. Bimbingan Teknis Peraturan KPU tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu serta Pengenalan Fungsi SIPOL KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota yang diselenggarakan di Jakarta tanggal 23 – 25 Juli 2022 dengan peserta Anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Anggota KPU Divisi Rendatin, Kasubbag TPPP dan Hubmas serta operator SIPOL.



- b. Rapat Koordinasi Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu 2024 yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah tanggal 3 September 2022 dengan peserta Anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Kasubbag TPPP dan Hubmas serta Admin SIPOL.



- c. Bimbingan Teknis Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah bertempat di MG Setos Hotel, The Atrium Hall, Kota Semarang tanggal 11 – 13 Oktober 2022 dengan peserta Semua Anggota KPU Kab/Kota, Sekretaris, Kasubbag TPPP dan Hubmas serta Admin SIPOL.



- d. Sosialisasi Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilu dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD Pemilu 2024 di Kantor KPU Kabupaten Karanganyar tanggal 13 Agustus 2022 dengan mengundang Partai Politik di tingkat Kabupaten Karanganyar, Bawaslu Kabupaten Karanganyar, Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Karanganyar dan staf yang membidangi.



- e. Rapat Kerja Tindak Lanjut Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 di Ruang Meeting Jodipati Nava Hotel Tawangmangu dengan mengundang Kepala Kesbangpol Kabupaten Karanganyar, Ketua, Anggota, Sekretaris, Semua Kasubbag, staf ASN dan semua tenaga PPNP tanggal 11 – 12 September 2022.



- f. Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Keputusan KPU Nomor 345 Tahun 2022 dilaksanakan pada Selasa, 20 September 2022 di Kebon Dalem Karanganyar Jl. Brigjen Katamso, Kodokan, Papahan, Kec. Tasikmadu, Kab. Karanganyar, dengan mengundang Ketua Parpol tingkat Kabupaten Karanganyar, Kapolres, Kodim 0727 Karanganyar, Kepala Kesbangpol Kabupaten Karanganyar, Ketua, Anggota, Sekretaris, semua Kasubbag dan staf ASN yang membidangi.



- g. Bimbingan Teknis Verifikasi Faktual Perbaikan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 dilaksanakan di The Alana Hotel & Convention Center Solo pada hari Jum'at - Sabtu, 11 – 12 November 2022 dengan mengundang Kesbangpol Kabupaten Karanganyar (Anggota Tim Pokja), Kapolres Karanganyar (Anggota Tim Pokja), Ketua, Anggota, Sekretaris, Semua Kasubbag, semua staf pelaksana, dan semua tenaga PPNNP.



- h. Evaluasi pelaksanaan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 dilaksanakan di The Hotel Nava, Jl. Grojogan Sewu, Pintu II Jl. Ngunut RT 4/RW 6 Nano, Tawangmangu, Karanganyar pada hari Minggu - Senin, 11 – 12 Desember 2022 dengan mengundang Kesbangpol Kabupaten Karanganyar (Anggota Tim Pokja), Kapolres Karanganyar (Anggota Tim Pokja), Ketua, Anggota, Sekretaris, Semua Kasubbag, semua staf pelaksana, dan semua tenaga PPNNP.



- i. Evaluasi Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 dilaksanakan pada hari Senin, 19 Desember 2022 di Green Resto Karanganyar, Kadipiro Asri Jl. Lawu No. 168 Bejen, Karanganyar dengan mengundang Ketua Partai Politik tingkat Kabupaten Karanganyar; Kepala Satpol PP Kabupaten Karanganyar; Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar; Kepala Diskominfo Kabupaten Karanganyar; Kabag Pemerintahan Umum Setda Karanganyar; Ketua dan Anggota KPU Kabupaten

Karanganyar; Ketua Bawaslu Kabupaten Karanganyar, Sekretaris dan pejabat struktural, Staf fungsional umum yang membidangi, media/wartawan.



1) Hasil Verifikasi Administrasi

Tabel 3.22.

Hasil Verifikasi Administrasi

No	Nama Partai	Jumlah Anggota	Jumlah Anggota Terverifikasi	Jumlah MS
1	Partai Swara Rakyat Indonesia	1.628	1.628	0
2	Partai Solidaritas Indonesia	1.026	1.025	870
3	Partai Republik Indonesia	1.103	1.103	0
4	Partai Republik Satu	2.001	2.001	1
5	Partai Republik	940	940	0
6	Partai Rakyat Adil Makmur	978	974	709
7	Partai Persatuan Pembangunan	1.337	1.337	859
8	Partai Nasdem	1.065	1.064	701
9	Partai Kebangkitan Nusantara	1.093	1.093	1031
10	Partai Kebangkitan Bangsa	1.429	1.429	1357
11	Partai Keadilan Sejahtera	1.040	1.039	951
12	Partai Keadilan dan Persatuan	987	987	6
13	Partai Hati Nurani Rakyat	1.342	1.339	952
14	Partai GOLKAR	3.014	3.012	2684
15	Partai Gerakan Indonesia Raya	1.919	1.919	1639
16	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	252	252	168
17	Partai Garda Perubahan Indonesia	966	964	926
18	Partai Demokrat	1.123	1.123	1025
19	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1.860	1.859	1753
20	Partai Buruh	1.822	1.822	1077
21	Partai Bulan Bintang	1.174	1.174	615
22	Partai Amanat Nasional	1.704	1.704	1391

2) Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan

Tabel 3.23

Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan

No	Nama Partai	Jumlah Anggota	Jumlah Anggota Terverifikasi	Jumlah MS
1	Partai Swara Rakyat Indonesia	2.012	2.012	4
2	Partai Solidaritas Indonesia	316	316	246
3	Partai Republik Indonesia	2.126	2.126	0
4	Partai Republik Satu	1	1	0
5	Partai Republik	1.874	1.874	0
6	Partai Rakyat Adil Makmur	675	675	394
7	Partai Persatuan Pembangunan	320	320	48
8	Partai Nasdem	890	890	578
9	Partai Kebangkitan Nusantara	26	26	5
10	Partai Kebangkitan Bangsa	32	32	17
11	Partai Keadilan Sejahtera	93	93	86
12	Partai Keadilan dan Persatuan	3.912	3.912	308
13	Partai Hati Nurani Rakyat	319	319	105
14	Partai GOLKAR	252	252	64
15	Partai Gerakan Indonesia Raya	227	227	80
16	Partai Gelora	77	77	41
17	Partai Garuda	46	46	39
18	Partai Demokrat	87	87	34
19	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	77	77	33
20	Partai Buruh	144	144	102
21	Partai Bulan Bintang	416	416	371
22	Partai Amanat Nasional	259	259	223
JUMLAH TOTAL		14.181	14.181	2.778

3) Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan

Tabel 3.24

Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan

No	Nama Partai	Status Verfak	Hasil Verfak Pengurus	Status Anggota Verfak	Hasil Verfak Anggota
1	Partai Solidaritas Indonesia	selesai	MS	Selesai	BMS
2	Partai Kebangkitan Nusantara	selesai	MS	Selesai	BMS

No	Nama Partai	Status Verfak	Hasil Verfak Pengurus	Status Anggota Verfak	Hasil Verfak Anggota
3	Partai Hati Nurani Rakyat	selesai	MS	Selesai	BMS
4	Partai Garda Perubahan Indonesia	selesai	MS	Selesai	BMS
5	Partai Buruh	selesai	MS	Selesai	BMS
6	Partai Bulan Bintang	selesai	BMS	Selesai	BMS

4) Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Keanggotaan

Tabel 3.25

Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Keanggotaan

No	Nama Partai	Jumlah Anggota	Jumlah Anggota Terverifikasi	Jumlah MS
1	Partai Solidaritas Indonesia	1.090	1.090	1.029
2	Partai Kebangkitan Nusantara	918	918	913
3	Partai Hati Nurani Rakyat	1.089	1.089	1.042
4	Partai Garda Perubahan Indonesia	919	919	907
5	Partai Buruh	604	604	581
6	Partai Bulan Bintang	942	942	915
JUMLAH TOTAL		5.562	5.562	5.387

5) Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Kepengurusan dan Keanggotaan

Tabel 3.26

Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Kepengurusan dan Keanggotaan

No	Nama Partai	Status Verfak	Hasil Verfak Pengurus	Status Anggota Verfak	Hasil Verfak Anggota
1	Partai Solidaritas Indonesia	Selesai	MS	Selesai	MS
2	Partai Kebangkitan Nusantara	Selesai	MS	Selesai	MS
3	Partai Hati Nurani Rakyat	Selesai	MS	Selesai	MS
4	Partai Garda Perubahan Indonesia	Selesai	MS	Selesai	MS
5	Partai Buruh	Selesai	MS	Selesai	MS
6	Partai Bulan Bintang	Selesai	MS	Selesai	MS

TABEL 3.27
Persentase Terlaksananya Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Pemilu
Tahun 2024 Sesuai Ketentuan yang Berlaku

No	Indikator kinerja	2022		Capaian realisasi
		Target	Realisasi	
1	Persentase terlaksananya pendaftaran dan verifikasi Partai Politik Pemilu Tahun 2024 sesuai ketentuan yang berlaku	100 %	100 %	100 %

17. Persentase pemutakhiran data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024

Penyusunan rancangan penataan daerah pemilihan merupakan tahapan yang harus dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar dengan berdasarkan pada ketentuan dalam undang-undang, Peraturan Komisi Pemilihan Umum serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, penyusunan penataan daerah pemilihan dilakukan dengan menyusun rancangan daerah pemilihan untuk menentukan jumlah alokasi kursi pada Kabupaten/Kota yang berdasarkan pada jumlah penduduk

Menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pengertian daerah pemilihan adalah wilayah / arena kompetisi bagi Peserta Pemilu terutama bagi Partai Politik yang akan mengikuti Pemilu Tahun 2024.

Penyusunan rancangan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan memperhatikan tujuh prinsip yaitu kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integritas wilayah, berada dalam satu cakupan wilayah yang sama, kohesivitas dan kesinambungan. Dengan memperhatikan tujuh prinsip tersebut KPU Kabupaten Karanganyar dapat menentukan jumlah alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten Karanganyar.

Dalam Pemilu Tahun 2024 Kabupaten Karanganyar untuk rancangan penataan daerah pemilihan masih sama seperti tahun 2019 yaitu lima dapil dengan jumlah kecamatan 17 kecamatan dan jumlah penduduk 936.492 jiwa. Maksud dan tujuan dari penyusunan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten Karanganyar adalah untuk membangun pemahaman yang sama dalam proses serta prosedur pengajuan penyusunan rancangan daerah pemilihan dan alokasi kursi pada Pemilu Tahun 2024 serta untuk menetapkan daerah pemilihan dan alokasi kursi pada Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan prinsip penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi.

Berikut tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik di Kabupaten Karanganyar sebagai berikut :

- a. Dalam penyusunan Rancangan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten Karanganyar menyiapkan data dan personil yang memadai. Dengan personil dan data yang ada, KPU Kabupaten Karanganyar melakukan rapat koordinasi Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi pada Pemilu Tahun 2024 pada 7 Oktober dan 17 Oktober 2022;
- b. Bimbingan Teknis Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota serta pengenalan fungsi sistem informasi daerah pemilihan (SIDAPIL) yang diselenggarakan di Pontianak tanggal 18 - 21 November 2022 dengan peserta anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Kasubbag TPPHM serta Operator SIDAPIL;



- c. Penyusunan rancangan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten/ Kota serta pengumuman rancangan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi DPRD Kabupaten Karanganyar diselenggarakan pada tanggal 23 – 29 November 2022;
- d. Tanggapan dan masukan masyarakat atas rancangan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dilaksanakan pada tanggal 23 November – 6 Desember 2022;
- e. Sosialisasi dan Persiapan Uji Publik rancangan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD di tingkat Kabupaten diselenggarakan pada tanggal 10 Desember 2022 di Kebon Dalem Karanganyar;



- f. Uji publik rancangan penataan daerah pemilihan dan Alokasi Kursi anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2022 di Kebon Dalem Karanganyar;



- g. Rapat Koordinasi Finalisasi dan penetapan rancangan penataan Dapil anggota DPRD Kabupaten Karanganyar setelah uji publik KPU Provinsi oleh KPU Kabupaten Karanganyar diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 2022;



- h. Penyampaian rancangan penataan Dapil anggota DPRD Kabupaten Karanganyar kepada KPU Provinsi pada tanggal 16 Desember 2022;
- i. Rapat Koordinasi Pencermatan dan rekapitulasi rancangan penataan Dapil DPRD Kabupaten Karanganyar yang akan disampaikan kepada KPU oleh KPU Provinsi pada tanggal 20 – 21 Desember 2022 di KPU Provinsi Jawa tengah.



Adapun hasil rancangan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten Karanganyar setelah diuji publikkan sebagai berikut :

- a. Peserta uji publik rancangan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten Karanganyar menyetujui rancangan yang telah diuji publikkan oleh KPU Kabupaten Karanganyar yakni 5 dapil dengan alokasi kursi 45 kursi;
- b. Seluruh peserta uji publik menandatangani rancangan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten Karanganyar untuk Pemilu tahun 2024.

18. Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP

Sebagai badan publik, KPU Kabupaten Karanganyar wajib menyediakan pelayanan informasi kepada masyarakat sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pelaksanaan Pengelolaan dan pelayanan informasi publik di KPU Kabupaten Karanganyar mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan KPU serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Di tahun 2022 KPU Kabupaten Karanganyar terus meningkatkan performa dalam pelayanan dan keterbukaan informasi publik diantaranya :

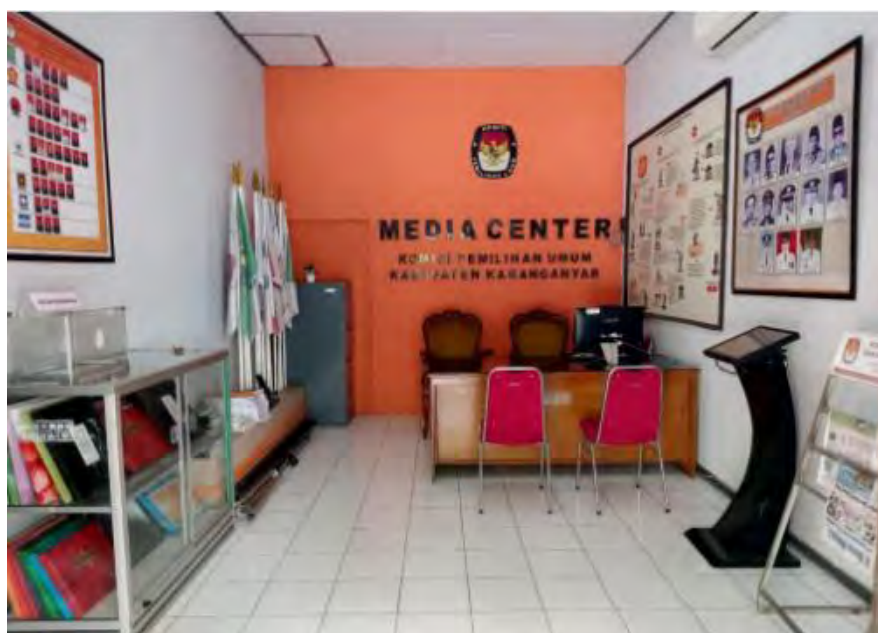
- a. Penetapan struktur pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan KPU Kabupaten Karanganyar yang melibatkan seluruh Komisioner dan ASN;

- b. Melaksanakan pelayanan dan pengelolaan informasi publik sesuai dengan SOP yang telah diterbitkan yaitu Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 13/HK.03.1-Kpt/3313/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Layanan dan Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar;
- c. Menyusun Daftar Informasi Publik (DIP) setiap tahun, karena dalam penyusunan DIP perlu memperhatikan jadwal retensi arsip yang telah ditetapkan serta mencakup 3 (tiga) kategori informasi yakni informasi setiap saat, informasi berkala dan informasi serta merta. DIP KPU Kabupaten Karanganyar tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 9/HK.03.1/3313/2022 tentang Penetapan Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Tahun 2022.
- d. Penetapan standar biaya dan tata cara pembayaran perolehan salinan informasi publik di KPU Kabupaten Karanganyar tahun 2022 melalui penetapan Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 12/HK.03.1-Kpt/3313/2022 tentang Penetapan Standar Biaya dan Tata Cara Pembayaran Perolehan Salinan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Tahun 2022.
- e. Mengunggah DIP di website resmi KPU Kabupaten Karanganyar dan website E-PPID KPU Kabupaten Karanganyar sesuai dengan kategori Informasinya agar mudah diakses masyarakat serta melakukan *updating* menu Layanan Data – PPID di Website Resmi setiap bulan, khususnya memperbarui informasi berkala.
- f. Menyusun jadwal pelayanan dan melayani permohonan informasi publik secara langsung sesuai petugas yang telah dijadwalkan.

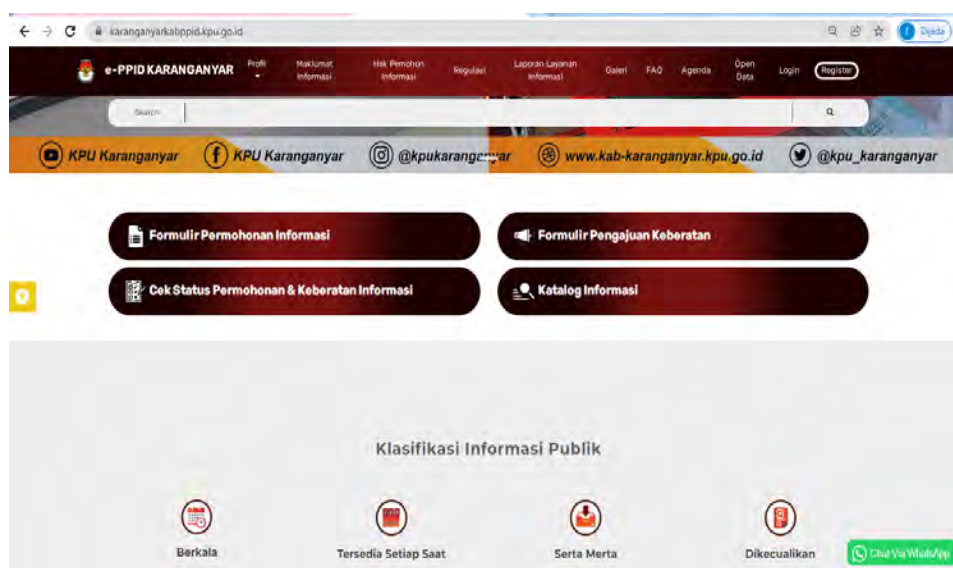
Guna memaksimalkan peran struktur PPID, KPU Kabupaten Karanganyar menyusun jadwal petugas pelayanan PPID setiap bulan yang bertugas melayani setiap pemohon yang datang secara langsung di kantor KPU Kabupaten Karanganyar sesuai SOP yang telah ditetapkan dan disosialisasikan kepada seluruh petugas. Petugas pelayanan merupakan ASN KPU Kabupaten Karanganyar.



- g. Tersedianya fasilitas pelayanan publik yang memadai antara lain : ruang PPID yang bersih dan nyaman, tersedianya buku tamu, maklumat pelayanan, jadwal petugas layanan PPID, tata cara pengajuan keberatan yang terpasang di ruang PPID serta ketersediaan SOP di pintu masuk ruang pelayanan PPID.



- h. Melakukan pelayanan secara *online* melalui website E-PPID maupun E-Mail
- Selain menerima pelayanan dengan datang langsung, KPU Kabupaten Karanganyar juga membuka pelayanan permohonan informasi publik secara *online* dengan memanfaatkan website E-PPID dan e-mail resmi KPU kabupaten Karanganyar. Pelayanan secara *online* bermanfaat untuk memudahkan akses layanan informasi publik bagi masyarakat yang terkendala oleh jarak serta meminimalisir perjalanan jauh. Adapun mekanisme permohonan informasi secara *online* telah dipublikasikan di website resmi maupun website E-PPID KPU Kabupaten Karanganyar.



- i. Melaksanakan survey kepuasan layanan PPID melalui instrumen Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) untuk mengetahui indeks kepuasan permohonan informasi, karena sebagian responden merupakan pemohon informasi pada layanan PPID dan mengumumkan hasil survei melalui website, media social dan papan pengumuman.



Pencapaian kinerja atas Permohonan Informasi yang Ditindaklanjuti Melalui PPID sesuai dengan SOP disajikan dalam tabel berikut :

TABEL 3.28
Persentase Permohonan Informasi yang Ditindaklanjuti Melalui PPID sesuai dengan SOP

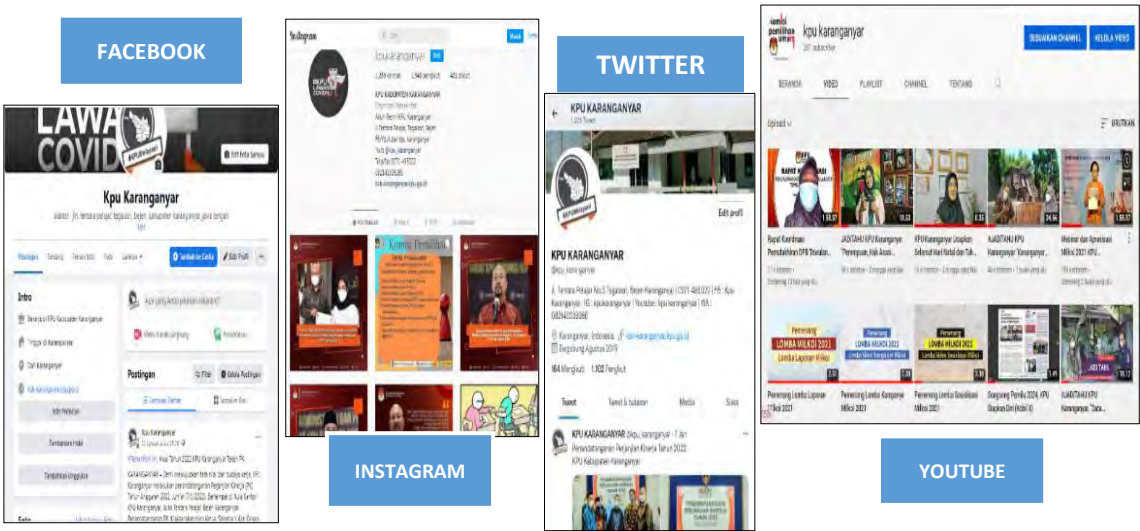
No	Indikator kinerja	2022		Capaian realisasi
		Target	Realisasi	
1	Persentase Permohonan Informasi yang Ditindaklanjuti Melalui PPID sesuai dengan SOP	100 %	100 %	100 %

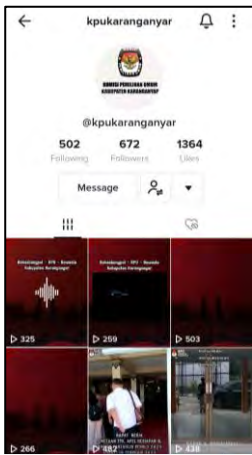
19.Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di laman atau media sosial KPU Kabupaten Karanganyar

Sepanjang tahun 2022 KPU Kabupaten Karanganyar sangat aktif melakukan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan dan informasi kepemiluan melalui media publikasi yang dikelola oleh KPU Kabupaten Karanganyar berupa *website* resmi KPU Kabupaten Karanganyar dan media sosial yakni Facebook, Twitter, Youtube, TikTok dan Instagram.

Dalam era digital seperti sekarang ini, keberadaan *website* maupun media sosial menjadi sarana yang efektif untuk menyampaikan informasi ke masyarakat. Publikasi yang dilakukan diantaranya:

- a. Membuat bahan dan materi publikasi kepeemiluan maupun non kepeemiluan yang menarik dalam bentuk *banner*, infografis, maupun videografi yang dilaksanakan secara rutin dan berkesinambungan;
- b. Publikasi informasi terkait kegiatan tahapan Pemilu serentak Tahun 2024 yang dilaksanakan melalui peliputan, pendokumentasian dan pemberitaan melalui media publikasi website maupun media sosial resmi KPU Kabupaten Karanganyar. Melalui publikasi di media informasi tersebut dapat menjadi sarana bagi masyarakat dalam mengenal lebih dekat KPU Kabupaten Karanganyar sebagai lembaga penyelenggara Pemilu/Pemilihan dan sebagai upaya meningkatkan eksistensi lembaga;
- c. Melakukan *repost* (posting ulang) informasi tentang tahapan Pemilu/Pemilihan dari media sosial resmi milik KPU RI agar dapat disebarluaskan hingga lingkup masyarakat Kabupaten Karanganyar;
- d. Menyusun artikel, ulasan, opini mengenai tahapan pelaksanaan Pemilu/Pemilihan tahun 2024 yang akan datang yang dipublikasikan melalui E-paper KOBIL milik KPU Kabupaten Karanganyar;
- e. Memilah berita terkait tahapan Pemilu/Pemilihan dan informasi kepeemiluan dari website KPU RI untuk diunggah ke dalam menu Berita Nasional di website resmi KPU Kabupaten Karanganyar;
- f. Selain melalui website dan media sosial resmi, KPU Kabupaten Karanganyar juga melakukan publikasi informasi melalui website dan media sosial JDIH KPU Kabupaten Karanganyar untuk menampilkan dokumentasi dan informasi produk hukum.

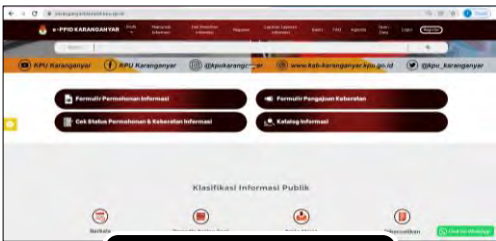




TIKTOK KPU KARANGANYAR



WEBSITE RESMI KPU KARANGANYAR



WEBSITE E-PPID KPU KARANGANYAR



LANAMAN JDIH KPU KARANGANYAR

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan Publikasi Informasi Kepemiluan kepada Masyarakat di atas, KPU Kabupaten Karanganyar berhasil mencapai target kinerja dengan capaian realisasi yang optimal seperti pada tabel berikut :

TABEL 3.29

Persentase Terlaksananya Publikasi Informasi Kepemiluan kepada Masyarakat

No	Indikator kinerja	2022		Capaian realisasi
		Target	Realisasi	
1	Persentase terlaksananya Publikasi Informasi Kepemiluan kepada Masyarakat	100 %	100 %	100 %

20.Terlaksananya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk Masyarakat Umum

Dalam Pemilihan Umum, Partisipasi masyarakat merupakan sebuah hak yang dapat dilakukan oleh perseorangan, kelompok maupun golongan. Keterlibatan masyarakat sangat penting dalam iklim demokrasi di Indonesia. Partisipasi masyarakat dilakukan dengan tujuan menyebarluaskan Informasi Pemilu atau Pemilihan, meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam Pemilu dan Pemilihan, dan meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan.

Partisipasi masyarakat dapat dilaksanakan secara mandiri, terpadu, atau berjejaring. Serta dapat dilakukan melalui kerja sama dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Masyarakat dapat melakukan kegiatan partisipasi melalui sosialisasi, pendidikan politik bagi Pemilih, Survei atau Jajak Pendapat, dan/atau Penghitungan Cepat.

Disamping itu, dalam partisipasi masyarakat KPU dapat mengatur ruang lingkup partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dan evaluasi Pemilu, melaksanakan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat, dan mengikutsertakan pihak-pihak yang dapat berpartisipasi. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melaksanakan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dengan sasaran pemilih, masyarakat umum, media massa, Peserta Pemilu atau Peserta Pemilihan, pengawas Pemilu atau pengawas Pemilihan, pemantau Pemilu atau Pemantau Pemilihan, organisasi kemasyarakatan, masyarakat adat, dan/atau instansi pemerintah.

KPU RI menarget tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu Tahun 2024 meningkat dari target yang ditentukan sebesar 77,5 Persen. Untuk itu berbagai usaha dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dilaksanakan KPU Kabupaten Karanganyar guna mendukung program nasional KPU dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2024.

Berdasarkan hal diatas, KPU Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2022 melaksanakan beberapa kegiatan partisipasi masyarakat di wilayah Kabupaten Karanganyar. Kegiatan partisipasi masyarakat menyasar beberapa segmen antara lain difabel, media, organisasi masyarakat, pemilih pemula, pemuda dan perempuan.

- a. Sosialisasi dan Focus Grup Discussion segmen perempuan dengan tema “Affirmative Action Perempuan” yang diselenggarakan pada 6 Oktober 2022.



- b. Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu 2024 segmen pemilih pemula dan pemuda yang diselenggarakan pada 4 November 2022.



- c. Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula Menjelang Pemilu Tahun 2024 dan Pengukuhan Komite MILKOI 2022 SMA/SMK/MA se-Kabupaten Karanganyar yang dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2022.



- d. Sosialisasi Pendidikan Politik Pemilih Pemula bagi Remaja Disabilitas yang dilaksanakan pada 7 November 2022, bekerja sama dengan Sekolah Luar Biasa Negeri Karanganyar



- e. Sosialisasi Pemilu 2024 “Optimalisasi Peran Kehumasan dan Publikasi dalam Sukseskan Pemilu 2024” dengan melibatkan wartawan/media di wilayah Kabupaten Karanganyar pada tanggal 7 November 2024.



- f. Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sekaligus kegiatan “Apresiasi Penyelenggaraan Milko 2022 bagi SMA/SMK/MA se-Kabupaten Karanganyar” yang di laksanakan pada 4 November 2022.



- g. Sosialisasi Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Karanganyar pada 21 November 2022.

Kegiatan yang diselenggarakan di Hotel Tamansari, Karanganyar tersebut melibatkan Bupati Karanganyar, Juliyatmono beserta Forkompimda, Dinas/instansi terkait, Camat se-Karanganyar, Kepala Desa se-Karanganyar, dan Wartawan. Kegiatan ini merupakan agenda KPU Karanganyar dalam rangka menyosialisasikan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu 2024 kepada *stakeholder*, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan media massa.



Persentase capaian realisasi indikator kinerja Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk Masyarakat Umum dituangkan dalam tabel 3.30 sebagai berikut:

TABEL 3.30

Persentase Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk Masyarakat Umum

No	Indikator kinerja	2022		Capaian realisasi
		Target	Realisasi	
1	Persentase Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk Masyarakat Umum	100 %	100 %	100 %

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pada Tahun Anggaran 2022, KPU Kabupaten Karanganyar menerima alokasi pagu anggaran sebesar Rp 3.328.810.000. Sedangkan realisasi anggaran s.d 31 Desember 2022 sebesar Rp 3.311.231.064 dengan persentase sebesar 99,62% dari total pagu anggaran. Berdasarkan tingkat capaian kinerja maupun capaian realisasi anggaran yang telah dicapai menunjukkan kerja keras, upaya yang sungguh-sungguh serta sebagai wujud konsistensi dan komitmen bersama seluruh personil KPU Kabupaten Karanganyar sepanjang tahun 2022.

Adapun Laporan Akuntabilitas Keuangan KPU Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 masing-masing sasaran kegiatan dan indikator kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan Tahun Anggaran 2022 disajikan dalam tabel 3.31 sebagai berikut :

TABEL 3.31

Target dan Realisasi Capaian Kinerja KPU Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2022

KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu (6709)							
Terlaksananya pengelolaan perencanaan program dan anggaran Pemilu	Jumlah satker yang mampu merencanakan dan menganggarkan Pemilu dengan tepat	1 lembaga	1 lembaga	100	333.476.000	317.558.696	95.23
Terlaksananya pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu Adhoc	Jumlah satker yang mempersiapkan pembentukan atau seleksi Badan Penyelenggara Pemilu Adhoc	1 lembaga	1 lembaga	100	122.754.000	117.443.162	95.67

KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
Terlaksananya fasilitasi persiapan seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah satker yang memfasilitasi seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota	1 lembaga	1 lembaga	100	1.000.000	0	0
Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Jumlah satker yang ikut dalam penyelenggaraan diklat teknis Pemilu/Pemilihan dan Diklat Pengamanan	1 lembaga	1 lembaga	100	14.365.000	13.505.000	94.01
Terlaksananya pemutakhiran data pemilih	Jumlah satker yang melakukan pemutakhiran data Pemilih sesuai ketentuan	1 lembaga	1 lembaga	100	18.708.000	17.011.182	90.93
Terlaksananya sosialisasi, penyuluhan dan bimbingan teknis Tahapan Pemilu	Jumlah satker yang melaksanakan Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Tahapan Pemilu	1 lembaga	1 lembaga	100	166.784.000	154.417.737	92.59
Terfasilitasinya penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	Jumlah satker yang melaksanakan penyusunan dan inventarisasi isu strategis Peraturan KPU serta Sosialisasi Peraturan KPU	1 lembaga	1 lembaga	100	53.032.000	39.107.250	73.74
Terfasilitasinya sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi	Jumlah satker yang mampu memfasilitasi sarana bidang teknologi Informasi dan Komunikasi	1 unit	1 unit	100	98.358.000	97.880.000	99.51
Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Peserta Pemilu (6710)							
Terlaksananya proses layanan pendaftaran, verifikasi dan penetapan Parpol peserta Pemilu Tahun 2024	Jumlah satker yang melaksanakan proses administrasi layanan pendaftaran dan verifikasi Parpol peserta Pemilu sesuai ketentuan yang berlaku	1 lembaga	1 lembaga	100	498.625.000	487.108.748	97.69
Terselesaikannya Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu aikannya	Jumlah satker yang dapat melaksanakan advokasi dan penyelesaian	1 lembaga	1 lembaga	100	65.748.000	38.658.628	58.80



KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
	sengketa penetapan Parpol peserta Pemilu						
Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih (6887)							
Terfasilitasinya Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih	Jumlah satker yang melaksanakan Persiapan Pemutakhiran Data Pemilih	1 lembaga	1 lembaga	100	23.528.000	18.736.100	79.63
Terwujudnya Pemutakhiran Data Pemilih	Jumlah satker yang melaksanakan proses Pemutakhiran Data Pemilih tepat waktu dan sesuai ketentuan	1 lembaga	1 lembaga	100	33.280.000	31.892.500	95.83
Terlaksananya penetapan Data Pemilih	Jumlah satker yang melaksanakan penetapan Data Pemilih	1 lembaga	1 lembaga	100	1.000.000	0	0
Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan (6889)							
Terlaksananya fasilitasi kesiapan penyusunan jumlah kursi dan Daerah Pemilihan Pemilu Tahun 2024	Jumlah satker yang mampu memfasilitasi persiapan penyusunan jumlah kursi dan Daerah Pemilihan Pemilu Tahun 2024	1 lembaga	1 lembaga	100	121.780.000	109.935.943	90.27
Terlaksananya proses penyusunan jumlah kursi dan Daerah Pemilihan Pemilu Tahun 2024	Jumlah satker yang melaksanakan proses penyusunan jumlah kursi dan penetapan Daerah Pemilihan sesuai dengan ketentuan	1 lembaga	1 lembaga	100	79.600.000	66.824.000	83.95
Terlaksananya evaluasi penyusunan jumlah kursi dan Daerah Pemilihan Pemilu Tahun 2024	Jumlah satker yang evaluasi penyusunan jumlah kursi dan Daerah Pemilihan Pemilu Tahun 2024	1 lembaga	1 lembaga	100	1.000.000	0	0
Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (6890)							
Terfasilitasi kesiapan Pencalonan Pemilu Tahun 2024	Jumlah satker yang memfasilitasi kesiapan Pencalonan Pemilu Tahun 2024	1 lembaga	1 lembaga	100	23.848.000	7.334.000	19.80



KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
Terlaksananya proses Pencalonan Pemilu Tahun 2024	Jumlah satker yang mampu melaksanakan proses tahapan pencalonan Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan	1 lembaga	1 lembaga	100	39.450.000	26.100.000	38.28
Terlaksananya evaluasi Pencalonan Pemilu Tahun 2024 di Tahun 2022	Jumlah satker yang melaksanakan evaluasi Pencalonan Pemilu Tahun 2024	1 lembaga	1 lembaga	100	1.000.000	0	0
Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (3355)							
Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan yang tepat waktu	Jumlah layanan dalam menyelesaikan permasalahan satker yang mengalami pagu minus belanja gaji dan tunjangan pegawai	1 Layanan	1 Layanan	100	2.717.538.000	2.714.240.148	99.83
Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana (3360)							
Terpenuhinya dukungan fasilitasi kegiatan KPU	Jumlah layanan prasarana internal kantor yang dapat difasilitasi dengan baik	1 Layanan	1 Layanan	100	52.224.000	51.865.250	99.31
Terfasilitasinya layanan operasional dan pemeliharaan kantor	Jumlah layanan operasional dan pemeliharaan kantor yang dapat difasilitasi dengan baik	1 Layanan	1 Layanan	100	409.272.000	407.921.182	99.58
Data dan Informasi (6634)							
Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Jumlah layanan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100	7.220.000	7.113.000	92.29
TOTAL		23	23	100	4.912.996.000	4.742.806.526	96,54



LAPORAN KINERJA **KOMISI PEMILIHAN UMUM** **KABUPATEN KARANGANYAR** **TAHUN 2022**



BAB IV **PENUTUP**

BAB IV PENUTUP

Pada Tahun 2022 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar telah menetapkan 23 (dua puluh tiga) indikator kinerja dari 8 (delapan) kegiatan, sebagaimana tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022 dan Penetapan Kinerja Tahun 2022. Dalam penyusunan Laporan Kinerja ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar menggunakan prinsip transparansi, maka disusunlah Laporan Kinerja sesuai dengan kegiatannya.

KPU Kabupaten Karanganyar pada Tahun Anggaran 2022 ini, mampu menyerap anggaran secara optimal yakni sebesar 96,54% dari total pagu anggaran sebesar Rp.4.912.996.000 (Empat milyar sembilan ratus dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yaitu sebesar Rp 4.742.806.526 (Empat milyar tujuh ratus empat puluh dua juta delapan ratus enam ribu lima ratus dua puluh enam rupiah). KPU Kabupaten Karanganyar mampu melaksanakan seluruh kegiatan yang telah direncanakan di awal tahun, sehingga dari seluruh target yang ditetapkan di awal tahun sebesar 100%, KPU Kabupaten Karanganyar mampu melaksanakan kegiatan sebesar 100% atau dengan kategori capaian "Baik".

Hasil yang diperoleh ini tentu tidak terlepas dari dukungan seluruh pihak yang ada di lingkungan KPU Kabupaten Karanganyar. Namun demikian, keberhasilan yang dicapai KPU Kabupaten Karanganyar tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang di jumpai, baik bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini di antisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas kendala/hambatan yang di jumpai, sehingga diketahui penyebab timbulnya hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja. Menyadari hal tersebut, KPU Kabupaten Karanganyar telah mempersiapkan strategi-strategi pemecahannya, sehingga tahun-tahun mendatang hambatan-hambatan tersebut dapat diminimalisir. Strategi yang akan ditempuh oleh KPU Kabupaten Karanganyar terkait dengan pencapaian target sasaran strategis, program dan kegiatan di tahun mendatang dalam meningkatkan kinerja antara lain :

1. Melakukan pencermatan dan perhitungan kebutuhan anggaran serta rencana penarikan dana selama 1 (satu) tahun dan melakukan koordinasi dengan sub bagian terkait dalam pengelolaan anggaran;
2. Menyusun matrik rencana kegiatan setiap bulan dan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kegiatan yang belum terlaksana maupun anggaran yang belum terserap;
3. Melakukan evaluasi terhadap semua unsur layanan di KPU Kabupaten Karanganyar dengan melakukan identifikasi dan analisis terhadap unsur layanan yang perlu ditingkatkan atau dilakukan perbaikan Standar Operasional Prosedur (SOP);
4. Mengoptimalkan semua potensi yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Karanganyar baik Sumber Daya Manusia maupun sarana dan prasarana yang ada;

5. Mengoptimalkan publikasi informasi melalui media *online* dan meningkatkan kreativitas dalam penyusunan bahan/materi publikasi informasi;
6. Menjalin koordinasi dengan Dinas/Instansi/Lembaga terkait secara intensif;
7. Memaksimalkan tugas personil Tim Pelaksana Kegiatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Karanganyar.

Dari data keberhasilan capaian target kinerja tersebut diharapkan dapat menjadi pemacu semangat dan motivasi KPU Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga visi dan misi KPU Kabupaten Karanganyar dapat terwujud guna mendukung tercapainya Visi dan Misi KPU sebagaimana telah dijabarkan dalam Rencana Strategis KPU 2020-2024. Koordinasi dan kerja sama dengan berbagai instansi terkait masih tetap diperlukan untuk mewujudkan kinerja yang lebih baik lagi di tahun mendatang, hal itu merupakan sebuah keberhasilan yang dicapai oleh KPU Kabupaten Karanganyar.

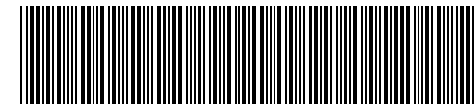
Diharapkan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Namun kami menyadari bahwa Laporan Kinerja ini masih belum memenuhi harapan, untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan demi perbaikan untuk tahun yang akan datang.



LAPORAN KINERJA **KOMISI PEMILIHAN UMUM** **KABUPATEN KARANGANYAR** **TAHUN 2022**



LAMPIRAN



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : SP DIPA- 076.01.2.657520/2022**

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 6 Tahun 2021 tentang APBN TA 2022

Revisi ke 14

Tanggal : 20 Desember 2022

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
2. Unit Organisasi : (01) Komisi Pemilihan Umum
3. Provinsi : (03) JAWA TENGAH
4. Kode>Nama Satker : (657520) KPU KABUPATEN KARANGANYAR
- Sebesar : Rp. 4.912.996.000 (EMPAT MILIAR SEMBILAN RATUS DUA BELAS JUTA SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH ENAM RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

01 PELAYANAN UMUM

01.01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	4.912.996.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN S R A G E N (162) Rp. 4.912.996.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Jakarta, 17 November 2021
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 076.01.2.657520/2022



Satker : (657520) KPU KABUPATEN KARANGANYAR

CQ	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp.	1.726.742.000
CQ.6709	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	Rp.	837.883.000
CQ.6710	Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Peserta Pemilu	Rp.	564.373.000
CQ.6887	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemlih	Rp.	57.808.000
CQ.6889	Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	Rp.	202.380.000
CQ.6890	Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	Rp.	64.298.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	3.186.254.000
WA.3355	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Rp.	2.717.538.000
WA.3360	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Rp.	461.496.000
WA.6634	Data dan Informasi	Rp.	7.220.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 076.01.2.657520/2022
I A. INFORMASI KINERJA

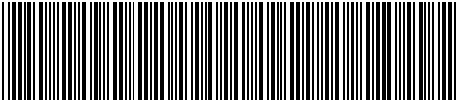


Kementerian Negara/Lembaga : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : (01) Komisi Pemilihan Umum
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode>Nama Satker : (657520) KPU KABUPATEN KARANGANYAR

Halaman : I A. 1

Program	:	076.01.CQ	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi				1.726.742.000
Kegiatan	:	6709	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu				837.883.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu memfasilitasi pengelolaan perencanaan program dan anggaran Pemilu				
		2. 02	Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu memfasilitasi penyusunan dan penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu				
		3. 03	Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu merencanakan, membangun, dan mengembangkan sarana dan prasarana IT Pemilu				
Klasifikasi Rincian Output 1	:	6709.QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum		8,00	Lembaga	739.525.000
Rincian Output	:	01	QGE.001 Perencanaan dan Penganggaran Pemilu (PN)		1,00	Lembaga	333.476.000
		02	QGE.002 Pembentukan/Seleksi Badan Penyelenggara Adhok Pemilu (PN)		1,00	Lembaga	122.754.000
		03	QGE.003 Fasilitasi Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (PN)		1,00	Lembaga	1.000.000
		04	QGE.004 Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan (PN)		1,00	Lembaga	14.365.000
		05	QGE.005 Pemutakhiran Data Pemilih (PN)		1,00	Lembaga	18.708.000
		06	QGE.006 Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan (PN)		1,00	Lembaga	166.784.000
		07	QGE.007 Penyusunan Peraturan Pemilu (PN)		1,00	Lembaga	53.032.000
		08	QGE.008 Logistik Pemilu (PN)		1,00	Lembaga	29.406.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	6709.RAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi		1,00	Unit	98.358.000
Rincian Output	:	01	RAN.001 Sarana IT Pemilu (PN)		1,00	Unit	98.358.000
Kegiatan	:	6710	Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Peserta Pemilu				564.373.000
	:						
Klasifikasi Rincian Output 3	:	6710.QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum		2,00	Lembaga	564.373.000
Rincian Output	:	01	QGE.001 Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu (PN)		1,00	Lembaga	498.625.000
		02	QGE.002 Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu (PN)		1,00	Lembaga	65.748.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 076.01.2.657520/2022
I A. INFORMASI KINERJA

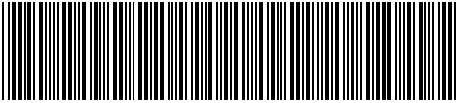


DS:5090-0382-6901-2435

Kementerian Negara/Lembaga : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : (01) Komisi Pemilihan Umum
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode>Nama Satker : (657520) KPU KABUPATEN KARANGANYAR

Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum						Lembaga	
Kegiatan	:	6887	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemlih				57.808.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:						
Klasifikasi Rincian Output	4	:	6887.QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum		3,00	Lembaga 57.808.000
Rincian Output	:	01	QGE.001	Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih	(PN)	1.00	23.528.000
		02	QGE.002	Pemutakhiran Data Pemilih	(PN)	1.00	33.280.000
		03	QGE.003	Penetapan Data Pemilih	(PN)	1.00	1.000.000
Kegiatan	:	6889	Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan				202.380.000
	:						
Klasifikasi Rincian Output	5	:	6889.QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum		3,00	Lembaga 202.380.000
Rincian Output	:	01	QGE.001	Fasilitasi Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	(PN)	1.00	121.780.000
		02	QGE.002	Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	(PN)	1.00	79.600.000
		03	QGE.003	Evaluasi Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	(PN)	1.00	1.000.000
Kegiatan	:	6890	Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota				64.298.000
	:						
Klasifikasi Rincian Output	6	:	6890.QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum		3,00	Lembaga 64.298.000
Rincian Output	:	01	QGE.001	Fasilitasi Kesiapan Kegiatan Pencalonan	(PN)	1.00	23.848.000
		02	QGE.002	Pelaksanaan Proses Pencalonan	(PN)	1.00	39.450.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 076.01.2.657520/2022
I A. INFORMASI KINERJA

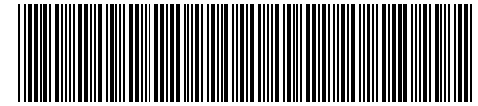


DS:5090-0382-6901-2435

Kementerian Negara/Lembaga : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : (01) Komisi Pemilihan Umum
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode>Nama Satker : (657520) KPU KABUPATEN KARANGANYAR

Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum				Lembaga		
	03	QGE.003	Evaluasi Pencalonan	(PN)	1.00	1.000.000
Program	:	076.01.WA	Program Dukungan Manajemen			3.186.254.000
Kegiatan	:	3355	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara			2.717.538.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah draft juklak/juknis pengelolaan keuangan di lingkungan KPU			
		2. 01	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan			
		3. 01	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan			
		4. 01	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid			
		5. 01	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan			
		6. 01	Persentase satker yang menyelesaikan Pembayaran Gaji dan Tunjangan pegawai tepat waktu			
Klasifikasi Rincian Output	1 :	3355.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1,00	Layanan	2.717.538.000
Rincian Output	:	01	EBA.994 Layanan Perkantoran	1.00	Layanan	2.717.538.000
Kegiatan	:	3360	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana			461.496.000
	:	1. 01	Jumlah rancangan Peraturan KPU/ Keputusan KPU tentang kearsipan yang telah disusun			
		2. 01	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material			
		3. 01	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi			
		4. 01	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat			
		5. 01	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik			
		6. 02	Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK			
		7. 02	Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja			
		8. 02	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan			

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 076.01.2.657520/2022
I A. INFORMASI KINERJA



DS:5090-0382-6901-2435

Kementerian Negara/Lembaga : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : (01) Komisi Pemilihan Umum
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode>Nama Satker : (657520) KPU KABUPATEN KARANGANYAR

Halaman : I A. 4

Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana

9. 02 Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik
10. 03 Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik

Klasifikasi Rincian Output	2	:	3360.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2,00	Layanan	461.496.000
Rincian Output		:	01 EBA.962	Dukungan Fasilitas Kegiatan KPU	1.00	Layanan	52.224.000
		:	02 EBA.994	Layanan Perkantoran	1.00	Layanan	409.272.000
Kegiatan		:	6634	Data dan Informasi			7.220.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:					
Klasifikasi Rincian Output	3	:	6634.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1,00	Layanan	7.220.000
Rincian Output		:	01 EBA.963	Layanan Data dan Informasi	1.00	Layanan	7.220.000

Jakarta, 17 November 2021
Sekretaris Jenderal
Komisi Pemilihan Umum

ttd.
Bernad Dermawan Sutrisno
NIP 197410051993011001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 076.01.2.657520/2022
I B. SUMBER DANA

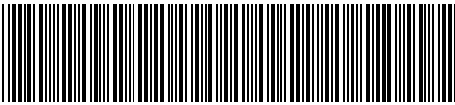


Kementerian Negara/Lembaga : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : (01) Komisi Pemilihan Umum
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode>Nama Satker : (657520) KPU KABUPATEN KARANGANYAR

			Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2022	Rp.	4.912.996.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp. 0
1. Rupiah Murni	Rp.	4.912.996.000		(2) RPLN	US\$	0 Rp. 0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0 Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0
						(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 076.01.2.657520/2022
II. RINCIAN PENGELUARAN



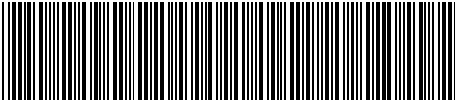
DS:5090-0382-6901-2435

Kementerian Negara/Lembaga : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : (01) Komisi Pemilihan Umum
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode>Nama Satker : (657520) KPU KABUPATEN KARANGANYAR
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
657520	KPU KABUPATEN KARANGANYAR	2.717.538	2.103.458	92.000	-	-	4.912.996	03 . 28	
076.01.CQ	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	-	1.634.742	92.000	-	-	1.726.742		
6709	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	-	745.883	92.000	-	-	837.883		
6709.QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum (03.28 JAWA TENGAH / KAB. KARANGANYAR)	-	739.525	-	-	-	739.525		
01 RM		-	739.525	-	-	-	739.525		
6709.RAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (03.28 JAWA TENGAH / KAB. KARANGANYAR)	-	6.358	92.000	-	-	98.358		
01 RM		-	6.358	92.000	-	-	98.358		
6710	Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Peserta Pemilu	-	564.373	-	-	-	564.373		
6710.QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum (03.28 JAWA TENGAH / KAB. KARANGANYAR)	-	564.373	-	-	-	564.373		
01 RM		-	564.373	-	-	-	564.373		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 076.01.2.657520/2022
II. RINCIAN PENGELUARAN



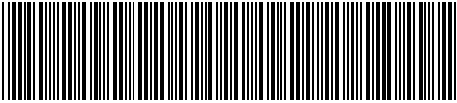
DS:5090-0382-6901-2435

Kementerian Negara/Lembaga : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : (01) Komisi Pemilihan Umum
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode/Nama Satker : (657520) KPU KABUPATEN KARANGANYAR
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6887	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemlih	-	57.808	-	-	-	57.808	03 . 28	
	6887.QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum (03.28 JAWA TENGAH / KAB. KARANGANYAR)	-	57.808	-	-	-	57.808		
01	RM	-	57.808	-	-	-	57.808	162	
6889	Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	-	202.380	-	-	-	202.380	03 . 28	
6889.QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum (03.28 JAWA TENGAH / KAB. KARANGANYAR)	-	202.380	-	-	-	202.380			
01	RM	-	202.380	-	-	-	202.380	162	
6890	Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	-	64.298	-	-	-	64.298	03 . 28	
6890.QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum (03.28 JAWA TENGAH / KAB. KARANGANYAR)	-	64.298	-	-	-	64.298			
01	RM	-	64.298	-	-	-	64.298	162	
076.01.WA	Program Dukungan Manajemen	2.717.538	468.716	-	-	-	3.186.254		
3355	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	2.717.538	-	-	-	-	2.717.538		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 076.01.2.657520/2022
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:5090-0382-6901-2435

Kementerian Negara/Lembaga : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : (01) Komisi Pemilihan Umum
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode>Nama Satker : (657520) KPU KABUPATEN KARANGANYAR
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 3
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3355.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (03.28 JAWA TENGAH / KAB. KARANGANYAR)	2.717.538	-	-	-	-	2.717.538	03 . 28	
01 RM		2.717.538	-	-	-	-	2.717.538	162	
3360	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	-	461.496	-	-	-	461.496		
3360.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (03.28 JAWA TENGAH / KAB. KARANGANYAR)	-	461.496	-	-	-	461.496	03 . 28	
01 RM		-	461.496	-	-	-	461.496	162	
6634	Data dan Informasi	-	7.220	-	-	-	7.220		
6634.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (03.28 JAWA TENGAH / KAB. KARANGANYAR)	-	7.220	-	-	-	7.220	03 . 28	
01 RM		-	7.220	-	-	-	7.220	162	
JUMLAH		2.717.538	2.103.458	92.000	-	-	4.912.996		

Jakarta, 17 November 2021
Sekretaris Jenderal
Komisi Pemilihan Umum

ttd.
Bernad Dermawan Sutrisno
NIP 197410051993011001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 076.01.2.657520/2022
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



Kementerian Negara/Lembaga : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : (01) Komisi Pemilihan Umum
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode>Nama Satker : (657520) KPU KABUPATEN KARANGANYAR

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	657520	KPU KABUPATEN KARANGANYAR													
		RENCANA PENARIKAN DANA	133.279	230.056	261.715	414.866	230.974	279.765	418.327	371.307	325.970	374.495	920.566	951.677	4.912.996
		BELANJA PEGAWAI	133.279	208.437	205.762	359.414	208.312	206.092	360.602	203.985	201.371	208.549	196.687	225.047	2.717.538
		BELANJA BARANG	0	21.619	55.953	55.452	22.662	73.672	57.725	167.321	124.598	165.946	631.878	726.631	2.103.458
		BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92.000	0	92.000
076.01.CQ.6709		Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	0	0	0	0	0	7.635	2.061	34.840	29.516	103.781	361.796	298.255	837.883
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	0	0	0	0	7.635	2.061	34.840	29.516	103.781	269.796	298.255	745.883
		53 BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92.000	0	92.000
076.01.CQ.6710		Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Peserta Pemilu	0	0	0	0	0	0	18.157	29.495	62.328	25.959	247.412	181.023	564.373
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	0	0	0	0	0	18.157	29.495	62.328	25.959	247.412	181.023	564.373
076.01.CQ.6887		Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.995	23.870	23.943	57.808
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.995	23.870	23.943	57.808
076.01.CQ.6889		Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.750	157.630	202.380
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.750	157.630	202.380
076.01.CQ.6890		Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.200	47.098	64.298

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 076.01.2.657520/2022
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



Kementerian Negara/Lembaga : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : (01) Komisi Pemilihan Umum
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode>Nama Satker : (657520) KPU KABUPATEN KARANGANYAR

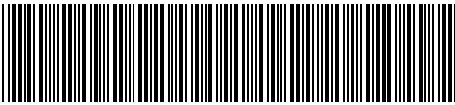
Halaman : III. 2
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	076.01.WA.3355	DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota													
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.200	47.098	64.298
		Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	133.279	208.437	205.762	359.414	208.312	206.092	360.602	203.985	201.371	208.549	196.687	225.047	2.717.538
	076.01.WA.3360	51 BELANJA PEGAWAI	133.279	208.437	205.762	359.414	208.312	206.092	360.602	203.985	201.371	208.549	196.687	225.047	2.717.538
		Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	0	21.619	53.653	53.852	22.662	66.037	34.745	102.986	32.755	26.212	28.850	18.125	461.496
	076.01.WA.6634	52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	21.619	53.653	53.852	22.662	66.037	34.745	102.986	32.755	26.212	28.850	18.125	461.496
		Data dan Informasi	0	0	2.300	1.600	0	0	2.763	0	0	0	0	557	7.220
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	0	2.300	1.600	0	0	2.763	0	0	0	0	557	7.220

Jakarta, 17 November 2021
Sekretaris Jenderal
Komisi Pemilihan Umum

ttd.
Bernad Dermawan Sutrisno
NIP 197410051993011001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 076.01.2.657520/2022
IV A. B L O K I R



DS:5090-0382-6901-2435

Kementerian Negara/Lembaga : [076] KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : [01] Komisi Pemilihan Umum
Provinsi : [03] JAWA TENGAH
Kode dan Nama Satker : [657520] KPU KABUPATEN KARANGANYAR

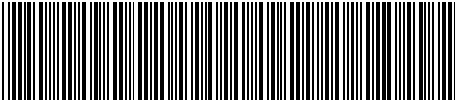
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 17 November 2021
Sekretaris Jenderal
Komisi Pemilihan Umum

ttd.
Bernad Dermawan Sutrisno
NIP 197410051993011001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 076.01.2.657520/2022
IV B. C A T A T A N



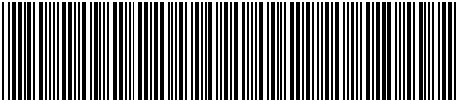
DS:5090-0382-6901-2435

Kementerian Negara/Lembaga : [076] KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : [01] Komisi Pemilihan Umum
Provinsi : [03] JAWA TENGAH
Kode dan Nama Satker : [657520] KPU KABUPATEN KARANGANYAR

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
657520	KPU KABUPATEN KARANGANYAR		
076.01.CQ	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi		
6709	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu		
6709.QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum Rp. 503.582		
521111	Belanja Keperluan Perkantoran Rp. 4.400	524119	* Tambahan SABA BUN Tahapan 2022 Rp. 8.510
521211	Belanja Bahan Rp. 1.150		* Tambahan SABA BUN Tahapan 2022 Rp. 99.855
	* Tambahan SABA BUN Tahapan 2022 Rp. 7.639		* Tambahan SABA BUN Tahapan 2022 Rp. 3.978
	* Tambahan SABA BUN Tahapan 2022 Rp. 14.225		* Tambahan SABA BUN Tahapan 2022 Rp. 10.800
	* Tambahan SABA BUN Tahapan 2022 Rp. 5.640	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
	* Tambahan SABA BUN Tahapan 2022 Rp. 1.950		* Tambahan SABA BUN Tahapan 2022 Rp. 9.862
	* Tambahan SABA BUN Tahapan 2022 Rp. 5.042	6709.RAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Rp. 92.000
522151	Belanja Jasa Profesi Rp. 1.000	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 92.000
	* Tambahan SABA BUN Tahapan 2022 Rp. 4.000	6710	Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Peserta Pemilu
522191	Belanja Jasa Lainnya Rp. 24.300	6710.QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum Rp. 304.672
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp. 200.000	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 18.746		* Tambahan SABA BUN Tahapan 2022 Rp. 7.960
	* Tambahan SABA BUN Tahapan 2022 Rp. 19.555	521211	Belanja Bahan Rp. 13.361
	* Tambahan SABA BUN Tahapan 2022 Rp. 20.020		* Tambahan SABA BUN Tahapan 2022 Rp. 3.595
	* Tambahan SABA BUN Tahapan 2022 Rp. 9.020		* Tambahan SABA BUN Tahapan 2022 Rp. 11.220
	* Tambahan SABA BUN Tahapan 2022 Rp. 12.340		* Tambahan SABA BUN Tahapan 2022 Rp. 38.401
	* Tambahan SABA BUN Tahapan 2022 Rp. 13.900	521213	Belanja Honor Output Kegiatan Rp. 33.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 7.650	522111	Belanja Langganan Listrik Rp. 9.260
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	522151	Belanja Jasa Profesi Rp. 1.000
			* Tambahan SABA BUN Tahapan 2022 Rp. 19.500
		522191	Belanja Jasa Lainnya Rp. 19.500
			* Tambahan SABA BUN Tahapan 2022 Rp. 18.000
		523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp. 18.000
			* Tambahan SABA BUN Tahapan 2022 Rp. 24.930
		524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 24.930
			* Tambahan SABA BUN Tahapan 2022 Rp. 24.930

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 076.01.2.657520/2022
IV B. C A T A T A N



DS:5090-0382-6901-2435

Kementerian Negara/Lembaga : [076] KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : [01] Komisi Pemilihan Umum
Provinsi : [03] JAWA TENGAH
Kode dan Nama Satker : [657520] KPU KABUPATEN KARANGANYAR

Halaman : IV.B. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota * Tambahan SABA BUN Tahapan 2022 * Tambahan SABA BUN Tahapan 2022	524119	* Tambahan SABA BUN Tahapan 2022 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota * Tambahan SABA BUN Tahapan 2022
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota * Tambahan SABA BUN Tahapan 2022 * Tambahan SABA BUN Tahapan 2022	6890	Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota * Tambahan SABA BUN Tahapan 2022	6890.QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum
6887	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemlih	521211	Belanja Bahan * Tambahan SABA BUN Tahapan 2022
6887.QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	521213	Belanja Honor Output Kegiatan * Tambahan SABA BUN Tahapan 2022
521211	Belanja Bahan * Tambahan SABA BUN Tahapan 2022	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi * Tambahan SABA BUN Tahapan 2022
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa * Tambahan SABA BUN Tahapan 2022 * Tambahan SABA BUN Tahapan 2022	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa * Tambahan SABA BUN Tahapan 2022
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota * Tambahan SABA BUN Tahapan 2022	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota * Tambahan SABA BUN Tahapan 2022
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota * Tambahan SABA BUN Tahapan 2022		
6889	Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan		
6889.QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum		
521211	Belanja Bahan * Tambahan SABA BUN Tahapan 2022		
521213	Belanja Honor Output Kegiatan * Tambahan SABA BUN Tahapan 2022		
522151	Belanja Jasa Profesi * Tambahan SABA BUN Tahapan 2022		
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa * Tambahan SABA BUN Tahapan 2022		
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota		

Jakarta, 17 November 2021
Sekretaris Jenderal
Komisi Pemilihan Umum

ttd.
Bernad Dermawan Sutrisno
NIP 197410051993011001



RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) (Perubahan)

Unit Organisasi : KPU Kabupaten Karanganyar

Tahun : 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Sistem Informasi Mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas di KPU Kabupaten Karanganyar	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada Publik	100 %
2.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kabupaten Karanganyar yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi	B
3.	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan Sumber Daya Manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	100%
4.	Pembentukan dan Evaluasi Badan Penyelenggara Adhoc	Persentase Badan Adhoc yang dibentuk dan dievaluasi	100%
5.	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih tepat waktu	100%
6.	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan E-government di KPU Kabupaten Karanganyar	Persentase sarana dan prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%
7.	Terwujudnya dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran Tugas KPU Kabupaten Karanganyar	Persentase sarana transportasi, gedung dan gudang KPU Kabupaten Karanganyar yang berfungsi dengan baik	100 %
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja Satker KPU Kabupaten Karanganyar yang berfungsi dengan baik	100 %
8.	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Karanganyar yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	4 kali
9.	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100 %
		Persentase target kinerja KPU Kabupaten Karanganyar yang tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja	100 %
10.	Meningkatnya penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	Persentase penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan oleh KPU Kabupaten Karanganyar	100 %
11.	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu oleh KPU Kabupaten Karanganyar	1 Laporan
12.	Tersusunnya laporan	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban	1 Laporan

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	
13.	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya Sesuai dengan Data SAK	1 Laporan
14.	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase arsip yang dikelola sesuai jadwal retensi arsip oleh KPU Kabupaten Karanganyar	100%
15.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Karanganyar	Persentase ketaatan KPU Kabupaten/Kota dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu	100%
16.	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola, didokumentasikan dan disajikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%
17.	Terlaksananya pendaftaran dan verifikasi Partai Politik Pemilu Tahun 2024	Persentase terlaksananya pendaftaran dan verifikasi Partai Politik Pemilu Tahun 2024 sesuai ketentuan yang berlaku	100%
18.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu Sesuai Tahapan dan Jadwal	Persentase pemutakhiran data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100%
19.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di laman atau media sosial KPU Kabupaten Karanganyar	100%
20.	Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum	Persentase terlaksananya kegiatan Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk masyarakat umum yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Karanganyar	100%

Karanganyar, 30 September 2022

KETUA KPU KAB. KARANGANYAR



TRIASTUTI SURYANDARI



RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
(Perubahan)

Unit Organisasi : Sekretariat KPU Kabupaten Karanganyar
Tahun : 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Perencanaan Program dan Anggaran serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu		
	Tersedianya dokumen perencanaan program dan anggaran	Jumlah lembaga yang melaksanakan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran serta pengelolaan program, kegiatan dan anggaran	1 Layanan
2.	Terlaksananya Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan		
	Terlaksananya pendaftaran dan verifikasi Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024	Persentase terlaksananya pendaftaran dan verifikasi Partai Politik peserta Pemilu sesuai ketentuan yang berlaku	100%
	Terlaksananya penyusunan jumlah kursi dan Daerah Pemilihan pada Pemilu Tahun 2024	Persentase pemutakhiran data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100%
3.	Terlaksananya Pembinaan SDM dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian		
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan SDM	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	100%
	Pembentukan dan Evaluasi Badan Penyelenggara Adhoc	Persentase Badan Adhoc yang dibentuk dan dievaluasi	100%
4.	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara		
	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan yang tepat waktu	Jumlah layanan dalam menyelesaikan permasalahan satker yang mengalami pagu minus belanja gaji dan tunjangan pegawai	1 Layanan
	Terlaksananya penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	1 Laporan
	Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	1 Laporan
5.	Penyelenggaraan operasional perkantoran dan dukungan Sarana Prasarana		
	Terfasilitasinya layanan perkantoran	Jumlah layanan operasional dan pemeliharaan kantor, kearsipan, pengamanan, protokoler, dan persidangan yang dapat difasilitasi dengan baik	1 Layanan
	Terlaksananya pengelolaan Barang Milik Negara	Jumlah laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya telah sesuai dengan data SAK	1 Laporan

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Terfasilitasinya layanan sarana dan prasarana internal	Jumlah unit dukungan sarana dan prasarana kantor yang dapat berfungsi dengan baik	1 Unit
6.	Terfasilitasinya layanan data dan informasi		
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase terlaksananya Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang tepat waktu	100%
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi	Jumlah unit sarana dan prasarana teknologi informasi yang aman, handal dan lancar	1 Unit
7.	Penyiapan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan		
	Tersusunnya Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar sesuai dengan kerangka regulasi KPU	Persentase Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar yang disusun dan sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase informasi produk hukum yang dikelola, didokumentasikan, disajikan sesuai peraturan atau SOP	100%
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Karanganyar	Persentase ketaatan KPU Kabupaten Karanganyar dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu	100%
8.	Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di laman atau media sosial KPU Kabupaten Karanganyar	100%
	Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum	Persentase terlaksananya kegiatan Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk masyarakat umum	100%

Karanganyar, 30 September 2022

SEKRETARIS KPU KAB. KARANGANYAR


MASYKUR

RENCANA AKSI KINERJA

NAMA LEMBAGA : KPU KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN : 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN				PELAKSANA
					T1	T2	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Terwujudnya Sistem Informasi Mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas di KPU Kabupaten Karanganyar	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada Publik	100%	Melakukan Sosialisasi PKPU Tahapan Kepada Stakeholder. Partai Politik, Toga dan Tomas					Sub Bagian Hukum dan SDM, Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parhubmas
2.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kabupaten Karanganyar yang berkualitas	Persentase terlaksananya Keterbukaan Informasi Publik KPU Kabupaten Karanganyar	100%	a. Menyusun Daftar Informasi publik Tahun 2022 b. Melakukan Penataan dan pengelolaan laman resmi dan E-PPID					Sub Bagian Hukum Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parhubmas, Sub Bagian Renda
3.	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan Sumber Daya Manusia	Presentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	100%	a. Menerbitkan SK KGB ASN secara tertib dan tepat waktu b. Mengusulkan kenaikan pangkat ASN c. Melakukan supervisi penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai					Sub Bagian KUL
4.	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang tepat waktu	100%	a. Melakukan koordinasi dengan stakeholder/dinas/instansi b. Melaksanakan rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan setiap bulan c. Mengunggah hasil DPB ke Sidalih Berkelanjutan					Sub Bagian Rendatin
5.	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan E-government di KPU Kabupaten Karanganyar	Persentase sarana dan prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	a. Melakukan pemeliharaan terhadap jaringan internet dan perangkat IT b. Pengelolaan Sistem Informasi yang dimiliki (SIDATAN) c. Backup data laman resmi secara berkala					Sub Bagian Rendatin
6.	Terwujudnya dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran Tugas KPU Kabupaten Karanganyar	Persentase sarana transportasi, gedung dan gudang KPU Kabupaten Karanganyar yang berfungsi dengan baik Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja Satker KPU Kabupaten Karanganyar yang berfungsi dengan baik	100% 100%	a. Melakukan pemeliharaan maupun perbaikan gedung dan gudang sesuai dengan kebutuhan b. Perawatan dan servis kendaraan secara rutin c. pembayaran pajak kendaraan tepat waktu Perawatan dan servis peralatan dan mesin berupa AC, PC, Laptop, printer secara berkala					Sub Bagian KUL Sub Bagian KUL
7.	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Karanganyar yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	4 kali	a. Melaksanakan revisi DIPA ke Kanwil DJPB sesuai hasil pemerhatian kebutuhan anggaran b. Revisi halaman III DIPA sesuai rencana penarikan dana					Sub Bagian Rendatin
8.	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu Persentase target kinerja KPU Kabupaten Karanganyar yang tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja	100% 100%	Menyusun laporan monitoring dan evaluasi pada aplikasi E-Monev Bappenas dan SMART DJA Kemenkeu a. Melakukan penyusunan matriks kinerja setiap bulan b. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran					Sub Bagian Rendatin Sub Bagian Rendatin
9.	Meningkatnya penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	Persentase penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan oleh KPU Kabupaten Karanganyar	100%	Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) setiap bulan					Sub Bagian KUL
10.	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu oleh KPU Kabupaten Karanganyar	1 laporan	a. Melakukan rekonsiliasi internal data akuntansi keuangan dan akuntansi barang (Aplikasi SAKTI Modul Pelaporan dan Aset) b. Rekonsiliasi internal SAI dan SAU melalui aplikasi E-Rekon dan LK c. Menyusun Laporan Keuangan Semester I, Triwulan III dan Semester II					Sub Bagian KUL

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN				PELAKSANA
					T1	T2	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	1 laporan	Melakukan entry data realisasi anggaran di Aplikasi SIMONIKA					Sub Bagian KUL
12.	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya Sesuai dengan Data SAK	1 laporan	a. Melakukan input persediaan pada aplikasi Persediaan dan belanja modal di aplikasi SIMAK- BMN b. Melakukan rekonsiliasi internal dan eksternal c. Menyusun Laporan BMN Semester I dan Tahunan TA 2022					Sub Bagian KUL
13.	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase arsip yang dikelola sesuai jadwal retensi arsip oleh KPU Kabupaten Karanganyar	100%	Melakukan penataan dan pengelolaan arsip Substansif dan Fasilitasi serta arsip keuangan dan kepegawaian sesuai Jadwal retensi Arsip					Sub Bagian KUL
14.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Karanganyar	Persentase ketaatan KPU Kabupaten/Kota dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu	100%	a. Menyusun dan menyampaikan kartu kendali SPIP ke Provinsi setiap bulan b. Menyusun Laporan SPIP Tahun 2022					Sub Bagian Hukum dan SDM
15.	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola, didokumentasikan dan disajikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%	a. Mengunggah regulasi (PKPU, Keputusan KPU, SE) dan produk hukum KPU Kab. Karanganyar di Website JDIH b. Membuat materi publikasi dan melakukan pengelolaan media sosial JDIH					Sub Bagian Hukum dan SDM
16.	Terlaksananya pendaftaran dan verifikasi Partai Politik Pemilu Tahun 2024	Persentase terlaksananya pendaftaran dan verifikasi Partai Politik Pemilu Tahun 2024 sesuai ketentuan yang berlaku	100%	a. Membentuk tim pokja verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu b. bimbingan teknis peraturan/petunjuk teknis/SOP dan aplikasi verifikasi Partai Politik kepada Partai Politik dan verifikator lapangan c. Pembentukan verifikator lapangan d. Melaksanakan verifikasi administrasi dan faktual serta menyampaikan hasilnya kepada KPU Provinsi					Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parhubmas
17.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	a. Menyusun jadwal petugas layanan PPID b. Menindaklanjuti permohonan informasi secara langsung, melalui E-PPID maupun E-mail					Sub Bagian Hukum dan SDM
18.	Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum	Persentase informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di laman atau media sosial KPU Kabupaten Karanganyar	100%	a. Membuat materi publikasi informasi banner, berita, video dan E-paper KOBIL b. Pengelolaan laman resmi KPU Kab. Karanganyar c. Pengelolaan Media Sosial Instagram, Facebook, Youtube,					Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parhubmas
		Persentase terlaksananya kegiatan Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk masyarakat umum yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Karanganyar	100%	a. Melaksanakan webinar sosialisasi pendidikan pemilih b. Membuat podcast JADI TAHU (Jagongan Demokrasi dan Tahapan Pemilu)					Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parhubmas

Karanganyar, 18 Maret 2022
KPU KABUPATEN KARANGANYAR

TRIASTUTI SURYANDARI



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
(Perubahan)**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : TRIASTUTI SURYANDARI, SE.
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya (sesuai lampiran perjanjian ini), dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Karanganyar, 26 Desember 2022

KETUA KPU KABUPATEN
KARANGANYAR,

TRIASTUTI SURYANDARI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KPU KABUPATEN KARANGANYAR

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Sistem Informasi Mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas di KPU Kabupaten Karanganyar	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada Publik	100 %
2.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kabupaten Karanganyar yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi	B
3.	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan Sumber Daya Manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	100%
4.	Pembentukan dan Evaluasi Badan Penyelenggara Adhoc	Persentase Badan Adhoc yang dibentuk dan dievaluasi	100%
5.	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih tepat waktu	100%
6.	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan E-government di KPU Kabupaten Karanganyar	Persentase sarana dan prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%
7.	Terwujudnya dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran Tugas KPU Kabupaten Karanganyar	Persentase sarana transportasi, gedung dan gudang KPU Kabupaten Karanganyar yang berfungsi dengan baik	100 %
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja Satker KPU Kabupaten Karanganyar yang berfungsi dengan baik	100 %
8.	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Karanganyar yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	4 kali
9.	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100 %
		Persentase target kinerja KPU Kabupaten Karanganyar yang tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja	100 %
10.	Meningkatnya penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	Persentase penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan oleh KPU Kabupaten Karanganyar	100 %
11.	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu oleh KPU Kabupaten Karanganyar	1 Laporan
12.	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	1 Laporan
13.	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya Sesuai dengan Data SAK	1 Laporan

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
14.	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase arsip yang dikelola sesuai jadwal retensi arsip oleh KPU Kabupaten Karanganyar	100%
15.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Karanganyar	Persentase ketaatan KPU Kabupaten/Kota dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu	100%
16.	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola, didokumentasikan dan disajikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%
17.	Terlaksananya pendaftaran dan verifikasi Partai Politik Pemilu Tahun 2024	Persentase terlaksananya pendaftaran dan verifikasi Partai Politik Pemilu Tahun 2024 sesuai ketentuan yang berlaku	100%
18.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu Sesuai Tahapan dan Jadwal	Persentase pemutakhiran data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100%
19.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di laman atau media sosial KPU Kabupaten Karanganyar	100%
20.	Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum	Persentase terlaksananya kegiatan Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk masyarakat umum yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Karanganyar	100%

	Program	Anggaran
1.	Penyelenggaraan Pemilu dan Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 1.726.742.000
2.	Dukungan Manajemen	Rp. 3.186.254.000

Karanganyar, 26 Desember 2022

KETUA KPU KABUPATEN

KARANGANYAR,

TRIASTUTI SURYANDARI



INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022
(Perubahan)

Unit Organisasi : Sekretariat KPU Kabupaten Karanganyar

Tahun : 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Perencanaan Program dan Anggaran serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu		
	Tersedianya dokumen perencanaan program dan anggaran	Jumlah lembaga yang melaksanakan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran serta pengelolaan program, kegiatan dan anggaran	1 Layanan
2.	Terlaksananya Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan		
	Terlaksananya pendaftaran dan verifikasi Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024	Persentase terlaksananya pendaftaran dan verifikasi Partai Politik peserta Pemilu sesuai ketentuan yang berlaku	100%
	Terlaksananya penyusunan jumlah kursi dan Daerah Pemilihan pada Pemilu Tahun 2024	Persentase pemutakhiran data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100%
3.	Terlaksananya Pembinaan SDM dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian		
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan SDM	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	100%
	Pembentukan dan Evaluasi Badan Penyelenggara Adhoc	Persentase Badan Adhoc yang dibentuk dan dievaluasi	100%
4.	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara		
	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan yang tepat waktu	Jumlah layanan dalam menyelesaikan permasalahan satker yang mengalami pagu minus belanja gaji dan tunjangan pegawai	1 Layanan
	Terlaksananya penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	1 Laporan
	Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	1 Laporan
5.	Penyelenggaraan operasional perkantoran dan dukungan Sarana Prasarana		
	Terfasilitasinya layanan perkantoran	Jumlah layanan operasional dan pemeliharaan kantor, kearsipan, pengamanan, protokoler, dan persidangan yang dapat difasilitasi dengan baik	1 Layanan
	Terlaksananya pengelolaan Barang Milik Negara	Jumlah laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya telah sesuai dengan data SAK	1 Laporan
	Terfasilitasinya layanan sarana dan prasarana internal	Jumlah unit dukungan sarana dan prasarana kantor yang dapat berfungsi dengan baik	1 Unit
6.	Terfasilitasinya layanan data dan informasi		

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase terlaksananya Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang tepat waktu	100%
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi	Jumlah unit sarana dan prasarana teknologi informasi yang aman, handal dan lancar	1 Unit
7.	Penyiapan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan		
	Tersusunnya Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar sesuai dengan kerangka regulasi KPU	Persentase Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar yang disusun dan sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase informasi produk hukum yang dikelola, didokumentasikan, disajikan sesuai peraturan atau SOP	100%
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Karanganyar	Persentase ketaatan KPU Kabupaten Karanganyar dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu	100%
8.	Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di laman atau media sosial KPU Kabupaten Karanganyar	100%
	Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum	Persentase terlaksananya kegiatan Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk masyarakat umum	100%

Kegiatan	Anggaran
1. Perencanaan Program dan Anggaran serta Penyusunan Peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	Rp. 837.883.000
2. Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Peserta Pemilu	Rp. 564.373.000
3. Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	Rp. 57.808.000
4. Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	Rp. 202.380.000
5. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	Rp. 64.298.000
6. Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Rp. 2.717.538.000
7. Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Rp. 461.496.000
8. Data dan Informasi	Rp. 7.220.000

Karanganyar, 26 Desember 2022

SEKRETARIS KPU KAB. KARANGANYAR



LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2022

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;

Periode Desember 2022

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 657520 KPU KABUPATEN KARANGANYAR

Hal 1 dari 10

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2022				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	4,912,996,000	0	4,115,771,003	627,035,523	4,742,806,526	96.54 %	170,189,474
CQ Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	1,726,742,000	0	1,033,667,500	527,999,446	1,561,666,946	90.44 %	165,075,054
CQ.6709 Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	837,883,000	0	617,934,277	157,142,750	775,077,027	92.50 %	62,805,973
QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	739,525,000	0	525,104,277	152,092,750	677,197,027	91.57 %	62,327,973
QGE.001 Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	333,476,000	0	290,005,696	27,553,000	317,558,696	95.23 %	15,917,304
111 Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Pemilu	333,476,000	0	290,005,696	27,553,000	317,558,696	95.23 %	15,917,304
111.OA Pengelolaan Program dan Anggaran	1,390,000	0	0	0	0	0.00 %	1,390,000
521211 Belanja Bahan	1,390,000	0	0	0	0	0.00 %	1,390,000
111.OB Koordinasi Perencanaan Program dan Anggaran	24,300,000	0	23,621,900	600,000	24,221,900	99.68 %	78,100
521211 Belanja Bahan	1,410,000	0	1,392,000	0	1,392,000	98.72 %	18,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	22,890,000	0	22,229,900	600,000	22,829,900	99.74 %	60,100
111.OC Sosialisasi Program, Jadwal dan Tahapan Pemilu	400,000	0	0	0	0	0.00 %	400,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	400,000	0	0	0	0	0.00 %	400,000
111.OD Evaluasi Program dan Kegiatan	4,650,000	0	0	0	0	0.00 %	4,650,000
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	4,650,000	0	0	0	0	0.00 %	4,650,000
111.TA Pengelolaan Program dan Anggaran	35,140,000	0	33,800,000	0	33,800,000	96.19 %	1,340,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6,085,000	0	5,432,000	0	5,432,000	89.27 %	653,000
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	20,355,000	0	20,355,000	0	20,355,000	100.00	0
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	8,700,000	0	8,013,000	0	8,013,000	92.10 %	687,000
111.TB Rapat-Rapat Internal	4,216,000	0	3,690,000	0	3,690,000	87.52 %	526,000
521211 Belanja Bahan	238,000	0	0	0	0	0.00 %	238,000
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3,978,000	0	3,690,000	0	3,690,000	92.76 %	288,000
111.TC Sosialisasi Juknis Anggaran dan Pengelolaan Keuangan	20,020,000	0	0	14,226,000	14,226,000	71.06 %	5,794,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	20,020,000	0	0	14,226,000	14,226,000	71.06 %	5,794,000
111.TD Kebutuhan Sarana dan Prasarana	19,060,000	0	16,283,796	2,727,000	19,010,796	99.74 %	49,204
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	4,400,000	0	4,400,000	0	4,400,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2022

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;

Periode Desember 2022

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 657520 KPU KABUPATEN KARANGANYAR

Hal 2 dari 10

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2022				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
521211 Belanja Bahan	5,640,000	0	2,872,000	2,727,000	5,599,000	99.27 %	41,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9,020,000	0	9,011,796	0	9,011,796	99.91 %	8,204
111.TE Medical Check Up Pendukung Tahapan Pemilu	24,300,000	0	24,300,000	0	24,300,000	100.00	0
522191 Belanja Jasa Lainnya	24,300,000	0	24,300,000	0	24,300,000	100.00	0
111.TK Tambahan Pemeliharaan	200,000,000	0	188,310,000	10,000,000	198,310,000	99.16 %	1,690,000
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	200,000,000	0	188,310,000	10,000,000	198,310,000	99.16 %	1,690,000
QGE.002 Pembentukan/Seleksi Badan Penyelenggara Adhok Pemilu	122,754,000	0	32,186,162	85,257,000	117,443,162	95.67 %	5,310,838
111 Pelaksanaan Pembentukan/Seleksi	122,754,000	0	32,186,162	85,257,000	117,443,162	95.67 %	5,310,838
111.OA Koordinasi Pembentukan/Seleksi Badan Penyelenggara Adhok Pemilu	59,967,000	0	22,363,042	33,582,000	55,945,042	93.29 %	4,021,958
521211 Belanja Bahan	5,357,000	0	0	3,020,000	3,020,000	56.37 %	2,337,000
521213 Belanja Honor Output Kegiatan	22,000,000	0	0	22,000,000	22,000,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	32,610,000	0	22,363,042	8,562,000	30,925,042	94.83 %	1,684,958
111.OB Dukungan Operasional Sarana Prasarana	3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000	100.00	0
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000	100.00	0
111.OC Pelaksanaan Seleksi Badan Penyelenggara Adhok	35,275,000	0	0	34,320,000	34,320,000	97.29 %	955,000
521211 Belanja Bahan	35,275,000	0	0	34,320,000	34,320,000	97.29 %	955,000
111.TA Koordinasi Pembentukan Adhok	11,512,000	0	9,823,120	1,650,000	11,473,120	99.66 %	38,880
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2,700,000	0	2,661,120	0	2,661,120	98.56 %	38,880
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7,650,000	0	6,000,000	1,650,000	7,650,000	100.00	0
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1,162,000	0	1,162,000	0	1,162,000	100.00	0
111.TB Pelaksanaan Seleksi Adhok	13,000,000	0	0	12,705,000	12,705,000	97.73 %	295,000
521211 Belanja Bahan	13,000,000	0	0	12,705,000	12,705,000	97.73 %	295,000
QGE.003 Fasilitas Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	1,000,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000,000
111 Pelaksanaan Pembentukan/Seleksi	1,000,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000,000
111.OA Fasilitas Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	1,000,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000,000
521211 Belanja Bahan	1,000,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2022

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;

Periode Desember 2022

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 657520 KPU KABUPATEN KARANGANYAR

Hal 3 dari 10

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2022				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
QGE.004 Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	14,365,000	0	2,815,000	10,690,000	13,505,000	94.01 %	860,000
111 Pelaksanaan Pelatihan Teknis Kepemiluan	14,365,000	0	2,815,000	10,690,000	13,505,000	94.01 %	860,000
111.OA Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	14,365,000	0	2,815,000	10,690,000	13,505,000	94.01 %	860,000
521211 Belanja Bahan	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	100.00	0
522191 Belanja Jasa Lainnya	700,000	0	0	0	0	0.00 %	700,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10,800,000	0	0	10,690,000	10,690,000	98.98 %	110,000
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1,865,000	0	1,815,000	0	1,815,000	97.32 %	50,000
QGE.005 Pemutakhiran Data Pemilih	18,708,000	0	17,011,182	0	17,011,182	90.93 %	1,696,818
111 Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih	18,708,000	0	17,011,182	0	17,011,182	90.93 %	1,696,818
111.OA Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih	17,678,000	0	15,984,682	0	15,984,682	90.42 %	1,693,318
521211 Belanja Bahan	2,033,000	0	340,000	0	340,000	16.72 %	1,693,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12,645,000	0	12,644,682	0	12,644,682	100.00	318
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	100.00	0
111.OB Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih	1,030,000	0	1,026,500	0	1,026,500	99.66 %	3,500
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1,030,000	0	1,026,500	0	1,026,500	99.66 %	3,500
QGE.006 Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	166,784,000	0	154,417,737	0	154,417,737	92.59 %	12,366,263
111 Pelaksanaan Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	166,784,000	0	154,417,737	0	154,417,737	92.59 %	12,366,263
111.OA Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	63,225,000	0	58,766,237	0	58,766,237	92.95 %	4,458,763
521211 Belanja Bahan	14,675,000	0	14,634,100	0	14,634,100	99.72 %	40,900
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	19,185,000	0	19,167,137	0	19,167,137	99.91 %	17,863
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9,750,000	0	9,750,000	0	9,750,000	100.00	0
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	19,615,000	0	15,215,000	0	15,215,000	77.57 %	4,400,000
111.OB Penyusunan Laporan	663,000	0	540,000	0	540,000	81.45 %	123,000
521211 Belanja Bahan	663,000	0	540,000	0	540,000	81.45 %	123,000
111.TA Sosialisasi Tatap Muka	101,909,000	0	94,361,500	0	94,361,500	92.59 %	7,547,500
521211 Belanja Bahan	7,639,000	0	7,628,000	0	7,628,000	99.86 %	11,000
522151 Belanja Jasa Profesi	4,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	75.00 %	1,000,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2022

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;

Periode Desember 2022

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 657520 KPU KABUPATEN KARANGANYAR

Hal 4 dari 10

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2022				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10,770,000	0	4,273,500	0	4,273,500	39.68 %	6,496,500
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	79,500,000	0	79,460,000	0	79,460,000	99.95 %	40,000
111.TB Penyusunan Laporan	987,000	0	750,000	0	750,000	75.99 %	237,000
521211 Belanja Bahan	987,000	0	750,000	0	750,000	75.99 %	237,000
QGE.007 Penyusunan Peraturan Pemilu	53,032,000	0	14,578,000	24,529,250	39,107,250	73.74 %	13,924,750
112 Koordinasi Penyusunan Peraturan Pemilu	53,032,000	0	14,578,000	24,529,250	39,107,250	73.74 %	13,924,750
112.OA Penyusunan Peraturan Pemilu	9,000,000	0	4,088,500	0	4,088,500	45.43 %	4,911,500
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9,000,000	0	4,088,500	0	4,088,500	45.43 %	4,911,500
112.TA Sosialisasi Kebijakan/regulasi KPU	25,090,000	0	10,489,500	11,805,000	22,294,500	88.86 %	2,795,500
521211 Belanja Bahan	1,950,000	0	1,941,000	0	1,941,000	99.54 %	9,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12,340,000	0	8,548,500	1,375,000	9,923,500	80.42 %	2,416,500
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	10,800,000	0	0	10,430,000	10,430,000	96.57 %	370,000
112.TB Pengelolaan JDIH	18,942,000	0	0	12,724,250	12,724,250	67.17 %	6,217,750
521211 Belanja Bahan	5,042,000	0	0	0	0	0.00 %	5,042,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	13,900,000	0	0	12,724,250	12,724,250	91.54 %	1,175,750
QGE.008 Logistik Pemilu	29,406,000	0	14,090,500	4,063,500	18,154,000	61.74 %	11,252,000
110 Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	29,406,000	0	14,090,500	4,063,500	18,154,000	61.74 %	11,252,000
110.TA Pengelolaan/Pengadaan/Distribusi/Laporan Logistik	29,406,000	0	14,090,500	4,063,500	18,154,000	61.74 %	11,252,000
521211 Belanja Bahan	1,150,000	0	0	0	0	0.00 %	1,150,000
522151 Belanja Jasa Profesi	1,000,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	18,746,000	0	14,090,500	4,063,500	18,154,000	96.84 %	592,000
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	8,510,000	0	0	0	0	0.00 %	8,510,000
RAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	98,358,000	0	92,830,000	5,050,000	97,880,000	99.51 %	478,000
RAN.001 Sarana IT Pemilu	98,358,000	0	92,830,000	5,050,000	97,880,000	99.51 %	478,000
110 Pengelolaan Sarana IT KPU	98,358,000	0	92,830,000	5,050,000	97,880,000	99.51 %	478,000
110.OA Pengelolaan IT Pemilu	6,358,000	0	1,200,000	5,050,000	6,250,000	98.30 %	108,000
521211 Belanja Bahan	6,358,000	0	1,200,000	5,050,000	6,250,000	98.30 %	108,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2022

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;

Periode Desember 2022

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 657520 KPU KABUPATEN KARANGANYAR

Hal 5 dari 10

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2022				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
110.TA Pengelolaan dan Layanan Data serta Informasi bidang IT	92,000,000	0	91,630,000	0	91,630,000	99.60 %	370,000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	92,000,000	0	91,630,000	0	91,630,000	99.60 %	370,000
CQ.6710 Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Peserta Pemilu	564,373,000	0	349,559,208	176,208,168	525,767,376	93.16 %	38,605,624
QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	564,373,000	0	349,559,208	176,208,168	525,767,376	93.16 %	38,605,624
QGE.001 Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	498,625,000	0	337,620,948	149,487,800	487,108,748	97.69 %	11,516,252
111 Pelaksanaan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	498,625,000	0	337,620,948	149,487,800	487,108,748	97.69 %	11,516,252
111.OA Bimbingan Teknis Verifikasi Parpol	2,740,000	0	2,606,500	0	2,606,500	95.13 %	133,500
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2,740,000	0	2,606,500	0	2,606,500	95.13 %	133,500
111.OB Pelaksanaan Verifikasi Parpol	161,705,000	0	145,581,448	8,686,500	154,267,948	95.40 %	7,437,052
521211 Belanja Bahan	5,650,000	0	0	5,134,500	5,134,500	90.88 %	515,500
521241 Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	65,000	0	0	0	0	0.00 %	65,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	31,220,000	0	29,781,448	0	29,781,448	95.39 %	1,438,552
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	93,000,000	0	92,100,000	900,000	93,000,000	100.00	0
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	24,300,000	0	23,700,000	0	23,700,000	97.53 %	600,000
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	7,470,000	0	0	2,652,000	2,652,000	35.50 %	4,818,000
111.OC Rapat Koordinasi Verpol	82,869,000	0	82,208,500	628,800	82,837,300	99.96 %	31,700
521211 Belanja Bahan	38,109,000	0	37,463,500	628,800	38,092,300	99.96 %	16,700
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	465,000	0	450,000	0	450,000	96.77 %	15,000
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	44,295,000	0	44,295,000	0	44,295,000	100.00	0
111.TA Bimbingan Teknis Verpol	44,500,000	0	41,768,500	0	41,768,500	93.86 %	2,731,500
521211 Belanja Bahan	3,595,000	0	863,500	0	863,500	24.02 %	2,731,500
522151 Belanja Jasa Profesi	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,700,000	0	2,700,000	0	2,700,000	100.00	0
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	37,205,000	0	37,205,000	0	37,205,000	100.00	0
111.TB Pelaksanaan Verifikasi Parpol	121,910,000	0	27,081,000	93,672,500	120,753,500	99.05 %	1,156,500
521211 Belanja Bahan	11,220,000	0	4,305,000	6,542,500	10,847,500	96.68 %	372,500

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2022

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;

Periode Desember 2022

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 657520 KPU KABUPATEN KARANGANYAR

Hal 6 dari 10

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2022				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	33,000,000	0	0	33,000,000	33,000,000	100.00	0
522191	Belanja Jasa Lainnya	19,500,000	0	0	19,500,000	19,500,000	100.00	0
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	24,930,000	0	22,776,000	2,030,000	24,806,000	99.50 %	124,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	33,260,000	0	0	32,600,000	32,600,000	98.02 %	660,000
111.TC	Rapat Koordinasi Verpol	84,901,000	0	38,375,000	46,500,000	84,875,000	99.97 %	26,000
521211	Belanja Bahan	38,401,000	0	38,375,000	0	38,375,000	99.93 %	26,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	46,500,000	0	0	46,500,000	46,500,000	100.00	0
QGE.002 Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu		65,748,000	0	11,938,260	26,720,368	38,658,628	58.80 %	27,089,372
110 Pelaksanaan Advokasi dan Sengketa Hukum		65,748,000	0	11,938,260	26,720,368	38,658,628	58.80 %	27,089,372
110.OA	Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu	12,387,000	0	8,994,760	0	8,994,760	72.61 %	3,392,240
521211	Belanja Bahan	3,387,000	0	0	0	0	0.00 %	3,387,000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9,000,000	0	8,994,760	0	8,994,760	99.94 %	5,240
110.TA	Penyusunan Bahan Sengketa dan Laporan	18,141,000	0	0	0	0	0.00 %	18,141,000
521211	Belanja Bahan	13,361,000	0	0	0	0	0.00 %	13,361,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	4,780,000	0	0	0	0	0.00 %	4,780,000
110.TK	Tambahan Operasional Perkantoran	35,220,000	0	2,943,500	26,720,368	29,663,868	84.22 %	5,556,132
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	7,960,000	0	0	7,960,000	7,960,000	100.00	0
522111	Belanja Langganan Listrik	9,260,000	0	0	6,021,368	6,021,368	65.03 %	3,238,632
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	18,000,000	0	2,943,500	12,739,000	15,682,500	87.12 %	2,317,500
CQ.6887	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	57,808,000	0	18,815,500	31,813,100	50,628,600	87.58 %	7,179,400
QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum		57,808,000	0	18,815,500	31,813,100	50,628,600	87.58 %	7,179,400
QGE.001 Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih		23,528,000	0	0	18,736,100	18,736,100	79.63 %	4,791,900
111 Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih		23,528,000	0	0	18,736,100	18,736,100	79.63 %	4,791,900
111.TA	Pemutakhiran Data Pemilih	23,528,000	0	0	18,736,100	18,736,100	79.63 %	4,791,900
521211	Belanja Bahan	4,448,000	0	0	0	0	0.00 %	4,448,000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	19,080,000	0	0	18,736,100	18,736,100	98.20 %	343,900
QGE.002 Pemutakhiran Data Pemilih		33,280,000	0	18,815,500	13,077,000	31,892,500	95.83 %	1,387,500

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2022

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;

Periode Desember 2022

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 657520 KPU KABUPATEN KARANGANYAR

Hal 7 dari 10

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2022				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
111 Pemutakhiran Data Pemilih	33,280,000	0	18,815,500	13,077,000	31,892,500	95.83 %	1,387,500
111.TB Rapat Koordinasi Data Pemilih	33,280,000	0	18,815,500	13,077,000	31,892,500	95.83 %	1,387,500
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10,580,000	0	8,820,500	1,302,000	10,122,500	95.68 %	457,500
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	20,570,000	0	9,995,000	10,545,000	20,540,000	99.85 %	30,000
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2,130,000	0	0	1,230,000	1,230,000	57.75 %	900,000
QGE.003 Penetapan Data Pemilih	1,000,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000,000
111 Penetapan Data Pemilih	1,000,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000,000
111.TA Penetapan Data Pemilih	1,000,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000,000
521211 Belanja Bahan	1,000,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000,000
CQ.6889 Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	202,380,000	0	47,358,515	129,401,428	176,759,943	87.34 %	25,620,057
QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	202,380,000	0	47,358,515	129,401,428	176,759,943	87.34 %	25,620,057
QGE.001 Fasilitasi Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	121,780,000	0	36,438,515	73,497,428	109,935,943	90.27 %	11,844,057
111 Fasilitasi Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	121,780,000	0	36,438,515	73,497,428	109,935,943	90.27 %	11,844,057
111.TA Penetapan Dapil Pemilu	121,780,000	0	36,438,515	73,497,428	109,935,943	90.27 %	11,844,057
521211 Belanja Bahan	2,590,000	0	480,000	0	480,000	18.53 %	2,110,000
522151 Belanja Jasa Profesi	1,000,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	91,510,000	0	25,853,515	60,457,928	86,311,443	94.32 %	5,198,557
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	20,210,000	0	10,105,000	7,670,000	17,775,000	87.95 %	2,435,000
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	6,470,000	0	0	5,369,500	5,369,500	82.99 %	1,100,500
QGE.002 Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	79,600,000	0	10,920,000	55,904,000	66,824,000	83.95 %	12,776,000
111 Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	79,600,000	0	10,920,000	55,904,000	66,824,000	83.95 %	12,776,000
111.TA Penetapan Dapil Pemilu	79,600,000	0	10,920,000	55,904,000	66,824,000	83.95 %	12,776,000
521211 Belanja Bahan	6,005,000	0	0	5,604,000	5,604,000	93.32 %	401,000
521213 Belanja Honor Output Kegiatan	33,000,000	0	0	33,000,000	33,000,000	100.00	0
522151 Belanja Jasa Profesi	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12,225,000	0	0	0	0	0.00 %	12,225,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2022

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;

Periode Desember 2022

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 657520 KPU KABUPATEN KARANGANYAR

Hal 8 dari 10

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2022				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	27,370,000	0	10,920,000	16,300,000	27,220,000	99.45 %	150,000
QGE.003 Evaluasi Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	1,000,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000,000
111 Evaluasi Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	1,000,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000,000
111.TA Evaluasi Penetapan Daerah Pemilihan	1,000,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000,000
521211 Belanja Bahan	1,000,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000,000
CQ.6890 Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	64,298,000	0	0	33,434,000	33,434,000	52.00 %	30,864,000
QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	64,298,000	0	0	33,434,000	33,434,000	52.00 %	30,864,000
QGE.001 Fasilitas Kesiapan Kegiatan Pencalonan	23,848,000	0	0	7,334,000	7,334,000	30.75 %	16,514,000
111 Fasilitas Kesiapan Kegiatan Pencalonan	23,848,000	0	0	7,334,000	7,334,000	30.75 %	16,514,000
111.TA Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden	23,848,000	0	0	7,334,000	7,334,000	30.75 %	16,514,000
521211 Belanja Bahan	2,838,000	0	0	0	0	0.00 %	2,838,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1,420,000	0	0	0	0	0.00 %	1,420,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	19,590,000	0	0	7,334,000	7,334,000	37.44 %	12,256,000
QGE.002 Pelaksanaan Proses Pencalonan	39,450,000	0	0	26,100,000	26,100,000	66.16 %	13,350,000
111 Pelaksanaan Proses Pencalonan	39,450,000	0	0	26,100,000	26,100,000	66.16 %	13,350,000
111.TA Proses Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden	39,450,000	0	0	26,100,000	26,100,000	66.16 %	13,350,000
521211 Belanja Bahan	1,000,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000,000
521213 Belanja Honor Output Kegiatan	22,000,000	0	0	11,000,000	11,000,000	50.00 %	11,000,000
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	16,450,000	0	0	15,100,000	15,100,000	91.79 %	1,350,000
QGE.003 Evaluasi Pencalonan	1,000,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000,000
111 Evaluasi Pencalonan	1,000,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000,000
111.TA Pelaksanaan Evaluasi Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden	1,000,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000,000
521211 Belanja Bahan	1,000,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000,000
WA Program Dukungan Manajemen	3,186,254,000	0	3,082,103,503	99,036,077	3,181,139,580	99.84 %	5,114,420
WA.3355 Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	2,717,538,000	0	2,633,662,853	80,577,295	2,714,240,148	99.88 %	3,297,852
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	2,717,538,000	0	2,633,662,853	80,577,295	2,714,240,148	99.88 %	3,297,852

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2022

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;

Periode Desember 2022

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 657520 KPU KABUPATEN KARANGANYAR

Hal 9 dari 10

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2022				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
EBA.994 Layanan Perkantoran	2,717,538,000	0	2,633,662,853	80,577,295	2,714,240,148	99.88 %	3,297,852
001 Gaji dan Tunjangan	2,717,538,000	0	2,633,662,853	80,577,295	2,714,240,148	99.88 %	3,297,852
001.OA Gaji dan Tunjangan	1,914,807,000	0	1,830,932,353	80,577,295	1,911,509,648	99.83 %	3,297,352
511111 Belanja Gaji Pokok PNS	820,701,000	0	820,701,000	0	820,701,000	100.00	0
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS	17,000	0	15,515	0	15,515	91.26 %	1,485
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	72,840,000	0	72,830,660	0	72,830,660	99.99 %	9,340
511122 Belanja Tunj. Anak PNS	24,452,000	0	24,254,518	0	24,254,518	99.19 %	197,482
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS	47,880,000	0	47,880,000	0	47,880,000	100.00	0
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
511125 Belanja Tunj. PPh PNS	1,570,000	0	1,570,000	0	1,570,000	100.00	0
511126 Belanja Tunj. Beras PNS	57,430,000	0	57,284,220	0	57,284,220	99.75 %	145,780
511129 Belanja Uang Makan PNS	134,401,000	0	112,870,000	18,775,000	131,645,000	97.95 %	2,756,000
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS	30,940,000	0	30,940,000	0	30,940,000	100.00	0
512411 Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	724,575,000	0	662,586,440	61,802,295	724,388,735	99.97 %	186,265
001.OB Uang Kehormatan	802,731,000	0	802,730,500	0	802,730,500	100.00	500
511332 Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	802,731,000	0	802,730,500	0	802,730,500	100.00	500
WA.3360 Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	461,496,000	0	441,777,650	18,008,782	459,786,432	99.63 %	1,709,568
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	461,496,000	0	441,777,650	18,008,782	459,786,432	99.63 %	1,709,568
EBA.962 Dukungan Fasilitas Kegiatan KPU	52,224,000	0	49,345,250	2,520,000	51,865,250	99.31 %	358,750
051 Dukungan Fasilitas Kegiatan KPU	52,224,000	0	49,345,250	2,520,000	51,865,250	99.31 %	358,750
051.OA Layanan Prasarana Internal	52,224,000	0	49,345,250	2,520,000	51,865,250	99.31 %	358,750
521211 Belanja Bahan	14,700,000	0	14,220,250	470,000	14,690,250	99.93 %	9,750
521213 Belanja Honor Output Kegiatan	7,200,000	0	6,000,000	1,200,000	7,200,000	100.00	0
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	5,000,000	0	4,980,000	0	4,980,000	99.60 %	20,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	25,324,000	0	24,145,000	850,000	24,995,000	98.70 %	329,000
EBA.994 Layanan Perkantoran	409,272,000	0	392,432,400	15,488,782	407,921,182	99.67 %	1,350,818
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	409,272,000	0	392,432,400	15,488,782	407,921,182	99.67 %	1,350,818

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2022

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;

Periode Desember 2022

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 657520 KPU KABUPATEN KARANGANYAR

Hal 10 dari 10

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2022				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
002.OA Layanan Perkantoran	409,272,000	0	392,432,400	15,488,782	407,921,182	99.67 %	1,350,818
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	32,012,000	0	28,282,050	2,755,800	31,037,850	96.96 %	974,150
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,300,000	0	961,600	248,000	1,209,600	93.05 %	90,400
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	85,800,000	0	77,840,000	7,960,000	85,800,000	100.00	0
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya	21,725,000	0	21,720,750	0	21,720,750	99.98 %	4,250
521131 Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	6,916,000	0	4,968,000	1,893,000	6,861,000	99.20 %	55,000
522111 Belanja Langganan Listrik	44,172,000	0	44,141,119	0	44,141,119	99.93 %	30,881
522112 Belanja Langganan Telepon	680,000	0	527,762	113,579	641,341	94.31 %	38,659
522113 Belanja Langganan Air	2,292,000	0	2,067,400	211,500	2,278,900	99.43 %	13,100
522191 Belanja Jasa Lainnya	15,059,000	0	13,746,050	1,306,903	15,052,953	99.96 %	6,047
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	104,176,000	0	103,158,000	1,000,000	104,158,000	99.98 %	18,000
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	92,140,000	0	92,117,669	0	92,117,669	99.98 %	22,331
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3,000,000	0	2,902,000	0	2,902,000	96.73 %	98,000
WA.6634 Data dan Informasi	7,220,000	0	6,663,000	450,000	7,113,000	98.52 %	107,000
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	7,220,000	0	6,663,000	450,000	7,113,000	98.52 %	107,000
EBA.963 Layanan Data dan Informasi	7,220,000	0	6,663,000	450,000	7,113,000	98.52 %	107,000
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	7,220,000	0	6,663,000	450,000	7,113,000	98.52 %	107,000
005.OA Layanan Data dan Informasi	7,220,000	0	6,663,000	450,000	7,113,000	98.52 %	107,000
521211 Belanja Bahan	600,000	0	600,000	0	600,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6,620,000	0	6,063,000	450,000	6,513,000	98.38 %	107,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN HASIL

PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN TAHUN BERJALAN

Desember 2022

#657520

KPU KABUPATEN KARANGANYAR

KOMISI PEMILIHAN UMUM

REKAP KOMPONEN

Tahun Anggaran : 2022
Kementerian/Lembaga : 076 - KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Kerja Eselon I : 01 - Komisi Pemilihan Umum
Bulan : Desember (Kumulatif)

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
3355.EBA.994 Layanan Perkantoran													
1	3355.EBA.994.001 Gaji dan Tunjangan	Layanan	1	1	2,717,538,000	2,714,240,148	99.88%	Selesai	Terlaksananya belanja pegawai bulan Desember 2022 yaitu gaji induk, Tunjangan Kinerja, Uang makan, Penghasilan PPNPN Komisioner	100 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
3360.EBA.962 Layanan Umum													
2	3360.EBA.962.051 Dukungan Fasilitas Kegiatan KPU		1	1	52,224,000	51,865,250	99.31%	Selesai	melaksanakan pengelolaan BMN, menyusun laporan persediaan dan BMN, melaksanakan perjalanan dinas, serta merealisasikan pembayaran honor operator dan pengelola BMN	100 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
3360.EBA.994 Layanan Perkantoran													
3	3360.EBA.994.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Layanan	1	1	409,272,000	407,921,182	99.67%	Selesai	capaian komponen layanan operasional dan pemeliharaan kantor di bulan Desember 2022 yaitu melaksanakan belanja operasional perkantoran, langganan daya jasa, pemeliharaan peralatan dan mesin, pemeliharaan gedung bangunan, dan honor pengelola keuangan bulan November	100 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
6634.EBA.963 Layanan Data dan Informasi													

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
4	6634.EBA.963.005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Layanan	1	1	7,220,000	7,113,000	98.52%	Selesai	KPU Karanganyar telah selesai melaksanakan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2022 dengan output rekapitulasi DPB Terakhir (bulan September 2022)	100 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
6709.QGE.001 Perencanaan dan Penganggaran Pemilu													
5	6709.QGE.001.111 Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Pemilu	Satker	1	1	333,476,000	317,558,696	95.23%	Selesai	output komponen di bulan Desember : menghadiri pemeriksaan pajak di KPP Pratama, Rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan dan Tahapan di Provinsi, pembayaran Jasa konsultasi dan jasa pengawasan perencanaan renovasi Kantor KPU Karanganyar	100 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
6709.QGE.002 Pembentukan/Seleksi Badan Penyelenggara Adhok Pemilu													
6	6709.QGE.002.111 Pelaksanaan Pembentukan/Seleksi	Satker	1	1	122,754,000	117,443,162	95.67%	Selesai	output kegiatan bulan Desember : ujian seleksi berbasis komputer (CAT) dan seleksi wawancara bagi calon anggota PPK Pemilu 2024, Cetak Spanduk Pengumuman pendaftaran PPS Pemilu 2024, pembayaran honor pokja Pelaksanaan kegiatan seleksi pembentukan Badan ADHOC, Koordinasi pembentukan PPS , Konsultasi pelaksanaan seleksi wawancara calon anggota PPK, Rapat evaluasi pembentukan PPK Pemilu Tahun 2024	100 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
6709.QGE.003 Fasilitasi Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota													
7	6709.QGE.003.111 Pelaksanaan Pembentukan/Seleksi	Satker	1	1	1,000,000	0	0.00%	Selesai	output kegiatan ini adalah Pelatihan aplikasi SIAKBA untuk persiapan Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	100 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
6709.QGE.004 Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan													

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
8	6709.QGE.004.111 Pelaksanaan Pelatihan Teknis Kepemiluan	Satker	1	1	14,365,000	13,505,000	94.01%	Selesai	output dari komponen ini adalah keikutsertaan dalam Diklat Teknis Tata Kelola Pemilu bagi ASN dan Diklat Pengamaman dalam bagi Jagat Saksana/Satpam KPU Karanganyar	100 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
6709.QGE.005 Pemutakhiran Data Pemilih													
9	6709.QGE.005.111 Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih	Satker	1	1	18,708,000	17,011,182	90.93%	Selesai	persiapan pelaksanaan Tahapan Mutarlih Pemilu Tahun 2024 diantaranya Menghadiri undangan bawaslu terkait pemetaan TPS Lokasi Khusus, koordinasi internal pemetaan TPS Lokasi khusus	100 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
6709.QGE.006 Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan													
10	6709.QGE.006.111 Pelaksanaan Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	Satker	1	1	166,784,000	154,417,737	92.59%	Selesai	outout dari komponen ini adalah terlaksananya sosialisasi pendidikan pemilih Pemilu 2024 kepada segmen pemula, disabilitas, perempuan, masyarakat umum serta media gathering Pemilu 2024	100 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
6709.QGE.007 Penyusunan Peraturan Pemilu													
11	6709.QGE.007.112 Koordinasi Penyusunan Peraturan Pemilu	Satker	1	1	53,032,000	39,107,250	73.74%	Selesai	output komponen bulan desember : Kegiatan peningkatan peran JDIH KPU dalam rangka Penyusunan tahapan Pemilu 2024, Menghadiri Rakor kebijakan regulasi, Koordinasi pengumuman pendaftaran PPS di 17 kecamatan, Rakor evaluasi pengelolaan dan penyusunan laporan SPIP, perjadiin dalam rangka Konsultasi penanganan pelanggaran administrasi dan sengketa, Raker evaluasi penyusunan regulasi Pemilu serentak Tahun 2024	100 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
6709.QGE.008 Logistik Pemilu													

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
17	6887.QGE.002.111 Pemutakhiran Data Pemilih	Satker	1	1	33,280,000	31,892,500	95.83%	Selesai	melaksanakan kegiatan Sosialisasi PKPU 7 kepada stakeholder dan Parpol, menghadiri undangan KPU Provinsi Sosialisasi SMKI dan perlindungan data pribadi di semarang, menghadiri undangan KPU Provinsi rakor persiapan penyusunan data pemilih Pemilu 2024 di Nava Tawangmangu	100 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
6887.QGE.003 Penetapan Data Pemilih													
18	6887.QGE.003.111 Penetapan Data Pemilih	Satker	1	1	1,000,000	0	0.00%	Selesai	output komponen ini adalah rakor-rakor persiapan pemutakhiran data Pemilih Pemilu 2024 dan pra pemetaan TPS di Lokasi khusus	100 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah	pagu anggaran tidak terserap karena nominal pagu hanya 1 juta dan untuk pencapaian output kegiatan telah diakomodir oleh RO 6887.QGE.001 dan 6887.QGE.002
6889.QGE.001 Fasilitasi Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan													
19	6889.QGE.001.111 Fasilitasi Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	Satker	1	1	121,780,000	109,935,943	90.27%	Selesai	pelaksanaan capaian RO di bulan desember : rakornas penataan dapil di Pontianak, Konsultasi penataan Dapil dan alokasi kursi di KPU RI, menghadiri undangan KPU Provinsi Rakor pencermatan rencana penataan Dapil di semarang dan Rakoord penyusunan laporan penataan Dapil dan Alokasi kursi di Salatiga dan melaksanakan Sosialisasi dan persiapan uji publik rencana daerah pemilihan dan alokasi kursi DPRD Kab Karanganyar	100 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
6889.QGE.002 Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan													

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
20	6889.QGE.002.111 Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	Satker	1	1	79,600,000	66,824,000	83.95%	Selesai	pelaksanaan capaian RO di bulan desember : pembayaran honorarium Pokja Penataan Dapil dan alokasi Kursi anggota DPRD serta belanja bahan untuk mendukung kegiatan penataan Dapil dan pelaksanaan kegiatan Uji publik rencana penataan daerah pemilihan dan anggota kursi Anggota DPRD Kab. Karanganyar	100 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
6889.QGE.003 Evaluasi Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan													
21	6889.QGE.003.111 Evaluasi Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	Satker	1	1	1,000,000	0	0.00%	Selesai	output dari RO ini adalah tersusunya Daearah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD Kab. Karanganyar Pemilu 2024	100 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah	pagu anggaran tidak terserap karena nominal pagu hanya 1 juta dan untuk pencapaian output kegiatan telah diakomodir oleh RO 6889.QGE.001 dan 6889.QGE.002
6890.QGE.001 Fasilitasi Kesiapan Kegiatan Pencalonan													
22	6890.QGE.001.111 Fasilitasi Kesiapan Kegiatan Pencalonan	Satker	1	1	23,848,000	7,334,000	30.75%	Selesai	pelaksanaan kegiatan bulan desember yaitu menghadiri rakor persiapan pencalonan anggota DPD Pemilu 2024 dan Rapat persiapan Verifikasi administrasi dukungan calon perseorangan DPD RI di KPU Provinsi serta melaksanakan rakor Pokja Pencalonan anggota DPD	100 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
6890.QGE.002 Pelaksanaan Proses Pencalonan													
23	6890.QGE.002.111 Pelaksanaan Proses Pencalonan	Satker	1	1	39,450,000	26,100,000	66.16%	Selesai	output bulan desember yaitu : melaksanakan Sosialisasi pencalonan DPD Pemilu 2024 dan pembayaran honorarium pokja Sosialisasi pencalonan Anggota DPD Pada Pemilu 2024	100 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
6890.QGE.003 Evaluasi Pencalonan													
24	6890.QGE.003.111 Evaluasi Pencalonan	Satker	1	1	1,000,000	0	0.00%	Selesai	output komponen ini adalah terlaksananya sosialisasi pencalonan anggota DPD dan koordinasi persiapan vermin calon perseorangan anggota DPD	100 %	Sudah	Anggaran,Tidak Ada Masalah	pagu anggaran tidak terserap karena nominal pagu hanya 1 juta dan untuk pencapaian output kegiatan telah diakomodir oleh RO 6890.QGE.001 dan 6890.QGE.002

Lembar Pengesahan

Mengetahui,
Kepala Unit / Satuan Kerja KPU KABUPATEN KARANGANYAR 6



MASYKUR, S.Sos., M.M.